DIBALIK BILIK SUARA KOTA JAKARTA TIMUR : DINAMIKA TAHAPAN PEMILU 2024

PERJALANAN PEMILU TAHUN 2024

**PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD,
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

TIM PENYUSUN

Tim Pengarah :

Tedi Kurnia
Carlos Kartika Yudha Paath
Fahrur Rohman
Marhadi
Rio Verieza
Solahuddin

Editor dan Tim Penyusun :

Triantoro Andri Kurniawan
Destri Natali Putranti
Eka Dewi Rachmawati
Nancy Adriana Lenda M

Desain / Layout:

Titok Eko Hartanto
Heru Muharto

Tim Data :

Staff KPU Kota Jaktim
Siswa SMK 11 Maret

diterbitkan oleh
KPU Kota Jakarta Timur
Jl. Pulomas Barat VI Kayu Putih
Pulogadung Jakarta Timur

Kata pengantar

TEDI KURNIA
KETUA KPU KOTA JAKARTA TIMUR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayahNya, kami memiliki kesempatan untuk menyelesaikan Buku Tahapan Pemilihan Umum Anggota

DPR, DPD, DPRD Provinsi serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Buku ini dibuat berdasarkan hasil pelaksanaan dan implementasi di lapangan. kami sadar bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan tidak akan berjalan maksimal tanpa bantuan dari berbagai pihak, seperti *Stakeholders*, tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat, dan dan para peserta pemilu.

Kami KPU Kota Jakarta Timur dengan segala kerendahan hati berharap agar kegiatan-kegiatan kami selama ini yang telah terlaksana dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum, dan pasca pemilu dan Pemilihan kami dapat terus melakukan pengembangan pendidikan pemilih khususnya agar partisipasi meningkat dari sebelumnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Jakarta Timur

ttd

Tedi Kurnia

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Daftar Isi

1 PENDAHULUAN | 1

2 PEMBENTUKAN BADAN ADHOC | 3

- a. Pembentukan PPK | 3
- b. Pembentukan Sekretariat PPK | 19
- c. Pembentukan PPS | 21
- d. Pembentukan Sekretariat PPS | 42
- e. Pantarlih | 44
- f. Pembentukan KPPS | 55
- g. Perekrutan KPPS | 56
- h. Pelantikan KPPS | 58
- i. Bimtek KPPS | 58

3 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILIH | 59

- a. Penerimaan dan pencermatan data Pemilih Hasil Sinkronisasi (DP4 dan DPB) | 59
- b. Pemetaan TPS Reguler | 61
- c. Pencocokan dan Penelitian | 64
- d. Penyusunan DPHP | 68
- e. Pembentukan TPS Loksus | 72
- f. Penetapan DPS | 73
- g. Masa Tangmas DPS | 75
- h. Penyusunan DPSHP | 76

- i. Penetapan DPS Akhir dan DPT | 82
- j. Penyusunan Pindah Memilih | 87
- k. Sidalih dan DPT Online | 89

4 DAERAH PEMILIHAN PEMILU 2024 | 97

5 PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU TAHUN 2024 | 104

- a. Peserta Pemilu | 104
- b. Pencalolan Calon Anggota DPD RI | 111
- c. Tahap Persiapan | 114
- d. Tahap Pelaksanaan | 118

6 PEMUNGUTAN DAN TUNGRA PEMILU TAHUN 2024 | 126

- a. Tahap Persiapan | 135
- b. Tahap Pelaksanaan | 135

7 TATA KELOLA LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 | 175

8 PENANGANAN DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN INTERNAL BADAN ADHOC PADA PEMILU 2024 | 227

DAFTAR PUSTAKA

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Pemilu 2024 adalah kali kedua dalam sejarah, Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) diselenggarakan secara serentak pada hari yang sama, 14 Februari 2024. Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan adanya Pemilu serentak 2024, masyarakat Indonesia yang telah terdaftar sebagai pemilih nantinya harus mencoblos 4 surat suara sekaligus di bilik suara. Empat surat suara itu untuk memilih anggota DPRD tingkat provinsi, anggota DPR, anggota DPD, serta calon Presiden dan Wakil Presiden.

Disamping memenuhi ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengharuskan untuk melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan, diharapkan untuk dapat menjelaskan proses pelaksanaan dan hasil penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dimulai dari proses persiapan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraannya.

PEMBENTUKAN BADAN ADHOC

PEMBENTUKAN PPK

Dalam rangka menjalankan aturan / regulasi yang disebutkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Jakarta Timur melaksanakan berbagai macam persiapan pembentukan Badan Adhoc. Persiapan tersebut meliputi rapat koordinasi dengan para stakeholder, rapat koordinasi secara internal, serta melakukan sosialisasi kepada elemen

masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Kegiatan persiapan pembentukan PPK ini dimulai dengan Rapat Pimpinan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sekaligus Sosialisasi Pembentukan Badan Adhoc dan Pengenalan Aplikasi SIAKBA di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 27 Oktober 2022 dengan jumlah Luring 50 orang dan Daring 65 orang. Rapat dipimpin oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dan dihadiri para pimpinan Stakholder Kota Administrasi Jakarta Timur. Disini KPU Kota Jakarta Timur menyampaikan informasi awal

sebelum keluarnya PKPU 8 Tahun 2022, tapi tahapan badan Adhoc akan berjalan dari bulan November 2022 s.d. Januari 2023.

Untuk tepat waktunya, tunggu keluar PKPU atau Keputusan Petunjuk Teknis Badan Adhoc yang dikeluarkan oleh KPU RI.

Gambar 1. KPU Kota Jakarta Timur mengikuti Rapim Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur

Selanjutnya tanggal 7 November 2022 di aula Lantai 2 Kantor KPU Kota Jakarta Timur dilaksanakan pada tanggal 7 November 2022 di aula Lantai 2 Kantor KPU Kota Jakarta Timur. Disini dihadiri oleh Seluruh Pegawai KPU

Lingkungan KPU Kota Jakarta Timur dilaksanakan pada tanggal 7 November 2022 di aula Lantai 2 Kantor KPU Kota Jakarta Timur. Disini dihadiri oleh Seluruh Pegawai KPU

Kota Jakarta Timur. Pemateri disini adalah Anggota KPU (Tri Endraningsih) untuk penjelasan hasil rapat koordinasi Badan Adhoc dengan KPU RI serta informasi pembentukan Badan Adhoc yang akan dilaksanakan pada

bulan November 2022 serta Kepala Sub Bagian Hukum & SDM (Rivandi) pengenalan Aplikasi SIAKBA. Aplikasi SIAKBA dapat dilakukan secara Mandiri atau Non Mandiri.

Gambar 2. Rakor Pembentukan Badan Adhoc Pemilu dan Sosialisasi Aplikasi SIAKBA

Pada tanggal 10 Jakarta Timur mengadakan November 2022, KPU Kota Sosialisasi Pembentukan

Badan Adhoc dan Penggunaan Aplikasi SIAKBA di Hotel Fave PGC Cililitan. Peserta undangan Sosialisasi yaitu KPU Provinsi DKI Jakarta, Stakeholder Kota Administrasi Jakarta Timur, 5 Kecamatan (Kramat Jati, Pasar Rebo, Makasar, Ciracas dan Cipayung), RT, RW, Organisasi Masyarakat serta *Non*

Governmental Organization (NGO). Sosialisasi dilaksanakan dengan tujuan menyampaikan materi pembentukan Badan Adhoc serta pengenalan aplikasi SIAKBA oleh masyarakat, organisasi masyarakat serta stakeholder tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur.

Gambar 3. Sosialisasi Pembentukan Badan Adhoc dan Penggunaan Aplikasi SIAKBA di Hotel Fave PGC Cililitan

Selanjutnya, pada Tanggal 11 November 2022, KPU Kota Jakarta Timur mengadakan Sosialisasi Pembentukan Badan Adhoc dan Penggunaan Aplikasi SIAKBA di Hotel Fieris Rawamangun. Peserta undangan Sosialisasi yaitu KPU Provinsi DKI Jakarta, Stakeholder Kota Administrasi Jakarta Timur, 5 Kecamatan

(Matraman, Jatinegara, Pulogadung, Duren Sawit dan Cakung), RT, RW, Organisasi Masyarakat serta NGO. Sosialisasi dilaksanakan dengan tujuan menyampaikan materi pembentukan Badan Adhoc serta pengenalan aplikasi SIAKBA oleh masyarakat, organisasi masyarakat serta stakeholder tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur

Gambar 4. Sosialisasi Pembentukan Badan Adhoc dan Penggunaan Aplikasi SIAKBA di Hotel Fieris

Selain melakukan sosialisasi secara mandiri, KPU Kota Jakarta Timur juga diundang beberapa kali oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai narasumber, salah satunya pada tanggal 15 November 2022 di Gedung C Kantor Walikota Jakarta Timur.

Dalam sosialisasi tersebut, KPU Kota Jakarta Timur diwakili oleh Tri Endraningsih selaku Anggota Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan SDM. Peserta sosialisasi yaitu para stakeholder di tingkat kecamatan, kelurahan, dan RW.

Gambar 5. KPU Jakarta Timur sebagai Narasumber Sosialisasi Perekrutan Badan Adhoc

Beberapa Kecamatan di wilayah Kota Jakarta Timur juga turut mengundang KPU Kota Jakarta Timur sebagai narasumber untuk mensosialisasikan perekrutan badan adhoc. Salah satunya adalah Kecamatan Ciracas pada tanggal 17 November 2022.

Tahapan pembentukan Badan Adhoc dimulai dengan penerimaan pendaftaran calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK dilakukan pada tanggal 20 November 2022 s.d. 29 November 2022. Penerimaan pendaftaran dapat dilakukan

secara Mandiri yaitu melalui Aplikasi SIAKBA. Dengan cara pelamar membuat akun SIAKBA dan mengupload dokumen-dokumen sesuai

persyaratan atau langsung datang ke Kantor KPU Kota Jakarta Timur dibantu oleh *Helpdesk* KPU Kota Jakarta Timur.

Pelamar yang melamar sebagai Anggota PPK yaitu 1.180 pelamar. Jumlah rincian pendaftar tiap kecamatan dapat dijelaskan dalam Bagan 1 berikut:

Bagan 1. Jumlah pelamar pada tahap seleksi administrasi tiap kecamatan Kota Jakarta Timur

Bagan 1 menjelaskan bahwa pelamar terbanyak berada di Kecamatan Cakung

yakni sebanyak 181 orang. Sedangkan pelamar paling sedikit berada di Kecamatan

Pasar Rebo dengan jumlah 91 orang.

Dari sebanyak 1.180 pelamar telah dilakukan seleksi Administrasi dalam melakukan seleksi administrasi, berkas yang disebut Memenuhi Syarat/MS apabila pelamar memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan yang terdiri dari :

1. Surat Pendaftaran yang sesuai dengan format SIAKBA;
2. Daftar Riwayat Hidup yang sesuai dengan format SIAKBA;
3. Fotocopy KTP Elektronik;
4. Fotocopy Ijazah terakhir minimal SMA/ sederajat;
5. Pas Foto 4x6 cm;
6. Surat Pernyataan yang sesuai dengan format SIAKBA;

7. Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh puskesmas, klinik, dan rumah sakit dan didalamnya terdapat hasil pemeriksaan Tekanan Darah, Gula Darah, dan Kolesterol.

Hasil seleksi administrasi didapatkan hasil Memenuhi Syarat/MS sebanyak 307 orang dan Tidak Memenuhi Syarat/TMS sebanyak 872 orang. Hasil tersebut ditetapkan melalui Berita Acara Pleno Nomor 76/PP.04.1-BA/3175/2022 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 1 Desember 2022.

Pengumuman hasil seleksi administrasi calon

Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) disampaikan dalam pengumuman KPU Kota Jakarta Timur Nomor 05/PP.04.1-Pu/3175/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui website resmi KPU Kota Jakarta Timur dan status

pelamar di masing-masing akun SIAKBA. Peserta yang dinyatakan Lulus atau Memenuhi Syarat berhak mengikuti seleksi lanjutan yaitu seleksi tertulis dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT). Pelaksanaan CAT dilakukan di Gedung Pustikom Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Gambar 6. Seleksi Tertulis CAT Calon Anggota PPK di Universitas Negeri Jakarta

Pelaksanaan Seleksi Tertulis dengan metode CAT calon anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2022 dengan jumlah peserta CAT yaitu 307 orang dengan rincian yang dapat dijelaskan dalam Bagan 2 berikut.

Bagan 2. Jumlah Peserta yang mengikuti seleksi tertulis CAT

Pelaksanaan seleksi tertulis dengan metode CAT dibagi menjadi 4 sesi dimana sesi 1 dijadwalkan pada pukul 10.15 – 11.45 WIB, sesi 2 pukul 12.30 – 14.00 WIB, sesi

3 pukul 15.00 – 17.00 WIB, dan sesi 4 pukul 17.15 – 19.00 WIB dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 248 orang.

Peserta yang lolos ujian seleksi tertulis adalah peserta

yang mendapatkan nilai tertinggi dengan peringkat 1 – 15 di setiap kecamatan. Namun, apabila ada peserta yang memiliki nilai yang sama pada peringkat 15 ke bawah, maka peserta tersebut dinyatakan lolos.

Dari Seleksi Tertulis dengan Metode CAT didapatkan hasil Lulus sebanyak 153 peserta dan Tidak Lulus sebanyak 154 peserta. Hasil tersebut dituang dalam Berita Acara Pleno Nomor 80/PP.04.1-BA/3175/2022 tentang Perubahan Berita Acara Pleno Nomor 78/PP.04.1-BA/3175/2022 tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum

Tahun 2024.

Pengumuman hasil seleksi tertulis calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) disampaikan dalam pengumuman KPU Kota Jakarta Timur Nomor 07/PP.04.1-Pu/3175/2022

tentang Penetapan Hasil Seleksi Tertulis *Computer Assisted Test* (CAT) Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui website resmi KPU Kota Jakarta Timur dan status pelamar di masing-masing akun SIAKBA.

Peserta yang dinyatakan LULUS selanjutnya melakukan tahapan Seleksi Wawancara yang dilaksanakan di Aula Lantai 2 Kantor KPU Kota Jakarta

Timur pada tanggal 11 jumlah laki berjumlah 115 dan Desember 2022 s.d. 13 Perempuan berjumlah 38 yang Desember 2022 dengan rincian dijelaskan dalam Bagan 3

Bagan 3. Peserta yang Mengikuti Seleksi Wawancara

Pelaksanaan Seleksi Wawancara dilakukan secara bergiliran selama 3 hari yaitu pada tanggal 11 sampai dengan 13 Desember 2022. Dari 153 orang yang Lulus, terdapat 3 orang yang tidak hadir dalam proses seleksi

wawancara karena mengundurkan diri.

Penilaian yang dilakukan dalam seleksi wawancara mencakup aspek Loyalitas, Pendidikan, Komunikasi, Kemampuan, dan Pengalaman. Setiap

aspek memiliki skor nilai 0-100. Sehingga nilai total maksimal sebesar 500.

Sebanyak 5 (lima) peserta dengan nilai tertinggi di setiap kecamatan

dinyatakan lolos dan menjadi Calon Anggota PPK Terpilih. Sedangkan peserta dengan peringkat 6 sampai 10 dinyatakan sebagai Calon Pengganti Antar Waktu PPK.

Gambar 7. Seleksi Wawancara Calon Anggota PPK

Dari hasil Seleksi Wawancara, KPU Kota Jakarta Timur menetapkan 50 anggota PPK terpilih dan 50

anggota Pengganti Antar Waktu yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor 82/PP.04.1-

BA/3175/2022 tentang Hasil Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum tahun 2024.

Pengumuman hasil seleksi wawancara calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) disampaikan dalam pengumuman KPU Kota Jakarta Timur Nomor : 09 /PP.04.1-Pu/3175/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui website resmi KPU Kota Jakarta Timur dan status pelamar di

masing-masing akun SIAKBA.

Selanjutnya, pada tanggal 16 Desember 2022 KPU Kota Jakarta Timur menetapkan hasil akhir calon anggota PPK terpilih dalam Berita Acara Pleno Nomor 84/PP.04.1-BA/3175/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Berdasarkan hasil pleno tersebut, KPU Kota Jakarta Timur menetapkan 50 calon Anggota PPK Terpilih dan 50 calon Pengganti Antar Waktu PPK

Calon Anggota PPK Terpilih selanjutnya akan mengikuti serangkaian acara pelantikan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan pada tanggal 4 Januari 2023. Adapun acara pelantikan Anggota PPK dilaksanakan di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dengan menghadirkan saksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dan para stakeholder di tingkat Kota Jakarta Timur.

Gambar 8. Pelantikan Anggota PPK di Wilayah Kota Adm. Jakarta Timur

Daftar Anggota PPK Terpilih ini ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Selanjutnya, di tanggal yang sama KPU Kota Jakarta Timur melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis untuk Anggota PPK di Hotel Fave PGC Cililitan.

Gambar 9. Bimbingan Teknis untuk Anggota PPK

Dengan berjalannya pelaksanaan Bimbingan Teknis, maka Anggota PPK diharapkan mampu menuntaskan kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilu Tahun 2024 di tingkat kecamatan hingga masa kerjanya berakhir.

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPK

Berdasarkan Pasal 58 Pemilihan Umum Nomor 8
Ayat (1) Peraturan Komisi Tahun 2022 tentang

Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Sekretariat PPK berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau Non-Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan pemerintah kabupaten/kota. Serta, berdasarkan Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, bahwa pembentukan sekretariat PPK dilakukan setelah pengangkatan PPK terhitung sejak pengambilan sumpah/janji sampai dengan

paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengambilan sumpah/janji.

Pembentukan Sekretariat PPK didahului dengan pengajuan usulan atau rekomendasi dari PPK yang diajukan ke KPU Kota Jakarta Timur. Selanjutnya rekomendasi usulan calon sekretaris dan calon staf sekretariat PPK Kota Jakarta Timur tersebut diteruskan oleh KPU Kota Jakarta Timur ke Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.

Berdasarkan surat tersebut, Walikota Kota Jakarta Timur menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0008 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris

dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Timur.

Sekretariat PPK yang terdiri dari 3 (tiga) orang terdiri dari jabatan Sekretaris; Staff Urusan Tata Usaha, Keuangan, Umum, dan Logistik; dan Staff Urusan

Teknis Penyelenggara. Pembentukan Sekretariat PPK juga ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

PEMBENTUKAN PPS

Dalam rangka menjalankan aturan/regulasi yang disebutkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Jakarta Timur melaksanakan berbagai macam persiapan pembentukan Badan Adhoc. Persiapan tersebut meliputi rapat koordinasi dengan para stakeholder, rapat koordinasi secara internal,

serta melakukan sosialisasi kepada elemen masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Kegiatan persiapan pembentukan PPS ini hampir sama dengan pembentukan PPK dimana kegiatan dimulai dengan Rapat Pimpinan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sekaligus Sosialisasi Pembentukan

Badan Adhoc dan Pengenalan Aplikasi SIAKBA di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 27 Oktober 2022 dengan jumlah Luring 50 orang dan Daring 65 orang. Rapat dipimpin oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dan dihadiri para pimpinan Stakholder Kota Administrasi Jakarta Timur.

Gambar 10. KPU Kota Jakarta Timur mengikuti Rapim Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur

Selanjutnya tanggal Rapat Koordinasi Pembentukan Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024 dan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIAKBA di Lingkungan KPU Kota Jakarta

Timur dilaksanakan pada tanggal 7 November 2022 di aula Lantai 2 Kantor KPU Kota Jakarta Timur. Disini dihadiri oleh Seluruh Pegawai KPU Kota Jakarta Timur.

Gambar 11. Rakor Pembentukan Badan Adhoc Pemilu dan Sosialisasi Aplikasi SIAKBA

Pada tanggal 10 November 2022, KPU Kota Jakarta Timur mengadakan

Sosialisasi Pembentukan Badan Adhoc dan Penggunaan Aplikasi SIAKBA di Hotel

Fave PGC Cililitan. Peserta undangan Sosialisasi yaitu KPU Provinsi DKI Jakarta, Stakeholder Kota Administrasi Jakarta Timur, 5 Kecamatan (Kramat Jati, Pasar Rebo, Makasar, Ciracas dan Cipayung), RT, RW, Organisasi Masyarakat serta *Non Governmental Organization*

(NGO). Sosialisasi dilaksanakan dengan tujuan menyampaikan materi pembentukan Badan Adhoc serta pengenalan aplikasi SIAKBA oleh masyarakat, organisasi masyarakat serta stakeholder tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur.

Gambar 12. Sosialisasi Pembentukan Badan Adhoc dan Penggunaan Aplikasi SIAKBA di Hotel Fave PGC Cililitan

Selanjutnya, pada Tanggal 11 November 2022, KPU Kota Jakarta Timur mengadakan Sosialisasi Pembentukan Badan Adhoc dan Penggunaan Aplikasi SIAKBA di Hotel Fieris Rawamangun. Peserta undangan Sosialisasi yaitu KPU Provinsi DKI Jakarta, Stakeholder Kota Administrasi Jakarta Timur, 5 Kecamatan

(Matraman, Jatinegara, Pulogadung, Duren Sawit dan Cakung), RT, RW, Organisasi Masyarakat serta NGO. Sosialisasi dilaksanakan dengan tujuan menyampaikan materi pembentukan Badan Adhoc serta pengenalan aplikasi SIAKBA oleh masyarakat, organisasi masyarakat serta stakeholder tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur

Gambar 13. Sosialisasi Pembentukan Badan Adhoc dan Penggunaan Aplikasi SIAKBA di Hotel Fieris

Selain melakukan sosialisasi secara mandiri, KPU Kota Jakarta Timur juga diundang beberapa kali oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai narasumber, salah satunya pada tanggal 15 November 2022 di Gedung C Kantor Walikota Jakarta Timur.

Dalam sosialisasi tersebut, KPU Kota Jakarta Timur diwakili oleh Tri Endraningsih selaku Anggota Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan SDM. Peserta sosialisasi yaitu para stakeholder di tingkat kecamatan, kelurahan, dan RW.

Gambar 14. KPU Jakarta Timur sebagai Narasumber Sosialisasi Perekrutan Badan Adhoc

Beberapa Kelurahan di wilayah Kota Jakarta Timur juga turut mengundang KPU Kota Jakarta Timur sebagai narasumber untuk mensosialisasikan perekrutan badan adhoc. Salah satunya adalah Kelurahan Duren Sawit pada tanggal 3 Desember 2022.

Gambar 15. KPU Jakarta Timur sebagai Narasumber Sosialisasi Perekrutan Badan Adhoc

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, tahapan pembentukan Badan Adhoc berjalan mulai tanggal

18 Desember 2022 hingga 24 pembentukan PPS dengan Januari 2023. Adapun jadwal rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Jadwal Tahapan Pembentukan PPS

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1	umuman pendaftaran calon anggota PPS	Desember 2022	Desember 2022
2	penerimaan pendaftaran calon anggota PPS	Desember 2022	Desember 2022
3	penelitian administrasi calon anggota PPS	Desember 2022	Januari 2023
4	pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS	Januari 2023	Januari 2023
5	tes tertulis calon anggota PPS	Januari 2023	Januari 2023
6	pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS	Januari 2023	Januari 2023
7	kegiatan sosialisasi dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS	Januari 2023	Januari 2023
8	pengumuman calon anggota PPS	Januari 2023	Januari 2023
9	pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS	Januari 2023	Januari 2023
10	penyusunan calon anggota PPS	Januari 2023	Januari 2023
11	pengumuman calon anggota PPS	Januari 2023	Januari 2023

Tahapan pembentukan anggota PPS. Penerimaan PPS dimulai dengan pendaftaran calon anggota PPS penerimaan pendaftaran calon dilakukan pada tanggal 18

Desember 2022 s.d. 22 Desember 2022. Penerimaan pendaftaran dapat dilakukan secara Mandiri yaitu melalui Aplikasi SIAKBA. Dengan cara pelamar membuat akun SIAKBA dan mengupload

dokumen-dokumen sesuai persyaratan atau langsung datang ke Kantor KPU Kota Jakarta Timur dibantu oleh *Helpdesk* KPU Kota Jakarta Timur

Pelamar yang melamar sebagai Anggota PPS yaitu 812 (delapan ratus dua belas) pelamar. Jumlah rincian pendaftar tiap kecamatan dapat dijelaskan dalam Bagan 1 berikut:

Bagan 4. Jumlah pelamar pada tahap seleksi administrasi tiap kecamatan Kota Jakarta Timur

Bagan 1 menjelaskan bahwa pelamar terbanyak berada di Kecamatan Cakung yakni sebanyak 157 orang. Sedangkan pelamar paling sedikit berada di Kecamatan Pasar Rebo dengan jumlah 49 orang.

Sebanyak 812 pelamar dilakukan seleksi Administrasi dan pelamar dinyatakan Memenuhi Syarat/MS jika memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan yang terdiri dari :

1. Surat Pendaftaran yang sesuai dengan format SIAKBA;
2. Daftar Riwayat Hidup yang sesuai dengan format SIAKBA;
3. Fotocopy KTP Elektronik;
4. Fotocopy Ijazah terakhir minimal SMA/ sederajat;

5. Pas Foto 4x6 cm;
6. Surat Pernyataan yang sesuai dengan format SIAKBA;
7. Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh puskesmas, klinik, dan rumah sakit dan didalamnya terdapat hasil pemeriksaan Tekanan Darah, Gula Darah, dan Kolesterol.

Hasil seleksi administrasi didapatkan hasil Memenuhi Syarat/MS sebanyak 672 orang dan Tidak Memenuhi Syarat/TMS sebanyak 140 orang. Hasil tersebut ditetapkan melalui Berita Acara Pleno Nomor 01/PP.04.1-BA/3175/2023 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2023.

Pengumuman hasil seleksi administrasi calon Anggota PPS disampaikan dalam pengumuman KPU Kota Jakarta Timur Nomor 02/PP.04.1-Pu/3175/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui website resmi KPU Kota Jakarta Timur dan status pelamar di masing-masing akun SIAKBA.

Peserta yang dinyatakan Lulus atau Memenuhi Syarat berhak mengikuti seleksi lanjutan yaitu seleksi tertulis dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT). Pelaksanaan CAT dilakukan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA yang beralamatkan di Jl. Tanah Merdeka No.20, Ciracas Jakarta Timur

Gambar 16. Seleksi Tertulis CAT Calon Anggota PPS di UHAMKA

Pelaksanaan Seleksi Tertulis dengan metode CAT calon anggota PPS dilaksanakan selama 2 hari yaitu pada tanggal 6 sampai dengan 7 Januari 2023 dengan jumlah peserta CAT yaitu 672 orang dengan rincian yang dapat dijelaskan dalam Bagan 2 berikut.

Bagan 5. Jumlah Peserta yang mengikuti seleksi tertulis CAT

Pelaksanaan seleksi tertulis dengan metode CAT dibagi menjadi 6 sesi yang dirincikan dalam table berikut :

Tabel 2. Rincian Jadwal Seleksi Tertulis (CAT) Calon Anggota PPS

No.	Sesi	Jadwal	Pukul
1	I	Jumat, 6 Januari 2023	08.30 – 10.30 WIB
2	II		13.30 – 15.30 WIB
3	III		15.30 – 17.30 WIB
4	IV	Sabtu, 7 Januari 2023	08.00 – 10.00 WIB
5	V		10.00 – 12.00 WIB
6	VI		13.00 – 15.00 WIB

Peserta yang lolos ujian seleksi tertulis adalah peserta yang mendapatkan nilai tertinggi dengan peringkat 1 – 9 di setiap kecamatan. Namun, apabila ada peserta yang memiliki nilai yang sama pada peringkat 9 ke bawah, maka peserta tersebut juga dinyatakan lolos.

Dari Seleksi Tertulis dengan Metode CAT didapatkan hasil Lulus sebanyak 470 peserta dan Tidak Lulus sebanyak 202 peserta. Hasil tersebut dituang dalam Berita Acara Pleno Nomor 05/PP.04.1-BA/3175/2023 tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan

Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pengumuman hasil seleksi tertulis calon Anggota PPS disampaikan dalam pengumuman KPU Kota Jakarta Timur Nomor 04/PP.04.1-Pu/3175/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tertulis *Computer Assisted Test* (CAT) Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui website resmi KPU Kota Jakarta Timur dan

status pelamar di masing-masing akun SIAKBA.

Peserta yang dinyatakan LULUS selanjutnya melakukan tahapan Seleksi Wawancara yang dilaksanakan di Aula Lantai 2 Kantor KPU Kota Jakarta Timur pada tanggal 15 s.d. 17 Januari 2023 dengan rincian jumlah peserta Laki-laki sebanyak 270 orang dan perempuan berjumlah 200 orang yang dirincikan dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Rincian Jumlah Peserta yang Mengikuti Seleksi Wawancara

Kecamatan	Kelurahan	Perempuan	Laki-Laki	Total
Cakung	Cakung Barat	1	8	9
	Cakung Timur	2	7	9
	Jatinegara	3	6	9
	Penggilingan	1	10	11
	Pulo Gebang	3	6	9
	Rawa Terate	5	2	7
	Ujung Menteng	2	6	8
Cipayung	Bambu Apus	2	4	6
	Ceger	3	2	5
	Cilangkap	1	6	7
	Cipayung	1	5	6
	Lubang Buaya	2	7	9
	Munjul	1	4	5
	Pondok Ranggan	3	2	5
	Setu	0	6	6
Ciracas	Cibubur	6	4	10
	Ciracas	3	4	7
	Kelapa Dua Wetan	3	4	7
	Rambutan	3	4	7
	Susukan	2	7	9
Duren Sawit	Duren Sawit	3	2	5
	Klender	4	5	9
	Malaka Jaya	3	6	9
	Malaka Sari	3	4	7

Kecamatan	Kelurahan	Perempuan	Laki-Laki	Total
	Pondok Bambu	4	5	9
	Pondok Kelapa	1	5	6
	Pondok Kopi	2	5	7
Jatinegara	Bali Mester	5	2	7
	Bidara Cina	4	2	6
	Cipinang Besar Selatan	1	4	5
	Cipinang Besar Utara	2	3	5
	Cipinang Cempedak	3	3	6
	Cipinang Muara	3	6	9
	Kampung Melayu	4	5	9
	Rawa Bunga	2	4	6
Kramat Jati	Balekambang	2	4	6
	Batu Ampar	5	4	9
	Cawang	2	2	4
	Cililitan	5	2	7
	Dukuh	2	2	4
	KramatJati	1	4	5
	Tengah	2	7	9
Makasar	Cipinang Melayu	1	6	7
	Halim Perdana Kusuma	2	3	5
	Kebon Pala	5	4	9
	Makasar	3	5	8
	PinangRanti	5	2	7

Kecamatan	Kelurahan	Perempuan	Laki-Laki	Total
Matraman	Kayu Manis	5	2	7
	Kebon Manggis	4	2	6
	PalMeriam	5	2	7
	Pisangan Baru	3	7	10
	Utan Kayu Selatan	3	3	6
	Utan Kayu Utara	3	6	9
Pasar Rebo	Baru	2	1	3
	Cijantung	3	3	6
	Gedong	3	4	7
	Kalisari	3	6	9
	Pekayon	4	3	7
Pulo Gadung	Cipinang	3	2	5
	Jati	6	3	9
	Jatinegara Kaum	4	2	6
	Kayu Putih	5	4	9
	Pisangan Timur	5	4	9
	Pulo Gadung	6	4	10
	Rawamangun	7	2	9

Pelaksanaan Seleksi Wawancara dilakukan secara bergiliran selama 3 hari yaitu pada tanggal 15 sampai dengan 17 Januari 2023. Dari 470 orang yang Lulus, terdapat 27 orang yang tidak hadir dalam proses seleksi wawancara karena mengundurkan diri.

Penilaian yang dilakukan dalam seleksi wawancara mencakup aspek Loyalitas, Pendidikan, Komunikasi, Kemampuan, dan Pengalaman. Setiap aspek memiliki skor nilai 0-100. Sehingga nilai total maksimal sebesar 500.

Sebanyak 3 peserta dengan nilai tertinggi di setiap kelurahan dinyatakan lolos dan menjadi Calon Anggota PPS Terpilih. Sedangkan peserta dengan peringkat 4 sampai 6 dinyatakan sebagai Calon Pengganti Antar Waktu PPS.

Gambar 17. Seleksi Wawancara Calon Anggota PPS

Dari hasil Seleksi Wawancara, KPU Kota Jakarta Timur

menetapkan 195 anggota PPS terpilih dan 171 anggota Pengganti Antar Waktu yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor 39/PP.04.1-BA/3175/2023 tentang Hasil Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum tahun 2024.

Pengumuman hasil seleksi wawancara calon Anggota PPS disampaikan dalam pengumuman KPU Kota Jakarta Timur Nomor : 06 /PP.04.1-Pu/3175/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui

website resmi KPU Kota Jakarta Timur dan status pelamar di masing-masing akun SIAKBA.

Selanjutnya, pada tanggal 20 Januari 2023 KPU Kota Jakarta Timur menetapkan hasil akhir calon anggota PPS terpilih dalam Berita Acara Pleno Nomor 41/PP.04.1-BA/3175/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Berdasarkan hasil pleno tersebut, KPU Kota Jakarta Timur menetapkan 195 calon Anggota PPS Terpilih dan 171 calon Pengganti Antar Waktu PPS.

Calon Anggota PPS

Terpilih selanjutnya akan mengikuti serangkaian acara pelantikan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh KPU Kota Jakarta Timur. Adapun acara pelantikan Anggota PPS dilaksanakan di Gedung C

Kantor Walikota Jakarta Timur pada tanggal 24 Januari 2023 dengan menghadirkan saksi Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dan para stakeholder di tingkat Kota Jakarta Timur.

Gambar 18. Pelantikan Anggota PPS di Wilayah Kota Adm. Jakarta Timur

Daftar Anggota PPS
Terpilih ini ditetapkan dalam

Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kota Administrasi

Jakarta Timur Nomor 6 Tahun 2023 sampai dengan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Cakung sampai dengan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur

untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Selanjutnya, pada tanggal 25 Januari 2023, KPU Kota Jakarta Timur melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis untuk Anggota PPS di Hotel Sentral Cawang.

Gambar 19. Bimbingan Teknis untuk Anggota PPS

Dengan berjalannya pelaksanaan Bimbingan Teknis, maka Anggota PPS diharapkan mampu menuntaskan kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilu Tahun 2024 di tingkat kelurahan hingga masa kerjanya berakhir.

Pembentukan Sekretariat PPS

Berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Sekretariat PPS berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau Non-Aparatur Sipil

Negara yang bekerja di lingkungan kantor kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain. Serta, berdasarkan Pasal 68 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, bahwa pembentukan sekretariat PPS dilakukan setelah pengangkatan PPS terhitung sejak pengambilan sumpah/janji sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengambilan sumpah/janji.

Pembentukan Sekretariat PPS didahului dengan pengajuan usulan atau rekomendasi dari PPS yang diajukan ke KPU Kota Jakarta Timur melalui PPK. Selanjutnya rekomendasi usulan calon sekretaris dan calon staf sekretariat PPS tersebut diteruskan oleh KPU Kota Jakarta Timur ke Lurah se-Kota Administrasi Jakarta Timur melalui surat Ketua KPU Kota Jakarta Timur Nomor 14/PP.04.1-SD/3175/2023 tanggal 26 Januari 2023 perihal Usulan Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2024.

Berdasarkan surat tersebut, Lurah se-Kota Jakarta Timur menetapkan

Keputusan Lurah tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Timur.

Sekretariat PPS yang terdiri dari 3 (tiga) orang terdiri dari jabatan Sekretaris; Staff Urusan Tata Usaha, Keuangan, Umum, dan Logistik; dan Staff Urusan Teknis Penyelenggara. Pembentukan Sekretariat PPS juga ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 18 Tahun 2023 hingga Nomor 82 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia

Pemungutan Suara Kota untuk Pemilihan Umum
Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024.

Pantarlih

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, pembentukan Pantarlih dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon Pantarlih.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR

Jadwal Pembentukan
**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PEMILU TAHUN 2024**

Pengumuman Pendaftaran calon Pantarlih	26 – 28 Januari 2023
Penerimaan Pendaftaran calon Pantarlih	26 – 31 Januari 2023
Penelitian administrasi calon Pantarlih	27 Jan – 2 Feb 2023
Pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih	3 – 5 Februari 2023
Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih	5 Februari 2023
Pelantikan Pantarlih	6 Februari 2023
Masa kerja Pantarlih	6 Feb – 15 Maret 2023

CATATAN : Pendaftaran Pantarlih dilaksanakan di wilayah kerja PPS masing-masing

www.jakartatimur.kpu.go.id [kpujaktim](https://www.instagram.com/kpujaktim) [KPU Kota Jakarta Timur](https://www.facebook.com/KPU.Kota.Jakarta.Timur) [@kpujakartatimur](https://twitter.com/kpujakartatimur) [KPU KOTA JAKARTA TIMUR](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Dalam seleksi calon Pantarlih dilakukan oleh PPS di wilayah kerja masing – masing dengan melakukan tahapan kegiatan meliputi:

a. Pengumuman Pendaftaran Calon Pantarlih

1. PPS mengumumkan pendaftaran Rekrutmen Pantarlih tentang seleksi calon petugas pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan umum tahun 2024 pada tanggal 26

Januari sampai dengan 28 Januari 2023.

2. Menempelkan Pengumuman pendaftaran pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.

b. Penerimaan Pendaftaran Calon Pantarlih

1. PPS menerima administrasi pendaftaran calon Pantarlih sejak pengumuman pendaftaran

- dilakukan sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran, yaitu Mulai dari tanggal 26 Januari sampai 31 Januari 2023;
2. Menerima kelengkapan dokumen persyaratan calon Pantarlih secara fisik.
- c. Penelitian Administrasi Calon Pantarlih
1. PPS Menerima berkas Administrasi Pendaftaran Calon Pantarlih sejak Hari Pengumuman sampai batas terakhir pada tanggal 31 Januari 2023,
 2. PPS melakukan penelitian administrasi dengan melakukan pencocokan kelengkapan dokumen persyaratan calon Pantarlih dengan meneliti dan mempertimbangkan keterampilan penggunaan teknologi gadget serta kecakapan lainnya, yang dilakukan dari tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tahapan penelitian administrasi berakhir tanggal 2 Februari 2023.
- d. Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pantarlih
1. PPS mengumumkan hasil seleksi berdasarkan berita acara penetapan hasil

seleksi paling lama 3 (tiga) Hari setelah tahapan penelitian administrasi calon Pantarlih yaitu dari tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan 5 Februari 2023;

2. mengumumkan hasil seleksi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.

Staf KPU Jakarta Timur melakukan monitoring terkait Penelitian Administarasi berkas Pantarlih

KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PANTARLIH
MATRAMAN	PISANGAN BARU	108	108
	UTAN KAYU UTARA	94	94
	KAYU MANIS	84	84
	PALMERIAM	64	64
	KEBON MANGGIS	53	53
	UTAN KAYU SELATAN	114	114
PULO GADUNG	PULO GADUNG	115	115
	PISANGAN TIMUR	138	138
	CIPINANG	128	128
	JATINEGARA KAUM	82	82
	RAWAMANGUN	124	124
	KAYU PUTIH	135	135
	JATI	108	108
JATINEGARA	KAMPUNG MELAYU	86	86
	BIDARA CINA	123	123
	BALI MESTER	32	32

	RAWA BUNGA	73	73
	CIPINANG CEMPEDAK	107	107
	CIPINANG MUARA	180	180
	CIPINANG BESAR SELATAN	116	116
	CIPINANG BESAR UTARA	153	153
KRAMATJATI	KRAMATJATI	113	113
	TENGAH	148	148
	DUKUH	85	85
	BATU AMPAR	161	161
	BALEKAMBANG	97	97
	CILILITAN	136	136
	CAWANG	108	108
PASARREBO	GEDONG	122	122
	BARU	73	73
	CIJANTUNG	141	141
	KALISARI	142	142
	PEKAYON	142	142
CAKUNG	JATINEGARA	296	296
	RAWA TERATE	83	83

	PENGGILINGAN	348	348
	CAKUNG TIMUR	205	205
	PULO GEBANG	352	352
	UJUNG MENTENG	105	105
	CAKUNG BARAT	200	200
DUREN SAWIT	DUREN SAWIT	210	210
	PONDOK BAMBUI	213	213
	KLENDER	238	238
	PONDOK KELAPA	261	261
	MALAKA SARI	89	89
	MALAKA JAYA	105	105
	PONDOK KOPI	127	127
MAKASAR	MAKASAR	117	117
	PINANGRANTI	94	94
	KEBON PALA	156	156
	HALIM PERDANA KUSUMA	78	78
	CIPINANG MELAYU	143	143
	CIRACAS	220	220
CIRACAS	CIBUBUR	223	223

	KELAPA DUA WETAN	166	166
	SUSUKAN	132	132
	RAMBUTAN	124	124
CIPAYUNG	CIPAYUNG	92	92
	CILANGKAP	96	96
	PONDOK RANGGON	95	95
	MUNJUL	80	80
	SETU	70	70
	BAMBU APUS	94	94
	LUBANG BUAYA	213	213
	CEGER	63	63
TOTAL		8773	8773

Total Rekap Kebutuhan Pantarlih Per-Kelurahan pada
Pemilu 2024

e. Pelantikan dan Bimbingan Teknis Pantarlih

1. Pelantikan Pantarlih dilakukan serentak pada tanggal 6 Februari 2023 pada pukul 09.00 WIB di Kelurahan wilayah kerja masing-masing, dalam pelantikan juga dilakukan penyematan simbolis

atribut kelengkapan Pantarlih dalam bertugas oleh Penjabat Kelurahan.

2. Bimbingan Teknis Pantarlih dilakukan di Lokasi di Kelurahan Wilayah kerja masing – masing, dilakukan setelah Pelantikan.

Foto Pelantikan Pantarlih

Pelantikan Pantarlih

Penyematan Simbolis Atribut Kelengkapan Pantarlih

PEMBENTUKAN KPPS

Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS	11 Desember 2023	15 Desember 2023
2.	penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS	11 Desember 2023	20 Desember 2023
3.	penelitian administrasi calon anggota KPPS	11 Desember 2023	22 Desember 2023
4.	Pengumuman hasil Penelitian administrasi calon anggota KPPS	23 Desember 2023	25 Desember 2023
5.	tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS	23 Desember 2023	28 Desember 2023
6.	pengumuman hasil seleksi	29 Desember 2023	30 Desember 2023
7.	penetapan anggota KPPS	24 Januari 2024	24 Januari 2024
8.	pelantikan anggota KPPS	25 Januari 2024	25 Januari 2024

Jumlah KPPS yang dibutuhkan adalah 61.684 se-Kota Jakarta Timur dengan jumlah TPS 8812 se-Kota Jakarta Timur.

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS KESELURUHAN	JUMLAH KPPS KESELURUHAN
1	MATRAMAN	6	517	3619
2	PULOGADUNG	7	830	5810
3	JATINEGARA	8	906	6342
4	KRAMATJATI	7	848	5936
5	PASAR REBO	5	620	4340
6	CAKUNG	7	1591	11137
7	DUREN SAWIT	7	1246	8722
8	MAKASAR	5	588	4116
9	CIRACAS	5	863	6041
10	CIPAYUNG	8	803	5621
TOTAL		65	8812	61684

Pelaksanaan Perekrutan KPPS

Pelaksanaan Perekrutan KPPS di lakukan di Kelurahan – kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pengumuman seleksi Calon KPPS dimulai dari tanggal 11 Desember sampai dengan 15 Desember 2023 melalu

- media sosial ,
pengumuman yang
dipasang di Kantor
Kelurahan;
- b. Penerimaan Pendaftaran
Calon KPPS untuk
Pemilihan Umum Tahun
2024 dilaksanakan pada
tanggal 11 Desember
2024 sampai dengan 20
Desember 2024 di
Kantor Kelurahan;
- c. Penelitian Administrasi
Calon KPPS dimulai
tanggal 11 Desember
2024 sampai dengan
22 Desember 2024 di
Kantor Kelurahan;
- d. Pengumuman hasil
Penelitian Administrasi
dimulai tanggal 23
Desember sampai
dengan 25 Desember di
Medos dan Kantor
Kelurahan;
- e. Tanggapan dan masukan
Masyarakat terhadap
calon KPPS dibuka dari
tanggal 23 Desember
2024 sampai dengan 28
Desember 2024;
- f. Pengumuman hasil
seleksi calon anggota
KPPS dimulai dari
tanggal 29
Desember 2023 sampai
dengan 30 Desember
2023;
- g. Penetapan anggota KPPS
terpilih tanggal 24
Januari 2024;
- h. Pelantikan anggota
KPPS terpilih dilakukan
tanggal 25 Januari 2024.

Pelaksanaan Pelantikan KPPS

Pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Kota Jakarta Timur dilakukan serentak di tanggal 25 Januari 2024 Pukul 09.00 WIB dengan memakai pakaian batik. Dan untuk tempat Pelantikan dilakukan berbeda tempat, khusus Kecamatan Ciracas dilakukan di Hotel Grand Paragon dengan tiga Kelurahan Cibubur, Ciracas

dan Kelapa Dua Wetan, sedangkan Kelurahan Rambutan dan Susukan dilakukan di eL Hotel Jakarta, Sekaligus didua tempat itu dilakukan Bimtek.

Untuk Kelurahan di Kecamatan lain ada yang dilakukan di Kantor Kelurahan, RPTRA dan lapangan terbuka, sehabis pelantikan juga dilakukan penanaman pohon serentak.

Bimbingan Teknis

Bimbingan Teknis bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dilakukan dari tanggal 25 Januari 2025 sampai dengan 4 Febuari 2024, dilakukan di aula Kantor Kelurahan dengan beberapa sesi, khusus Kecamatan Ciracas dilakukan setelah pelantikan.

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PENERIMAAN DAN PENCERMATAN DATA PEMILIH HASIL SINKRONISASI DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILU (DP4) DAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB)

Tahapan awal dari pemutakhiran data pemilih adalah melakukan pencermatan data hasil sinkronisasi antara DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) dan DPB (Data Pemilih Berkelanjutan). Setelah menerima Data Pemilih Hasil Sinkronisasi dari KPU RI, maka KPU Provinsi bersama KPU Kabupaten/Kota se DKI Jakarta melaksanakan Rapat Koordinasi di Kantor KPU Provinsi DKI pada tanggal 9 Januari 2023 dalam rangka pencermatan data pemilih hasil sinkronisasi, pemetaan TPS dan persiapan menuju tahapan coklit.

Dalam kegiatan rapat tersebut KPU Kabupaten/Kota diminta untuk melakukan pencermatan data hasil sinkronisasi dari tanggal 12-15 Januari 2023. Pencermatan yang dilakukan adalah merekap jumlah kepala keluarga dan jumlah pemilih dari masing-masing kelurahan di tiap kecamatan baik laki-laki dan perempuan, mengelompokkan pemilih berdasarkan usia, status, dan lain-lain kemudian melakukan pengecekan kelengkapan elemen data.

Foto Rapat Koordinasi Pencermatan data Hasil Sinkronisasi

Dari hasil pencermatan data hasil sinkronisasi tersebut terdapat jumlah pemilih di Kota Jakarta Timur sebanyak 2.398.701 orang, dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.179.612 orang dan jumlah perempuan sebanyak 1.219.089 orang. Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.053.111 kepala keluarga. Jumlah pemilih pemula yang berumur 17 tahun pada tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 64.544 orang. Jumlah penyandang disabilitas sebanyak 17.761 orang. Jumlah pemilih yang sudah menikah sebanyak 1.482.285 orang. Jumlah yang belum menikah sebanyak

743.346 orang dan jumlah yang sudah pernah menikah sebanyak 173.070 orang.

Namun masih terdapat permasalahan terkait kelengkapan elemen data, diantaranya yaitu terdapat sekitar 6.424 data pemilih yang tidak memiliki RT/RW (0), ini menyebabkan permasalahan tersendiri ketika tahapan pencocokan dan penelitian nanti. Untuk mengatasi permasalahan tersebut KPU Kota Jakarta Timur berkoordinasi dengan Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Timur guna

meminta kelengkapan elemen data pemilih tersebut.

PEMETAAN TPS REGULER

Setelah PPK dan PPS dibentuk maka tahapan pemutakhiran data pemilih selanjutnya adalah melakukan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) baik regular maupun TPS Lokasi Khusus. Pemetaan TPS

ilakukan guna menentukan jumlah TPS dan jumlah Pantarlih, hal ini sangat dibutuhkan untuk dasar penghitungan kebutuhan anggaran honor dan anggaran pengadaan logistik dan sebagai bahan pencocokan dan penelitian. Pemetaan TPS dilakukan dari tanggal 15 Januari sd. 7 Februari 2023.

membentuk TPS Berdasarkan PKPU nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi data Pemilih, maksimal 300 orang dengan ketentuan :

Tidak menggabungkan kelurahan/desa atau nama lain

Kemudahan pemilih menuju ke TPS, dengan mempertimbangkan Aspek geografis, Aspek disabilitas, Aspek jarak dan waktu tempuh ke TPS.

Tidak memisahkan pemilih dalam satu KK pada TPS yang berbeda

Atas arahan KPU Provinsi DKI pada Rakor penyusunan daftar pemilih pada tanggal 9 Januari 2023, pemetaan TPS diambil sebanyak 270-275 oarang per TPS. Kemudian menindaklanjuti arahan tersebut KPU Kota bersama PPK dan PPS mengadakan rakor pada tanggal 20 Januari 2023 untuk memetakan pemilih ke dalam TPS sebanyak 270-275 orang per TPS. Dari hasil pemetaan awal KPU Kota bersama PPK PPS dengan memetakan 270-275 orang per TPS menghasilkan jumlah TPS sebanyak 9.430 TPS.

Atas arahan KPU RI KPU Kota diminta untuk menyusutkan kembali jumlah TPSnya dikarenakan jumlah TPS terlalu besar dibandingkan Pemilu 2019, akhirnya dipetakan kembali menjadi 290-295 oarang per TPS. Kemudian menindaklanjuti arahan tersebut KPU Kota bersama PPK dan PPS mengadakan rakor pada tanggal 7 Februari 2023 untuk memetakan pemilih ke dalam TPS sebanyak 290-295 orang per TPS.

Dari hasil pemetaan awal KPU Kota bersama PPK PPS dengan memetakan 290-295 orang per TPS menghasilkan jumlah TPS sebanyak 8.773 TPS.

Permasalahan di lapangan ketika PPS melakukan pemetaan TPS adalah :

1. Terdapat Penolakan RW satu dengan RW yang lainnya yang tidak mau digabung di pondok bambu
2. Penolakan warga perumahan yang tidak mau digabung dengan warga lain jgc;
3. Penolakan warga Komplek militer yang tidak mau digabung dengan warga lain.
4. Terdapat lokasi yg geografisnya tidak bisa digabungkan dengan tps lain, di pondok gede Taman Mini

Terhadap masalah-masalah tersebut KPU, PPK, dan PPS melakukan persuasif kepada warga untuk menjelaskan proses pemetaan sesuai ketentuan yang berlaku

PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Tahapan selanjutnya setelah pemetaan TPS adalah kegiatan pencocokan dan penelitian Daftar Pemilih yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran daftar pemilih atau pantarlih yang sudah dilantik. Kegiatan ini adalah kegiatan untuk **memastikan keberadaan pemilih di TPS** yang sudah dipetakan dan juga memastikan kebenaran identitas yang dimiliki pemilih. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 bulan lebih dari tanggal 12 Februari hingga 14 Maret 2023.

Dalam pelaksanaan kegiatan pencocokan dan penelitian daftar pemilih petugas mengalami berbagai macam kendala seperti

1. Kendala di aplikasi, masih banyak pantarlih yg belum bisa mengatasi kendala-kendala di

aplikasi, seperti tidak bisa login, aplikasi sering terpentol keluar sendiri, HP tidak support dan lain sebagainya. Terhadap masalah ini KPU Kota mengarahkan kepada pantarlih-pantarlih yang aplikasinya bermasalah agar dikumpulkan di kelurahan supaya bisa langsung dibereskan dan disupervisi oleh masing-masing PPS dan PPK, KPU Kota melakukan monitoring dan supervisi.

2. Banyak Pantarlih yg bekerja, jadi kegiatan coklit dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu yang menyebabkan progress coklit jadi lambat. Terhadap masalah ini KPU Kota mengarahkan kepada pantarlih-pantarlih yang seperti ini agar

KELURAHAN	PEMILIH AKTIF	TMS	BARU	UBAH
PISANGAN BARU	29.699	293	148	368
UTAN KAYU UTARA	26.059	198	190	538
KAYU MANIS	23.511	205	151	215
PALMERIAM	18.376	205	113	354
KEBON MANGGIS	14.840	144	158	175
UTAN KAYU SELATAN	31.137	251	165	454
PULO GADUNG	31.777	154	170	355
PISANGAN TIMUR	38.046	204	205	352
CIPINANG	35.641	206	187	531
JATINEGARA KAUM	22.864	74	159	223
RAWAMANGUN	34.862	153	234	357
KAYU PUTIH	37.657	119	294	447
JATI	30.190	157	222	413
KAMPUNG MELAYU	23.998	252	112	271
BIDARA CINA	34.003	834	413	561
BALI MESTER	8.864	68	41	120
RAWA BUNGA	19.920	194	139	553
CIPINANG CEMPEDAK	30.171	498	376	480
CIPINANG MUARA	51.152	761	385	626
CIP. BESAR SELATAN	33.062	465	250	1.042
CIP. BESAR UTARA	43.001	380	178	1.014
KRAMATJATI	31.194	291	149	549
TENGAH	40.942	377	237	291
DUKUH	22.843	186	170	270
BATU AMPAR	44.784	291	201	457
BALEKAMBANG	27.434	165	126	183
CILILITAN	37.520	126	218	255
CAWANG	30.389	299	99	175
GEDONG	32.533	334	220	391

KELURAHAN	PEMILIH AKTIF	TMS	BARU	UBAH
BARU	19.430	194	87	183
CIJANTUNG	37.997	536	298	716
KALISARI	39.867	558	407	968
PEKAYON	39.588	663	427	575
JATINEGARA	78.131	570	185	1.161
RAWA TERATE	22.652	406	242	181
PENGGILINGAN	95.406	730	511	881
CAKUNG TIMUR	55.217	386	484	353
PULO GEBANG	92.577	1.158	933	2.062
UJUNG MENTENG	28.180	234	483	432
CAKUNG BARAT	53.490	426	178	350
DUREN SAWIT	57.202	559	327	474
PONDOK BAMBU	57.446	6.090	5.867	363
KLENDER	64.862	433	372	658
PONDOK KELAPA	68.242	772	814	815
MALAKA SARI	25.445	374	269	605

Tabel hasil coklit per Kelurahan

KECAMATAN	PEMILIH AKTIF	TMS	BARU	UBAH
MATRAMAN	143.622	1.296	925	2.104
PULOGADUNG	231.037	1.067	1.471	2.678
JATINEGARA	244.171	3.452	1.894	4.667
KRAMATJATI	235.106	1.735	1.200	2.180
PASAR REBO	169.415	2.285	1.439	2.833
CAKUNG	425.653	3.910	3.016	5.420
DUREN SAWIT	334.854	9.033	8.467	3.751
MAKASAR	161.449	1.384	997	2.250
CIRACAS	235.086	2.122	1.891	4.164
CIPAYUNG	218.308	1.886	1.527	3.387

KECAMATAN	PEMILIH AKTIF	TMS	BARU	UBAH
TOTAL	2.398.701	28.170	22.827	33.434

Tabel hasil coklit per Kecamatan

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN (DPHP)

Tahapan selanjutnya setelah kegiatan pencoklitan adalah tahapan penyusunan Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran atau hasil pencoklitan. Kemudian ada juga data yang diperoleh dari Kemendagri untuk dimasukan atau diupdate ke dalam daftar pemilih. Penyusunan DPHP ini dilakukan oleh PPK dan PPS. Jadwal kegiatan penyusunan DPHP:

1. Penyusunan DPHP oleh PPS dilaksanakan dari tanggal 28 Februari hingga 29 Maret 2023
2. Rekapitulasi DPHP tingkat PPS dilaksanakan dari tanggal 30 hingga 31 Maret 2023;
3. Rekapitulasi DPHP tingkat PPK dilaksanakan dari tanggal 1 hingga 2 April 2023

Foto Rapat Pleno DPHP di PPS Keramat Jati dan PPK Duren Sawit

KELURAHAN	BARU	UBAH	TMS	JUMLAH
PISANGAN BARU	101	369	391	29.409
UTAN KAYU UTARA	145	564	286	25.918
KAYU MANIS	117	239	287	23.336
PALMERIAM	96	356	322	18.143
KEBON MANGGIS	97	285	188	14.751
UTAN KAYU SELATAN	141	551	365	30.914
PULO GADUNG	159	360	307	31.632
PISANGAN TIMUR	110	453	266	37.892
CIPINANG	180	527	319	35.503
JATINEGARA KAUM	121	309	138	22.847
RAWAMANGUN	178	1.490	244	34.796
KAYU PUTIH	261	456	277	37.641
JATI	213	602	229	30.174
KAMPUNG MELAYU	65	273	370	23.693
BIDARA CINA	96	1.074	484	33.616
BALI MESTER	39	120	105	8.798
RAWA BUNGA	126	579	268	19.778
CIPINANG CEMPEDAK	219	726	324	30.063
CIPINANG MUARA	207	888	633	50.726
CIPINANG BESAR SELATAN	134	1.217	442	32.754
CIPINANG BESAR UTARA	9.725	1.049	662	52.223
KRAMATJATI	131	683	393	30.929
TENGAH	200	440	590	40.550
DUKUH	66	13.846	199	22.751
BATU AMPAR	170	581	435	44.519
BALEKAMBANG	93	218	253	27.275
CILILITAN	157	369	243	37.436
CAWANG	124	193	442	30.032
GEDONG	153	443	446	32.240

KELURAHAN	BARU	UBAH	TMS	JUMLAH
BARU	82	182	282	19.230
CIJANTUNG	211	783	645	37.563
KALISARI	259	1.095	476	39.650
PEKAYON	201	804	499	39.291
JATINEGARA	334	943	834	77.416
RAWA TERATE	71	240	391	22.327
PENGGILINGAN	313	1.807	1.047	94.645
CAKUNG TIMUR	226	617	601	54.830
PULO GEBANG	539	3.063	1.090	91.992
UJUNG MENTENG	183	532	303	28.052
CAKUNG BARAT	168	569	674	52.962
DUREN SAWIT	273	94	670	56.807
PONDOK BAMBUI	1.206	6.739	642	58.011
KLENDER	276	781	560	64.579
PONDOK KELAPA	438	1.077	764	68.070
MALAKA SARI	182	864	241	25.388
MALAKA JAYA	383	731	399	28.304
PONDOK KOPI	136	439	330	33.143
MAKASAR	91	597	302	31.864
PINANGRANTI	129	290	318	25.314
KEBON PALA	164	630	508	42.982
HALIM PERDANA KUSUMA	281	277	389	20.722
CIPINANG MELAYU	235	499	379	39.573
CIRACAS	229	13.894	649	60.146
CIBUBUR	283	1.181	607	61.089
KELAPA DUA WETAN	274	1.144	423	43.322
SUSUKAN	247	573	409	35.202
RAMBUTAN	162	608	338	34.095
CIPAYUNG	329	793	275	24.565

KELURAHAN	BARU	UBAH	TMS	JUMLAH
CILANGKAP	119	309	264	25.785
PONDOK RANGGON	139	725	277	24.081
MUNJUL	101	625	229	22.146
SETU	137	369	182	19.335
BAMBU APUS	158	431	237	24.725
LUBANG BUAYA	216	574	638	59.103
CEGER	60	285	168	17.564
TOTAL	22.459	74.424	26.948	2.394.212

Tabel DPHP per Kelurahan:

KECAMATAN	BARU	UBAH	TMS	JUMLAH
MATRAMAN	697	2.364	1.839	142.471
PULOGADUNG	1.222	4.197	1.780	230.485
JATINEGARA	10.611	5.926	3.288	251.651
KRAMATJATI	941	16.330	2.555	233.492
PASAR REBO	906	3.307	2.348	167.974
CAKUNG	1.834	7.771	4.940	422.224
DUREN SAWIT	2.894	10.725	3.606	334.302
MAKASAR	900	2.293	1.896	160.455
CIRACAS	1.195	17.400	2.426	233.854
CIPAYUNG	1.259	4.111	2.270	217.304
TOTAL	22.459	74.424	26.948	2.394.212

Tabel DPHP per Kecamatan

PEMBENTUKAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LOKASI KHUSUS

Sebelum menetapkan Daftar Pemilih Sementara, KPU Kota Jakarta Timur melakukan penyusunan TPS Lokasi Khusus. TPS Lokasi khusus adalah TPS yang didirikan di lokasi khusus untuk melayani pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada hari pemungutan suara sehingga akan menggunakan haknya di lokasi khusus dalam kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan

lokasi khusus, yang meliputi:

- a) rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
- b) panti sosial atau panti rehabilitasi;
- c) relokasi bencana;
- d) daerah konflik; pertambangan dan/atau perkebunan

Syarat TPS Khusus

- 1) Terdapat Pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP-el;
- 2) Pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat; dan
- 3) jumlah Pemilih dapat dibentuk

Pada tanggal 9 Maret 2023 KPU Kota Jakarta Timur menyampaikan surat kepada 90 Lokasi Khusus perihal penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus yang berada di Jakarta Timur. Di surat itu berisikan persyaratan - persyaratan atau

ketentuan sesuai PKPU yang harus dipenuhi jika lokasinya ingin dijadikan TPS lokasi khusus.

Permasalahan yang dihadapi ketika penyusunan daftar pemilih lokasi khusus adalah:

1. Elemen data pemilih yang

disampaikan pengelola / penanggung jawab tidak lengkap

2. Pengelola tidak bisa menjamin bahwa pemilih yang berada di lokasinya akan tetap tinggal sampai hari H, terutama pada rumah sakit, sekolah, pesantren, apartemen dll.

Sehingga terhadap data-data tersebut tidak bisa dijadikan daftar pemilih pada TPS Lokasi Khusus Namun dari sekian banyak lokasi yang bisa memenuhi syarat dibentuknya TPS lokasi khusus hanya 7 lokasi yang memenuhi syarat dibentuknya lokasi khusus.

Diantaranya adalah:

1. Lapas Kelas 1 Cipinang;
2. Lapas Kelas 2 Narkotika Cipinang;
3. Rutan Kelas 1 Cipinang;
4. Lapas Perempuan Pondok

Bambu

5. Rutan Kelas 1 Pondok Bambu
6. Apartemen Bassura City
7. Sedayu City Residence

REKAP TPS LOKASI KHUSUS KOTA JAKARTA TIMUR

No.	KEMANTAN	DEWILAYAH/DESA	KAWASAN/DESA KHUSUS	NAMA DEWILAYAH KHUSUS	JUMLAH KALAHAR		JUMLAH PEMILIH		JUMLAH TPS	JUMLAH TPS
					L	#	SIKAS KHUSUS	SIKAS KHUSUS		
1.	JATINEGARA	DEWILAYAH/DESA	DESA/DEWILAYAH / LAPAS	Lapas Kelas 1 Cipinang	5.776	8	5.776	13	181	142
2.	JATINEGARA	DEWILAYAH/DESA	DESA/DEWILAYAH / LAPAS	Lapas Kelas 2 Narkotika Cipinang	3.122	8	3.122	11	163	152
4.	JATINEGARA	DEWILAYAH/DESA	DESA/DEWILAYAH / LAPAS	Rutan Kelas 1 Cipinang	3.983	15	3.983	13	124	111
4.	KEPONDOKHARJUMAHEN	DEWILAYAH/DESA	DESA/DEWILAYAH / LAPAS	Lapas Perempuan KALAS 21 Pondok Bambu	5	277	282	1	1	1
5.	KEPONDOKHARJUMAHEN	DEWILAYAH/DESA	DESA/DEWILAYAH / LAPAS	Rutan Kelas 1 Pondok Bambu	3	528	531	1	1	1
6.	KALIBING	DESA/DEWILAYAH/DESA	DESA/DEWILAYAH / LAPAS	SENIHATI 0111 Blok 10 Gading	189	108	297	1	1	1
7.	JATINEGARA	DEWILAYAH/DESA	DESA/DEWILAYAH / LAPAS	Apartment BASSURA	107	348	455	1	1	1
Total					9.297	1.288	10.585	41	181	142

PENETAPAN DPS

Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah Daftar Pemilih hasil kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarlih.

Permasalahan ketika penyusunan DPS adalah masih banyak terdapat daftar pemilih yang ganda. Hal ini disebabkan Karena banyak perpindahan pemilih. Contohnya

orang yang sudah pindah ke kota lain namun daftar pemilihnya masih berada di tempat asal.

Untuk mengatasi hal tersebut sebelum menetapkan Daftar Pemilih Sementara. KPU Kota Jakarta Timur melakukan analisa kegandaan bersama PPK dan PPS.

Baik ganda antar kelurahan, kecamatan, Kota dan antar Provinsi agar daftar pemilih menjadi clear dan clean.

Pada tanggal 5 April 2023 KPU Kota Jakarta Timur melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Kota Jakarta Timur di Hotel Fieris. Rapat ini dihadiri oleh

1. PPK;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Forkopimda;
4. Pemantau Pemilihan; dan/atau
5. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota dan Partai Politik

Foto rapat pleno DPS Kota Jakarta Timur

No	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	Pemilih Aktif	Pemilih Baru	Pemilih TMS	Perbaikan Data Pemilih	Pemilih Potensial Non KTP-el
1	MATRAMAN	6	517	142.471	697	1.839	2.364	259
2	PULOGADUNG	7	830	230.485	1.222	1.780	4.197	481
3	JATINEGARA	8	903	251.651	10.611	3.288	5.926	1.254
4	KRAMATJATI	7	848	233.492	941	2.555	16.330	276
5	PASAR REBO	5	620	167.974	906	2.348	3.307	481
6	CAKUNG	7	1.589	422.224	1.631	5.083	7.771	1.352
7	DUREN SAWIT	7	1.246	334.302	2.894	3.606	10.725	677
8	MAKASAR	5	588	160.455	900	1.896	2.293	366
9	CIRACAS	5	863	233.854	1.195	2.426	17.400	713
10	CIPAYUNG	8	803	217.304	1.259	2.270	4.111	757

MASA TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Setelah DPS diumumkan di stakeholder dalam rangka Kelurahan, maka PPS menerima perbaikan daftar Pemilih pasca Tangmas dari masyarakat atau penetapan DPS. Perbaikan tersebut

meliputi perbaikan Data, pencoretan bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat (meninggal, menjadi TNI/Polri, Pindah keluar dsb), serta Pemilih Baru. Pada masa ini PPS Kota Jakarta Timur membuka Posko-posko Pelayanan Tangmas Daftar

Pemilih di setiap Kantor Kelurahan, Kampus, Apartemen, Rusunawa, Pasar, dan tempat umum lainnya untuk menerima masukan-masukan dari masyarakat.

Jadwal Kegiatan Tangmas dari tanggal 12 April hingga 2 Mei 2023

Foto kegiatan tangmas DPS di Kecamatan Makasar

PENYUSUNAN DPSHP

Tahapan selanjutnya setelah masa Tangmas adalah Kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

DPSHP adalah DPS yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau peserta Pemilihan.

ALUR DPSHP

Alur Penyusunan DPSHP Pemilu Tahun 2024

Foto Rapat Pleno Kelurahan Malaka Jaya

KELURAHAN	DPS	BARU	UBAH	TMS	JUMLAH
PISANGAN BARU	29.409	12	1	47	29.374
UTAN KAYU UTARA	25.918	11	0	93	25.836
KAYU MANIS	23.336	1	3	53	23.284
PALMERIAM	18.143	2	12	57	18.088
KEBON MANGGIS	14.751	3	17	42	14.712
UTAN KAYU SELATAN	30.914	6	1	75	30.845
PULO GADUNG	31.632	3	0	85	31.550
PISANGAN TIMUR	37.892	2	2	48	37.846
CIPINANG	35.503	5	1	78	35.430
JATINEGARA KAUM	22.847	0	0	50	22.797
RAWAMANGUN	34.796	3	0	104	34.695
KAYU PUTIH	37.641	12	1	139	37.514
JATI	30.174	4	0	115	30.063
KAMPUNG MELAYU	23.693	0	20	53	23.640
BIDARA CINA	33.616	16	2.975	60	33.572
BALI MESTER	8.798	3	1	21	8.780
RAWA BUNGA	19.778	0	1.647	51	19.727
CIPINANG CEMPEDAK	30.063	2	37	126	29.939
CIPINANG MUARA	50.726	6	18.698	58	50.674
CIPINANG BESAR SELATAN	32.754	0	11	109	32.645
CIPINANG BESAR UTARA	52.223	44	16	1.087	51.180
KRAMATJATI	30.929	0	15.172	36	30.893
TENGAH	40.550	4	19	79	40.475
DUKUH	22.751	17	3.773	59	22.709

KELURAHAN	DPS	BARU	UBAH	TMS	JUMLAH
BATU AMPAR	44.519	4	5	89	44.434
BALEKAMBANG	27.275	0	0	50	27.225
CILILITAN	37.436	0	7	87	37.349
CAWANG	30.032	6	4	70	29.968
GEDONG	32.240	62	11.954	62	32.240
BARU	19.230	2	2	27	19.205
CIJANTUNG	37.563	0	119	111	37.452
KALISARI	39.650	2	0	107	39.545
PEKAYON	39.291	1	36.159	6	39.286
JATINEGARA	77.416	0	67	155	77.261
RAWA TERATE	22.327	14	200	8	22.333
PENGGILINGAN	94.645	19	102	183	94.481
CAKUNG TIMUR	54.830	1	6.594	111	54.720
PULO GEBANG	91.992	30	2.490	258	91.764
UJUNG MENTENG	28.052	21	163	81	27.992
CAKUNG BARAT	52.962	0	25	132	52.830
DUREN SAWIT	56.807	9	64	190	56.626
PONDOK BAMBU	58.011	24	221	374	57.661
KLENDER	64.579	5	92	119	64.465
PONDOK KELAPA	68.070	30	392	335	67.765
MALAKA SARI	25.388	2	23	117	25.273
MALAKA JAYA	28.304	13	103	115	28.202
PONDOK KOPI	33.143	5	77	130	33.018
MAKASAR	31.864	1	0	67	31.798
PINANGRANTI	25.314	0	2	62	25.252
KEBON PALA	42.982	0	0	91	42.891
HALIM PERDANA KUSUMA	20.722	4	7	60	20.666
CIPINANG MELAYU	39.573	1	30	111	39.463

KELURAHAN	DPS	BARU	UBAH	TMS	JUMLAH
CIRACAS	60.146	2	34	146	60.002
CIBUBUR	61.089	2	32	141	60.950
KELAPA DUA WETAN	43.322	9	15	134	43.197
SUSUKAN	35.202	25	15	112	35.115
RAMBUTAN	34.095	1	33	104	33.992
CIPAYUNG	24.565	7	3	75	24.497
CILANGKAP	25.785	1	7	57	25.729
PONDOK RANGGON	24.081	2	15	41	24.042
MUNJUL	22.146	18	13	55	22.109
SETU	19.335	0	12	69	19.266
BAMBU APUS	24.725	8	10	73	24.660
LUBANG BUAYA	59.103	3	11	114	58.992
CEGER	17.564	3	21	41	17.526
TOTAL	2.394.21 2	493	101.530	7.195	2.387.510

Tabel DPSHP tingkat Kelurahan

KECAMATAN	DPS	BARU	UBAH	TMS	JUMLAH
MATRAMAN	142.471	35	34	367	142.139
PULOGADUNG	230.485	29	4	619	229.895
JATINEGARA	251.651	71	23.405	1.565	250.157
KRAMATJATI	233.492	31	18.980	470	233.053
PASAR REBO	167.974	67	48.234	313	167.728
CAKUNG	422.224	85	9.641	928	421.381
DUREN SAWIT	334.302	88	972	1.380	333.010
MAKASAR	160.455	6	39	391	160.070
CIRACAS	233.854	39	129	637	233.256

KECAMATAN	DPS	BARU	UBAH	TMS	JUMLAH
CIPAYUNG	217.304	42	92	525	216.821
TOTAL	2.394.212	493	101.530	7.195	2.387.510

Tabel DPSHP tingkat Kecamatan

No	Nama Kec	Jumlah Kel/Des	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el
1	MATRAMAN	6	517	142.139	35	367	34	259
2	PULOGADUNG	7	830	229.895	29	619	4	481
3	JATINEGARA	8	903	250.157	71	1.565	23.405	1.254
4	KRAMATJATI	7	848	233.053	31	470	18.980	276
5	PASAR REBO	5	620	167.728	67	313	48.234	481
6	CAKUNG	7	1.589	421.381	85	928	9.641	1,352
7	DUREN SAWIT	7	1.246	333.010	88	1.380	972	677
8	MAKASAR	5	588	160.070	6	391	39	366
9	CIRACAS	5	863	233.256	39	637	129	713
10	CIPAYUNG	8	803	216.821	42	525	92	757
TOTAL		65	8.807	2.387.510	493	7.195	101.530	6.616

Tabel DPSHP tingkat Kota

Foto kegiatan Pleno Penetapan DPHP tingkat Kota di Hotel Fave PGC Cililitan

Tahapan selanjutnya setelah DPSHP adalah Kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir yang selanjutnya disingkat DPSHP Akhir.

DPSHP Akhir adalah DPSHP yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau peserta Pemilihan yang disusun ditingkat PPS dan PPK.

ALUR DPSHP Akhir dan Penetapan DPT

Alur Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan DPT
Pemilu Tahun 2024

Tahapan selanjutnya setelah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir adalah kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Tetap. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya

disingkat DPT adalah DPS yang telah diperbaiki dan direkapitulasi oleh PPS dan PPK yang selanjutnya ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pada tanggal 21 Juni 2023 KPU Kota Jakarta Timur melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Kota Jakarta Timur di Hotel Sentral Cawang. Rapat ini dihadiri oleh

- a. PPK;
- b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Forkopimda;
- d. Pemantau Pemilihan; dan/atau tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota dan partai politik.

KELURAHAN	DPS	BARU	UBAH	TMS	JUMLAH
PISANGAN BARU	29.374	14	4	106	29.282
UTAN KAYU UTARA	25.836	22	0	96	25.762
KAYU MANIS	23.284	6	2	78	23.212
PALMERIAM	18.088	16	2	51	18.053
KEBON MANGGIS	14.712	22	33	61	14.673
UTAN KAYU SELATAN	30.845	39	71	105	30.779
PULO GADUNG	31.550	12	2	80	31.482
PISANGAN TIMUR	37.846	31	3	131	37.746
CIPINANG	35.430	11	8	107	35.334
JATINEGARA KAUM	22.797	4	0	68	22.733
RAWAMANGUN	34.695	4	1	104	34.595
KAYU PUTIH	37.514	14	577	112	37.416
JATI	30.063	17	36	112	29.968
KAMPUNG MELAYU	23.640	10	2	46	23.604
BIDARA CINA	33.572	11	11	123	33.460

KELURAHAN	DPS	BARU	UBAH	TMS	JUMLAH
BALI MESTER	8.780	3	0	30	8.753
RAWA BUNGA	19.727	5	2	59	19.673
CIPINANG CEMPEDAK	29.939	18	10	78	29.879
CIPINANG MUARA	50.674	10	9	169	50.515
CIPINANG BESAR SELATAN	32.645	608	64	70	33.183
CIPINANG BESAR UTARA	51.180	196	109	225	51.151
KRAMATJATI	30.893	16	987	79	30.830
TENGAH	40.475	18	14	39	40.454
DUKUH	22.709	26	20	48	22.687
BATU AMPAR	44.434	11	1	97	44.348
BALEKAMBANG	27.225	3	0	26	27.202
CILILITAN	37.349	11	6	100	37.260
CAWANG	29.968	18	0	55	29.931
GEDONG	32.240	21	7	109	32.152
BARU	19.205	15	0	76	19.144
CIJANTUNG	37.452	17	3	83	37.386
KALISARI	39.545	25	7	110	39.460
PEKAYON	39.286	25	23	122	39.189
JATINEGARA	77.261	212	3.015	284	77.189
RAWA TERATE	22.333	464	22.087	109	22.688
PENGGILINGAN	94.481	49	2.143	270	94.260
CAKUNG TIMUR	54.720	33	995	169	54.584
PULO GEBANG	91.764	68	34	225	91.607
UJUNG MENTENG	27.992	37	31	63	27.966
CAKUNG BARAT	52.830	12	5	121	52.721
DUREN SAWIT	56.626	41	21	124	56.543
PONDOK BAMBU	57.661	225	94	204	57.682

KELURAHAN	DPS	BARU	UBAH	TMS	JUMLAH
KLENDER	64.465	36	11	186	64.315
PONDOK KELAPA	67.765	82	133	226	67.621
MALAKA SARI	25.273	20	9	105	25.188
MALAKA JAYA	28.202	23	23	87	28.138
PONDOK KOPI	33.018	27	10	71	32.974
MAKASAR	31.798	7	2	73	31.732
PINANGRANTI	25.252	11	0	80	25.183
KEBON PALA	42.891	12	0	106	42.797
HALIM PERDANA KUSUMA	20.666	125	17	68	20.723
CIPINANG MELAYU	39.463	39	8	92	39.410
CIRACAS	60.002	42	294	162	59.882
CIBUBUR	60.950	41	6	140	60.851
KELAPA DUA WETAN	43.197	29	11	83	43.143
SUSUKAN	35.115	16	52	101	35.030
RAMBUTAN	33.992	8	3	45	33.955
CIPAYUNG	24.497	56	4	54	24.499
CILANGKAP	25.729	19	4	54	25.694
PONDOK RANGGON	24.042	5	4	54	23.993
MUNJUL	22.109	26	6	47	22.088
SETU	19.266	6	2	47	19.225
BAMBU APUS	24.660	37	5	52	24.645
LUBANG BUAYA	58.992	19	3	154	58.857
CEGER	17.526	24	9	57	17.493
TOTAL	2.387.510	3.130	31.055	6.668	2.383.972

Tabel DPSHP Akhir Tingkat Kelurahan

KECAMATAN	DPS	BARU	UBAH	TMS	JUMLAH
MATRAMAN	142.139	119	112	497	141.761

PULOGADUNG	229.895	93	627	714	229.274
JATINEGARA	250.157	861	207	800	250.218
KRAMATJATI	233.053	103	1.028	444	232.712
PASAR REBO	167.728	103	40	500	167.331
CAKUNG	421.381	875	28.310	1.241	421.015
DUREN SAWIT	333.010	454	301	1.003	332.461
MAKASAR	160.070	194	27	419	159.845
CIRACAS	233.256	136	366	531	232.861
CIPAYUNG	216.821	192	37	519	216.494
TOTAL	2.387.510	3.130	31.055	6.668	2.383.972

Tabel DPSHP Akhir tingkat Kecamatan

No	Nama Kec	Jumlah Kel/De sa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenu hi Syarat	Jumlah Perbaik an Data Pemilih	Jum lah Pemili h Potens ial Non KTP- el
1	MATRAMAN	6	517	141.761	119	497	112	255
2	PULOGADUNG	7	830	229.274	93	714	627	340
3	JATINEGARA	8	906	250.218	861	800	207	1242
4	KRAMATJATI	7	848	232.712	103	444	1.028	275
5	PASAR REBO	5	620	167.331	103	500	40	476
6	CAKUNG	7	1.591	421.015	875	1.241	28.310	1207
7	DUREN SAWIT	7	1.246	332.461	454	1.003	301	778
8	MAKASAR	5	588	159.845	194	419	27	359
9	CIRACAS	5	863	232.861	136	531	366	706
10	CIPAYUNG	8	803	216.494	192	519	37	745
TOTAL		65	8.812	2.383.972	3.130	6.668	31.055	6.383

Tabel DPT Kota Jakarta Timur

PENYUSUNAN PINDAH MEMILIH

Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disebut DPTb, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, namun karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.

Jadwal Kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan dimulai dari tanggal 22 Juni 2023 hingga 7 Februari 2024. PPK dan PPS membuka Posko-posko pelayanan Pindah Memilih bagi pemilih yang memenuhi persyaratan pindah memilih. Persyaratan Pindah memilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ada 9 Kategori :

- a. menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
- b. menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
- c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
- d. menjalani rehabilitasi narkoba;
- e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
- f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
- g. pindah domisili;
- h. tertimpa bencana alam;
- i. bekerja di luar domisilinya; dan/atau keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Foto Posko Pindah memilih di PPK Makasar

No	Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk				
		Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan		
				L	P	L+P
1	MATRAMAN	6	393	831	997	1.828
2	PULOGADUNG	7	637	1.520	2.045	3.565
3	JATINEGARA	8	620	5.297	2.634	7.931
4	KRAMATJATI	7	529	920	1.291	2.211
5	PASAR REBO	5	396	799	780	1.579
6	CAKUNG	7	775	1.526	1.696	3.222
7	DUREN SAWIT	7	803	1.490	2.338	3.828
8	MAKASAR	5	371	636	811	1.447
9	CIRACAS	5	451	617	633	1.250
10	CIPAYUNG	8	536	965	1.322	2.287
TOTAL		65	5.511	14.601	14.547	29.148

Tabel rekap DPTbMasuk

No	Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Keluar				
		Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan		
				L	P	L+P
1	MATRAMAN	6	479	980	960	1.940
2	PULOGADUNG	7	755	1.621	1.572	3.193
3	JATINEGARA	8	804	2.605	1.423	4.028
4	KRAMATJATI	7	789	1.631	1.443	3.074
5	PASAR REBO	5	575	1.286	1.201	2.487
6	CAKUNG	7	1.362	2.580	2.383	4.963
7	DUREN SAWIT	7	1.141	2.474	2.523	4.997
8	MAKASAR	5	545	1.058	1.054	2.112
9	CIRACAS	5	770	1.426	1.262	2.688
10	CIPAYUNG	8	714	1.379	1.227	2.606
TOTAL		65	7.934	17.040	15.048	32.088

Tabel rekap DPTb Keluar

SIDALIH DAN DPT ONLINE

Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) adalah aplikasi dan sistem informasi berbasis elektronik yang dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Ini adalah tulang punggung pengelolaan data pemilih di seluruh Indonesia untuk Pemilu dan Pilkada

Manfaat penggunaan Sidalih

Daftar Pemilih yang Akurat dan Valid

Meminimalkan kesalahan data, kegandaan, dan pemilih yang tidak memenuhi syarat, sehingga DPT menjadi daftar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyelenggaraan Pemilu yang Berintegritas

Data pemilih yang akurat adalah fondasi penting untuk pemilu yang jujur dan adil.

Kemudahan Akses Informasi

Masyarakat dapat dengan mudah mengecek status pendaftaran pemilih dan lokasi TPS mereka secara online.

Peningkatan Efisiensi

Proses pendataan dan pemutakhiran data pemilih menjadi lebih cepat dan efisien dibandingkan metode manual.

Partisipasi Publik

Sidalih memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi dan memverifikasi data pemilih, meningkatkan kepercayaan terhadap proses pemilu.

Sidalih dirancang untuk mendukung berbagai tahapan pengelolaan data pemilih, mulai dari pendataan awal hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Berikut adalah fungsi dan tujuannya

- **Pengelolaan Data Pemilih yang Komprehensif:** Sidalih memungkinkan KPU mengelola data pemilih secara menyeluruh, mulai dari data mentah dari pemerintah (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu/DP4) hingga menjadi DPT yang final.
- **Pemutakhiran Data Berkelanjutan:** Salah satu fungsi krusial Sidalih adalah memelihara dan memutakhirkan data pemilih secara terus-menerus. Ini mencakup penambahan pemilih baru, penghapusan data pemilih yang meninggal dunia atau pindah, serta perbaikan data yang tidak akurat. Tujuannya adalah menghasilkan DPT yang mutakhir dan akurat.
- **Deteksi Data Ganda:** Sidalih memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan menghilangkan data pemilih ganda, baik di tingkat lokal maupun nasional, sehingga DPT menjadi lebih bersih dan valid.
- **Transparansi dan Aksesibilitas:** Sidalih meningkatkan transparansi proses pemilu. Data pemilih dapat diakses oleh publik melalui situs web KPU (seperti cekdptonline.kpu.go.id), memungkinkan masyarakat untuk memverifikasi status pendaftaran mereka dan memastikan hak pilihnya.

- **Koordinasi dan Efisiensi:** Sistem ini memfasilitasi koordinasi data antar jenjang KPU (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga Panitia Pemungutan Suara/PPS), memastikan data yang konsisten dan terintegrasi. Hal ini juga meningkatkan efisiensi kerja petugas dalam mengolah data pemilih.
- **Perekaman dan Perlindungan Data:** Seluruh data pemilih yang masuk ke dalam Sidalih terekam dan dilindungi, menjaga integritas dan keamanan informasi pribadi pemilih

Dalam tahapan pemutakhiran Data pemilih pemilih dapat melakukan pengecekan apakah nama pemilih sudah terdaftar atau belum dengan menggunakan portal DPT Online KPU portal tersebut adalah layanan yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memungkinkan masyarakat mengecek status pendaftaran mereka sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara daring. Layanan ini bertujuan

untuk memudahkan masyarakat memastikan hak pilih mereka dan mengetahui lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Fungsi DPT Online KPU:

- **Memastikan status pemilih:** Masyarakat dapat mengecek apakah nama mereka sudah terdaftar dalam DPT atau belum.
- **Mengetahui lokasi TPS:** Jika sudah terdaftar, informasi mengenai lokasi TPS tempat

pemilih akan mencoblos juga akan ditampilkan.

- **Meningkatkan transparansi:** Membantu masyarakat berpartisipasi aktif dalam memverifikasi data pemilih.
- **Mempermudah akses informasi:** Memberikan kemudahan akses informasi DPT bagi pemilih, terutama bagi generasi milenial dan Gen Z yang akrab dengan dunia digital.

Cara Cek DPT Online KPU:

Anda dapat mengecek DPT online melalui laman resmi KPU dengan langkah-langkah berikut:

1. **Kunjungi laman resmi KPU:** Buka peramban internet dan akses situs

<https://cekdptonline.kpu.go.id/>.

2. **Masukkan data pencarian:** Akan muncul kolom "Pencarian Data Pemilih". pemilih bisa memasukkan data berupa:
 - **Nomor Induk Kependudukan (NIK)** yang berjumlah 16 digit.
 - Atau, **nama lengkap dan tanggal lahir.** (Beberapa sumber juga menyebutkan opsi memasukkan nomor paspor untuk pemilih luar negeri).
3. **Pastikan data benar:** Periksa kembali seluruh data diri yang dimasukkan untuk memastikan tidak ada kesalahan.
4. **Klik "Pencarian":** Setelah data dimasukkan, klik tombol "Pencarian".

5. Lihat hasilnya:

- o Jika pemilih sudah terdaftar, maka akan muncul nama lengkap, NIK/NKK (dengan sensor), nomor DPT, dan lokasi TPS pemilih (beserta alamat, peta lokasi, dan foto lokasi).
- o Jika data pemilih tidak terdaftar, akan muncul peringatan yang menyatakan "Data yang Anda masukkan keliru/belum terdaftar!".

Apabila nama pemilih tidak terdaftar setelah melakukan

pengecekan online, KPU menghimbau untuk segera menghubungi Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) desa/kelurahan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terdekat atau Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdekat di kabupaten/kota sesuai dengan domisili pemilih. Penyelenggara pemilu akan segera membantu proses agar pemilih terdaftar sebagai pemilih, jika pemilih memang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih.

JENIS-JENIS PEMILIH

1 Siapa pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya?

DPT

Daftar Pemilih Tetap

Penduduk WN yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan telah diverifikasi serta ditetapkan oleh KPU.

DPTb

Daftar Pemilih Tambahan

Pemilih yang terdaftar dalam DPT, namun karena alasan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS tempat pemilih terdaftar.

DPK

Daftar Pemilih Khusus

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai alamat KTP-el selama surat suara masih tersedia.

2 Kapan waktu bagi pemilih untuk datang ke TPS?

DPT

Dapat menggunakan hak pilih mulai pukul 07.00 s.d. 13.00 waktu setempat.

DPTb

Dapat menggunakan hak pilih paling cepat 2 jam sebelum penutupan atau mulai pukul 11.00 s.d. 13.00 waktu setempat.

DPK

Dapat menggunakan hak pilih paling cepat 1 jam sebelum penutupan atau mulai pukul 12.00 s.d. 13.00 waktu setempat.

3 Dokumen apa yang harus dibawa oleh pemilih?

DPT

- KTP Elektronik atau Suket; dan
- Form Model C. Pemberitahuan KPU (dibagikan paling lambat H+3 Pemungutan Suara)

DPTb

- KTP Elektronik atau Suket; dan
- Model A-Surat Pindah Memilih.

DPK

- KTP Elektronik atau Suket.

4 Apa yang dimaksud dengan SUKET?

SUKET atau Surat keterangan pengganti KTP adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai pengganti sementara KTP-el, khususnya saat KTP-el masih dalam proses penerbitan atau jika KTP-el hilang atau rusak. SUKET memiliki kekuatan hukum yang sama dengan KTP-el dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk mengakses layanan publik.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR

BerAKHLAK

bangga
melayani
bangsa

DPT

PEMILIHAN
UMUM 2024

JAKARTA TIMUR
2.383.972

Kecamatan 10
Kelurahan 65

1.174.962
49,02%

1.221.763
50,98%

TPS
8.812

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR

BerAKHLAK

bangga
melayani
bangsa

DPT
PEMILU
2024

2.383.972

Kecamatan 10
Kelurahan 65

TPS
8.812

Berdasarkan GENERASI

Tahun Kelahiran

Gen Z
(1997 - 2012)

MILENIAL
(1996 - 1980)

Gen X
(1980 - 1965)

Baby Boomer
(1964 - 1946)

Pre Boomer
(Sebelum - 1945)

“

Daerah Pemilihan (Dapil) dalam Pemilihan Umum di Indonesia adalah wilayah geografis yang ditetapkan sebagai basis untuk pemilihan anggota lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

“

Adapun Fungsi Utama Daerah Pemilihan:

Arena Kompetisi: Dapil menjadi "arena pertempuran" bagi partai politik dan/atau calon anggota legislatif untuk mendapatkan suara pemilih dan memenangkan kursi yang tersedia di lembaga perwakilan.

Representasi Penduduk: Setiap dapil dialokasikan sejumlah kursi berdasarkan jumlah penduduknya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap wakil rakyat mewakili sejumlah penduduk yang setara, sehingga tercapai prinsip "satu orang satu suara satu nilai".

Memudahkan Pemilih dan

Calon: Pembagian dapil secara geografis membantu mendekatkan pemilih dengan calon yang akan mereka pilih, baik secara geografis, sosiologis, maupun kultural. Ini juga memudahkan calon dalam berkampanye dan berinteraksi dengan konstituennya.

Alokasi Kursi: Jumlah kursi yang diperebutkan di setiap dapil ditetapkan berdasarkan populasi di wilayah tersebut.

Prinsip-prinsip Pembentukan Daerah Pemilihan di Indonesia:

Pembentukan dapil diatur dalam Undang-Undang Pemilu (saat ini UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) dan Peraturan KPU. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pembentukan dapil antara lain:

Kesetaraan Nilai Suara: Setiap suara memiliki nilai yang setara, sehingga alokasi kursi antar dapil diupayakan seimbang berdasarkan jumlah penduduk. Ini untuk menghindari adanya "gerrymandering" (manipulasi batas dapil untuk keuntungan politik tertentu).

Ketaatan pada Sistem Pemilu

Proporsional: Pembentukan dapil harus mendukung sistem pemilu proporsional, yang bertujuan agar persentase kursi yang diperoleh partai politik sebanding dengan persentase suara sah yang didapatkan.

Proporsionalitas: Kesenjangan alokasi kursi antar dapil diupayakan tidak terlalu jauh untuk menjaga keseimbangan.

Integralitas Wilayah: Dapil dibentuk dengan memperhatikan

keutuhan dan keterpaduan wilayah, mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan akses. Misalnya, suatu kabupaten/kota atau kecamatan tidak boleh terpecah ke dalam beberapa dapil yang berbeda (kecuali untuk dapil yang mencakup gabungan wilayah).

Berada dalam Cakupan Wilayah yang Sama: Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota harus seluruhnya tercakup dalam suatu dapil anggota DPRD

Provinsi. Demikian pula dapil DPRD Provinsi harus tercakup dalam dapil DPR RI.

Kohesivitas: Pembentukan dapil mempertimbangkan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas di suatu wilayah.

Kesinambungan: KPU diupayakan memperhatikan dapil yang sudah ada pada pemilu sebelumnya, kecuali jika alokasi kursi melebihi batasan maksimal atau bertentangan dengan prinsip lain.

JAKARTA

100

Infografis 3.13 Dapil dan Alokasi Kursi DPR RI Pemilu 2024 di Provinsi DKI Jakarta

Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Provinsi DKI Jakarta

Dapil DK 1 (Jakarta Pusat) Alokasi Kursi DPRD : 12 Kursi	Dapil DK 6 (Jakarta Timur-C) Alokasi Kursi DPRD : 10 Kursi
Dapil DK 2 (Jakarta Utara-A & Kepulauan Seribu) Alokasi Kursi DPRD : 9 Kursi	Dapil DK 7 (Jakarta Selatan-A) Alokasi Kursi DPRD : 10 Kursi
Dapil DK 3 (Jakarta Utara-B) Alokasi Kursi DPRD : 9 Kursi	Dapil DK 8 (Jakarta Selatan-B) Alokasi Kursi DPRD : 12 Kursi
Dapil DK 4 (Jakarta Timur-A) Alokasi Kursi DPRD : 10 Kursi	Dapil DK 9 (Jakarta Barat-A) Alokasi Kursi DPRD : 12 Kursi
Dapil DK 5 (Jakarta Timur-B) Alokasi Kursi DPRD : 10 Kursi	Dapil DK 10 (Jakarta Barat-B) Alokasi Kursi DPRD : 12 Kursi
Total Alokasi : 106 Kursi	

Infografis 3.14 Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Provinsi DKI Jakarta Pemilu 2024

Daerah Pemilihan	Jumlah Kursi	Kabupaten/Kota	Kecamatan
Dapil DKI 4	10	Jakarta Timur-A	<ul style="list-style-type: none"> • Cakung • Pulo Gadung • Matraman
Dapil DKI 5	10	Jakarta Timur-A	<ul style="list-style-type: none"> • Duren Sawit • Jatinegara • Kramat Jati
Dapil DKI 6	10	Jakarta Timur-C	<ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 50%;">• Makasar <li style="width: 50%;">• Ciracas <li style="width: 50%;">• Cipayung <li style="width: 50%;">• Pasar Rebo

Tabel Daerah Pemilihan Kota Jakarta Timur

PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU TAHUN 2024

PESERTA PEMILU

Pada pemilu tahun 2024 terdapat 18 Partai Politik Nasional dan 6 Partai local Aceh Pemilu ini mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, berikut Partai Peserta Pemilu Tahun 2024 :

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Ketua : Abdul Wadud

Kantor : Jl. Raya Kalimantan Blok E
Jakarta Timur

2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Ketua : Ali Lubis

Kantor : Jl. Utan Kayu Raya No 70 B
Matraman Jakarta Timur

3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

Ketua : Dwi Rio Sambodo

Kantor : Jl. H. Naman No. 3 Pondok Kelapa
Duren Sawit Jakarta Timur

4. Partai Golongan Karya (Golkar)

Ketua : H. Taufik Azhar

Kantor : Jl. P. Komarudin No 27 C Penggilingan
Cakung Jakarta Timur

5. Partai Nasional Demokrat (NasDem)

Ketua : Abdul Cënter Sangaji

Kantor : Wisma Jaya No 8 Rawamangun
Pulogadung Jakarta Timur

6. Partai Buruh

Ketua : Dadang Cahyadi

Kantor : Jl Radjiman Widiyoningrat Jatinegara
Cakung Jakarta Timur

7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)

Ketua : Arief Priambodo

Kantor : Jl Rawa Kuning No 32
Jakarta Timur

8. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

Ketua : Ikkrar Aulia, M.Si

Kantor : Jl. Balai Pustaka No 15 Rawamangun
Pulogadung Jakarta Timur

9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)

Ketua : M. Noval Aldrien

Kantor : Jl. Kejaksaan Blok G Pondok Bambu
Duren Sawit Jakarta Timur

10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Ketua : H. Djafar Badjeber, M.Si

Kantor : Jl. Pisangan Baru 6-11
Jakarta Timur

11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)

Ketua : Sain Djaketra

Kantor : Jl. Bojong Indah No. 27 Pondok Kelapa
Duren Sawit Jakarta Timur

12. Partai Amanat Nasional (PAN)

Ketua : Syahroni

Kantor : Jl. Kali Buaran I Penggilingan
Cakung Jakarta Timur

13. Partai Bulan Bintang (PBB)

Ketua : Erwin Roland Chandra

Kantor : Jl. Malaka Raya No 89 Malaka Sari
Duren Sawit Jakarta Timur

14. Partai Demokrat

Ketua : Muhamad Al Hamid

Kantor : Jl Bambu Apus Raya No 98 Bambu Apus
Cipayung Jakarta Timur

15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Ketua : Nani Dewi Asmara

Kantor : Jl. Raden Inten II No 18
Duren Sawit Jakarta Timur

16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

Ketua : Berman Nainggolan

Kantor : Terusan I gusti Ngurah Rai No 1 Pd. Kopi
Duren Sawit Jakarta Timur

17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Ketua : H.A.Hasanudin Rifa'i, SH

Kantor : Jl. Bekasi Timur Jatinegara
Cakung Jakarta Timur

18. Partai Ummat

Ketua : Wahyu

Kantor : Jl. Cipinang Kebembem IX Pisangan
Timur Pulogadung Jakarta Timur

Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan oleh KPU pada **Rabu, 14 Desember 2022 malam**, di Halaman Gedung KPU, Jakarta. Partai politik yang telah dinyatakan lolos verifikasi sebagai peserta Pemilu 2024 berhak mengikuti pengundian nomor urut. KPU mengadakan rapat pleno terbuka untuk proses pengundian.

Perwakilan dari masing-masing partai politik mengambil nomor undian secara bergiliran. Hasil undian tersebut kemudian ditetapkan sebagai nomor urut resmi partai politik untuk digunakan dalam Pemilu 2024.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR URUT

1

**PARTAI
KEBANGKITAN
BANGSA**

NOMOR URUT

2

**PARTAI
GERAKAN
INDONESIA RAYA**

NOMOR URUT

3

**PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA
PERJUANGAN**

NOMOR URUT

4

**PARTAI
GOLKAR**

NOMOR URUT

5

Partai NasDem
KEADILAN PERJUJANGAN
**PARTAI
NasDem**

NOMOR URUT

6

**PARTAI
BURUH**

NOMOR URUT

7

**PARTAI
GELOMBANG RAKYAT
INDONESIA**

NOMOR URUT

8

PKS
**PARTAI
KEADILAN
SEJAHTERA**

NOMOR URUT

9

**PARTAI
KEBANGKITAN
NUSANTARA**

www.kpu.go.id

[kpu_ri](https://www.instagram.com/kpu_ri)

[KPU_Republik Indonesia](https://www.facebook.com/KPU_RepublikIndonesia)

[@KPU_ID](https://twitter.com/KPU_ID)

[KPU RI](https://www.youtube.com/KPU_RI)

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR URUT

10

**PARTAI
HATI NURANI
RAKYAT**

NOMOR URUT

11

**PARTAI
GARDA REPUBLIK
INDONESIA**

NOMOR URUT

12

**PARTAI
AMANAT
NASIONAL**

NOMOR URUT

13

**PBB
PARTAI
BULAN
BINTANG**

NOMOR URUT

14

**PARTAI
DEMOKRAT**

NOMOR URUT

15

**PARTAI
SOLIDARITAS
INDONESIA**

NOMOR URUT

16

**PARTAI
PERINDO**

NOMOR URUT

17

**PARTAI
PERSATUAN
PEMBANGUNAN**

NOMOR URUT

24

**PARTAI UMMAT
PARTAI UMMAT**

www.kpu.go.id

[kpu_ri](https://www.instagram.com/kpu_ri)

[KPU_Republik Indonesia](https://www.facebook.com/KPU_RepublikIndonesia)

[@KPU_ID](https://twitter.com/KPU_ID)

[KPU RI](https://www.youtube.com/KPU RI)

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PARTAI POLITIK LOKAL ACEH

NOMOR URUT

18

**PARTAI
NANGGROE
ACEH**

NOMOR URUT

19

**PARTAI
GENERASI ATJEH
BEUSABOH THAT'AT
DAN TAQWA**

NOMOR URUT

20

**PARTAI
DARUL ACEH**

NOMOR URUT

21

**PARTAI
ACEH**

NOMOR URUT

22

**PARTAI
ADIL SEJAHTERA
ACEH (PAS Aceh)**

NOMOR URUT

23

**PARTAI
SIRA (SOLIDITAS
INDEPENDEN
RAKYAT ACEH)**

www.kpu.go.id

[kpu_ri](https://www.instagram.com/kpu_ri)

[KPU_Republik Indonesia](https://www.facebook.com/KPU_RepublikIndonesia)

[@KPU_ID](https://twitter.com/KPU_ID)

[KPU RI](https://www.youtube.com/KPU_RI)

Flowchart tahapan Pendaftaran Peserta Pemilu

Tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024

PENCALONAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DPD RI)

“Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga legislatif yang didirikan untuk mewakili kepentingan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia.”

DPD adalah bagian dari sistem bikameral di Indonesia, di mana selain DPR yang mewakili partai politik, DPD berperan membawa aspirasi daerah. DPD dirancang untuk membawa suara daerah ke dalam forum nasional, memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan daerah tidak terabaikan dalam pengambilan keputusan yang berskala nasional. Ini penting, mengingat Indonesia adalah negara dengan karakteristik yang sangat beragam, baik dari segi budaya, geografis, ekonomi, hingga

tingkat pembangunan. Maka, kehadiran DPD membantu mengatasi ketimpangan dan meningkatkan keseimbangan antara pusat dan daerah.

Sejarah DPD bermula dari amandemen UUD 1945, khususnya setelah amandemen besar-besaran sejak 1999 hingga 2002. Sebelumnya, DPD terbentuk, “utusan daerah” merupakan konsep yang berlaku, di mana wakil daerah ditunjuk, bukan dipilih langsung. Namun, utusan daerah tidak memiliki

fungsi legislasi atau pengawasan yang signifikan.

Seiring dengan tuntutan reformasi politik, utusan daerah ini digantikan dengan DPD yang dipilih melalui Pemilu. Sistem ini memungkinkan setiap provinsi memiliki empat wakil yang dipilih langsung oleh

rakyat. Tugas mereka bukan hanya sekadar menyalurkan aspirasi, melainkan juga mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pengelolaan sumber daya, dan perimbangan keuangan.

Struktur DPD RI

Jumlah Anggota

- 136 anggota dari 34 provinsi di Indonesia.
- Setiap provinsi diwakili oleh 4 orang, tanpa memandang jumlah penduduk.

Basis Perwakilan

- Calon independen, bukan dari partai politik.
- Menjaga keseimbangan dan kesetaraan antardaerah, sehingga provinsi kecil memiliki suara yang sama dengan provinsi besar.

Tabel Calon Anggota DPD RI pada Pemilu Tahun 2024

NOMOR	FOTO CALON	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON	NOMOR	FOTO CALON	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
1		ACHMAD AZRAN	L	KOTA JAKARTA TIMUR	14		H. PARDI, S.H.	L	KOTA JAKARTA TIMUR
2		ALWIYAH AHMAD, S.H., M.H.	P	KOTA JAKARTA TIMUR	15		St. RAMSES BUTAR BUTAR, S.H., M.Kn.	L	KOTA JAKARTA BARAT
3		ARDI PUTRA BARAMULI	L	KOTA JAKARTA SELATAN	16		Dr. Hj. RENY HALIDA I. M., S.H., M.H.	P	KOTA JAKARTA SELATAN
4		A. SYAMSUL ZAKARIA, S.H., M.H.	L	KOTA JAKARTA SELATAN	17		SLAMET ABADI, S.E., Ak., CA., CPA.	L	KOTA JAKARTA BARAT
5		CHRISTIANTO SURYOWIBOWO, S.E., M.E.	L	KOTA JAKARTA TIMUR	18		SYAIFUDDIN	L	KOTA JAKARTA PUSAT
6		Prof. Dr. H. DAILAMI FIRDAUS, S.H., LL.M.	L	KOTA JAKARTA TIMUR	19		Hj. SYAMSIDAR SIREGAR, S.I.P.	P	KOTA JAKARTA PUSAT
7		DARMAN SAIDI SIAHAAN, S.H., M.H.	L	KOTA JAKARTA PUSAT	20		H. SYARIEF HIDAYAT-ULLOH, S.E.	L	KOTA JAKARTA SELATAN
8		ENDANG WIDURI	P	KOTA JAKARTA TIMUR	21		SYIFA AWALIA, S.Pd.I., S.E.Sy., M.M.	P	KOTA JAKARTA UTARA
9		FAHIRA IDRIS, S.E., M.H.	P	KOTA JAKARTA SELATAN	22		Prof. Dr. Hj. SYLVIANA MURNI, S.H., M.Si.	P	KOTA JAKARTA TIMUR
10		Hj. HAPPY DJAROT	P	KOTA JAKARTA SELATAN	23		Ir. TENGGU MUHAMMAD NURHAFIDZ	L	KOTA JAKARTA TIMUR
11		ILYAS	L	KOTA JAKARTA SELATAN	24		Dr. dr. ULLA NUCHRAWATY, M.M.	P	KOTA JAKARTA TIMUR
12		H. MADANI B. H. MADALI, S.Sos., M.Si.	L	KOTA JAKARTA SELATAN	25		Dr. (c). ZECKY ANDY ALATAS, S.H., M.H.	L	KOTA JAKARTA TIMUR
13		H. MUSTOPA MURTADO, S.E.	L	KOTA JAKARTA SELATAN					

TAHAP PERSIAPAN

Pelaksanaan Verifikasi Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Jakarta Timur 3 (Tiga) bulan yaitu dari bulan Agustus s/d Oktober 2022. Keluaran dari kegiatan ini adalah ditetapkannya Partai Politik Peserta Pemilu di Tingkat KPU Kota Jakarta Timur.

NO	KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pengumuman Pendaftaran Partai Politik												
2.	Pendaftaran Partai politik												
3.	Verifikasi Administrasi												
4.	Penyampaian Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Bawaslu												

NO	KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Masa Perbaikan Dokumen Persyaratan dan Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaiki oleh Partai Politik												
6.	Verifikasi Administrasi Perbaikan												
7.	Penyampaian dan pengumuman rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan badan												

NO	KEGIATAN	BULAN												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Pengawas Pemilu													
8.	Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan													
9.	Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan kepada partai politik dan Badan Pengawas Pemilu													

NO	KEGIATAN	BULAN												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10.	Masa perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh partai politik													
11.	Verifikasi faktual perbaikan persyaratan dan keanggotaan partai politik													
12.	Penetapan a. Partai Politik Peserta Pemilu Hasil													

NO	KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengumuman nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu												
13.	Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu												

Tabel Jadwal pelaksanaan kegiatan

Tahap Pelaksanaan

Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut diatas, anggota Kelompok Kerja melaksanakan rapat-rapat dan melaksanakan verifikasi melalui aplikasi SIPOL dengan tujuan dapat mengerjakan dengan penuh tanggung jawab. Rapat-rapat yang telah diadakan terkait dengan Verifikasi Persyaratan Partai Politik Calon Peserta

Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Jakarta Timur diantaranya:

- a. Mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta pada

- tanggal 11 Juli 2022
- b. Mengikuti Bimbingan Teknis pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu serta pengenalan fungsi system informasi partai politik (SIPOL) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 23 s.d 25 Juli 2022
 - c. Mengikuti Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Bimbingan Teknis Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Serta Pengenalan SIPOL yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 27 Juli 2022
 - d. Rapat kelompok kerja dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2022 dengan agenda Bimbingan Teknis Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik di lingkungan KPU. Penjelasan dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Jakarta Timur;
 - e. Rapat dengan stakeholder serta Partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 yang dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2022 dengan agenda Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
 - f. Rapat kelompok kerja dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2022 dengan agenda

- Persiapan Pelaksanaan Vermin dan Penyusunan Strategi Pelaksanaan Vermin Tingkat kota Jakarta Timur
- g. Rapat kelompok kerja dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2022 dengan agenda pembentukan Operator Sipol dan Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab serta Bimtek tutorial Vermin yang disampaikan oleh Kasubbag Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat selaku admin aplikasi Sipol
- h. Melaksanakan Pencermatan potensi ganda keanggotaan parpol calon peserta pemilu 2024 didalam aplikasi sipol dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 26 Agustus 2022 oleh seluruh operator Sipol KPU Kota Jakarta Timur
- i. Melaksanakan Verifikasi Administrasi Partai politik Calon Peserta pemilu tahun 2024 didalam aplikasi sipol dilaksanakan pada tanggal 01 s.d 08 September 2022 oleh seluruh operator Sipol KPU Kota Jakarta Timur
- j. Rapat Penyusunan daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pelaksanaan Verifikasi Administrasi serta peningkatan kapasitas SDM masa Vermin perbaikan Kenggotaan Partai Politik Calon Peserta pemilu tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 09 s.d 10 September 2022
- k. Melaksanakan Verifikasi Administrasi Perbaikan Partai politik Calon Peserta pemilu

tahun 2024 didalam aplikasi sipol dilaksanakan pada tanggal 04 s.d 10 Oktober 2022 oleh seluruh operator Sipol KPU Kota Jakarta Timur

l. Mengikuti Bimbingan Teknis Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Parpol Calon Peserta Pemilu 2024 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 12 s.d 14 Oktober 2022

m. Melakukan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 17 s.d 24 Oktober 2022

Seluruh biaya yang diperlukan dalam kegiatan ini dibiayai oleh APBN Bagian Anggaran 076 Tahun

Anggaran 2022 sebesar Rp880.969.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu rupiah), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kota Jakarta Timur Tahun Anggaran 2022

Dalam pelaksanaan kegiatan kelompok kerja pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu terdapat kendala diantaranya:

1. Peraturan diterbitkan terlalu berdekatan dengan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga sosialisasi dan pemahaman peraturan dilakukan secara berberjalan (learning by doing);
2. Ketentuan Peraturan KPU yang mengatur pekerjaan lain yang

- dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan belum dirinci secara jelas sehingga bisa menimbulkan perbedaan penafsiran dan perbedaan perlakuan yang diterapkan di setiap KPU Kab/Kota
3. Status pekerjaan untuk jabatan lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tidak tertuang jelas dalam KTP sehingga bisa berpotensi dinyatakan **MEMENUHI SYARAT** pada saat verifikasi faktual namun faktanya yang bersangkutan **TIDAK MEMENUHI SYARAT** pekerjaan;
 4. Bimbingan Teknis penggunaan SIPOL tidak dalam program yang sebenarnya (dummy) yang tentunya akan berbeda dengan program aslinya, sehingga calon pengguna (operator) kurang persiapan saat praktek penggunaannya;
 5. Program SIPOL dibuat tidak secara full-filter atas dokumen yang di upload partai politik, sehingga peran operator masih sangat dominan dalam meneliti dokumen soft kopi yang telah di upload (seperti teknis manual). Hal ini dapat menyebabkan MATA LELAH karena didepan monitor selama 24 jam;
 6. Feature dalam SIPOL dimunculkan secara bertahap sesuai dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan secara mendadak, sehingga menyulitkan operator dalam memahami teknis penggunaan SIPOL;
 7. Manual operation (petunjuk

- penggunaan) SIPOL di berikan secara bertahap (on the spot) sehingga operator tertinggal mengikuti petunjuk penggunaan terakhir;
8. SIPOL masih ada feature yang tercampur antar tahapan verifikasi factual dengan verifikasi factual perbaikan, sehingga saat melakukan upload BA verfkak perbaikan harus melakukan upload BA Verfak sebelumnya;
 9. Berdasarkan hasil verifikasi factual terdapat:
 - a. KTP yang diperlihatkan bukan merupakan KTP asli;
 - b. Alamat pada KTP tidak sesuai dengan wilayah kecamatan yang dilakukan verifikasi factual;
 - c. Alamat pada Lembar Kerja Verifikasi Faktual tidak lengkap.
 - d. Pada saat video call, tidak bisa terlihat jelas nomor KTP dan foto pada KTP, sehingga tidak bisa menyesuaikan antara dokumen KTP dengan anggota yang dilakukan video call.
10. Sulit mendapatkan bukti berupa akta kematian surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga sulit membuktikan tanggal kematian untuk menentukan apakah waktu meninggalnya masih memenuhi syarat karena waktu meninggal sejak pendaftaran parpol atau tidak memenuhi syarat karena waktu meninggal sebelum pendaftaran parpol. Keterangan anggota yang meninggal hanya berupa

keterangan/informasi dari tetangga anggota ybs atau Ketua RT.

11. Sulit mendapatkan surat keterangan dari saksi tetangga sekitar, apabila anggota tidak dapat ditemui, sehingga surat keterangan dibuat oleh LO parpol

12. Lembar Kerja Hasil Verifikasi Faktual:

- a. Lembar kerja tidak terdapat keterangan nama partai politik sehingga sering tertukar (baru ada saat tahapan verifik perbaikan)
- b. Lembar kerja untuk anggota yang kemudian ditemui melalui video call/teknologi informasi sama dengan kolom hasil verifik door to door sehingga membingungkan verifikator

c. Tidak ada kolom tanggal pelaksanaan verifikasi faktual

Dari berbagai kendala yang dihadapi, tim kelompok kerja ini dapat menyelesaikannya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peraturan harus dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan verifikasi, sehingga calon pengguna dapat mempelajari terlebih dahulu secara mendalam.
2. Harus diberikan rincian pekerjaan dalam peraturan penjelasan
3. Dijelaskan lebih detail di peraturan perundangan yang dibutuhkan dalam persyaratan
4. Sistem harus dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum digunakan sehingga saat dilakukan bimbingan teknis dapat disampaikan secara riil feature yang akan digunakan dalam verifikasi
5. Dibuat filter otomatis BMS apabila ada hasil analisis SIPOL yang terdeteksi sebagai dokumen yang

- belum memenuhi syarat atau perlu di surat pernyataan.
6. System harus dirancang secara berkelanjutan sehingga tidak ada penyesuaian- penyesuaian secara mendadak
 7. Feature yang baru ditambahkan harus segera disusulkan dengan petunjuk penggunaan secara cepat ke pengguna system.
 8. Sebelum disampaikan ke pengguna, System harus direviu lagi sehingga dapat digunakan secara mudah dan terhindar dari kesalahan yang tidak perlu terjadi
 9. Petugas harus lebih teliti dalam melaksanakan verifikasi factual
 10. Harus ada peraturan tambahan dengan beberapa alternative solusi terkait pembuktian tanggal kematian secara jelas dan tidak memudahkan verifikasi.
 11. Harus ada solusi alternative apabila ada anggota tidak dapat ditemui.
 12. Lembar Kerja Hasil Verifikasi

Faktual

- a. Sudah ada solusi saat verifikasi perbaikan
- b. Harus ada kolom keterangan tambahan di lembar kerja
- c. Perlu diberikan kolom tanggal pelaksanaan verifikasi.

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU 2024

Simulasi pemungutan dan perhitungan suara di PPS merupakan bagian yang sangat penting mengingat begitu banyak hal-hal yang harus dikerjakan dan dilakukan oleh anggota KPPS dalam proses pungut hitung tersebut. yang pernah dilakukan oleh KPU Kota Jakarta Timur adalah simulai pada tingkat kecamatan yang terbagi dalam dua zona dan menghadirkan PPS dan beberapa anggota KPPS karena itu pemilu yang akan datang perlunya simulasi pada tingkat kelurahan yaitu PPS yang nantinya memberikan ruang kepada anggota KPPS untuk dapat memahami betul prosesnya, hal ini perlu diperhatikan dan dilakukan mengingat TPS merupakan kunci awal dan pertama dalam proses rekapitulasi pada tingkat yang lebih tinggi.

Pelaksanaan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan pada Hari Senin, Tanggal 18 Desember 2023, pukul: 09.00 WIB bertempat di halaman Kantor KPU Kota Jakarta Timur. KPU Kota Jakarta Timur bertindak selaku panitia pada kegiatan simulasi tersebut dan petugas simulasi KPPS terdiri dari PPK dan PPS se- Kota Jakarta Timur.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR

14
Februari
2024

HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL D. HASIL KABUPATEN/KOTA

Hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur pada pemilihan umum tahun 2024 selengkapnya dapat diakses melalui laman website resmi KPU Kota Jakarta Timur di jakartatimur.kpu.go.id atau scan barcode berikut:

Berikut adalah nama-nama caleg yang berhasil memperoleh kursi DPR pada Dapil DKI Jakarta 1 :

NO	NAMA	PARTAI	SUARA
1	Mardani Ali Sera	PKS	176.584
2	Anis Byarwati	PKS	64.304
3	Habiburokhman	Gerindra	96.914
4	Eko Hendro Purnomo	PAN	93.673
5	Hasbiallah Ilyas	PKB	80.895
6	Putra Nababan	PDIP	105.559

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Profil

- Nama Lengkap
Dr. Mardani Ali Sera, M.Eng
- Tempat, Tanggal Lahir
Jakarta, 09 April 1968
- Dapil
DKI Jakarta I (Jakarta Timur)

Keluarga

- Istri : **Siti Oniah**
- Anak : **4 Laki-Laki
5 Perempuan**

Riwayat Pekerjaan

- Menjadi Da'i utusan DPP PKS ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Arab Saudi untuk mensosialisasikan konsep pembangunan umat madani, 2008
- Staff Pengajar Universitas Mercu Buana, 1992 – Sekarang
- Kepala Pusat Penelitian Univ. Mercu Buana, 2006-2007
- Anggota Komisi II DPR RI, 2019-2024

Pendidikan

- SMAN 1 Budi Utomo, Jakarta Pusat
- S1 Teknik Mesin, Universitas Indonesia
- S2 Master of Engineering, Universiti Teknologi Malaya
- S3 Philosophiae Doctorate, Universiti Teknologi Malaya

Riwayat Organisasi

- Wakil Sekretaris Jenderal PKS, 2005-2010
- Sekretaris Majelis Pertimbangan PKS, 2010-2011
- Majelis Syuro PKS, 2010-sekarang
- Ketua DPP PKS Bidang Humas, 2012-2015
- Wakil Sekretaris Jenderal PKS, 2015-2016
- Ketua DPP PKS Bidang Kepemudaan, 2016-2019
- Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi di Pilgub DKI Jakarta, 2017
- Ketua DPP PKS Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah, 2019-2020
- Ketua DPP PKS Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Hidup, 2020-sekarang

Media Sosial

- Facebook : **Mardani Ali Sera**
- Twitter : **@MardaniAllSera**
- Instagram : **@mardaniallsera**
- YouTube : **Mardani All Sera**
- Website : **mardaniallsera.id**

MARDANI ALI SERA

Profil

- Nama Lengkap
Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si
- Tempat, Tanggal Lahir
Surabaya, 09 Maret 1967
- Dapil
DKI Jakarta I (Jakarta Timur)

Pendidikan

- **D3 Akademi Pimpinan Perusahaan**, Jurusan Financial Management
- **SI STAI Al-Hikmah Jakarta**, Program Intensif Berbahasa Arab, Fakultas Syari'ah
- **S2 Universitas Indonesia** Program Pascasarjana, Kekhususan Ekonomi Islam
- **S3 Universitas Airlangga** Program Doktor Ilmu Ekonomi Islam

Riwayat Pekerjaan

- **Dekan Fakultas Ekonomi Univ. YARSI Jakarta**, 2014-2017
- **Sekretaris Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI Jakarta**, 2017-2019
- **Dosen Universitas Airlangga Surabaya**
- **Anggota Badan Legislasi DPR RI**, 2019-2020
- **Anggota Komisi XI DPR RI**, 2019-sekarang

Keluarga

- Suami : **H.M. Isbir Renwarin**
- Anak : **4 Laki-Laki**
4 Perempuan

Riwayat Organisasi

- **Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga IAEI DPW DKI Jakarta**, 2018-2021
- **Ketua Majelis Sarana Ekonomi Islam (MASEI) Wilayah DKI Jakarta**, 2017-2021
- **Ketua Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia (LK3I)**, 2012-2016
- **Anggota Forum Dosen Ekonomi Islam Indonesia (FORDEBI)**, 2016-sekarang
- **Ketua Bidang Perempuan DPP PKS**, 2010-2015
- **Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS**, 2020-2025

Media Sosial

- **f** : **Anisbyarwatipks**
- **@** : **@anisbyarwatipks**
- **@** : **@AnisbyarwatiPKS**

ANIS BYARWATI

BIO GRAFIS

Habiburokhman, S.H., M.H.

Komisi III

2019 - 2024 & 2024 - 2029

NO: A-77

DAPIL: DKI Jakarta 1

TTL: Metro - Lampung, 17 September 1974

JENIS KELAMIN: Laki - laki

AGAMA: Islam

ALAMAT: -

MOTTO / KUTIPAN

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan	Tahun
SDN Yosodadi – Lampung Tengah	1980 – 1986
SMPN 2 Metro – Lampung	1986 – 1989
SMAN Suryadama II – Bandar Lampung	1989 – 1992
S1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Lampung	1993 – 1999
S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia	2010 – 2013
S3 PDIH Universitas Negeri Surakarta	2018 – Sekarang

PERJALANAN KARIR

Pekerjaan	Tahun
Habiburokhman & Co (Pendirii)	2002 – Sekarang
DPR RI (KAPOKSI III, Wakil Ketua MKD)	2019 – Sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI

Organisasi	Tahun
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)	1993
Senat Mahasiswa FH Unila	1993
Keluarga Mahasiswa Pemuda Petajar Lampung (KMPPRL)	1998
Serikat Pengacara Rakyat (SPR)	2005
Ketua Bidang Advokasi dan anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra	2010
Direktur Advokasi Tim Kampanye Nasional Prabowo –Hatta	2014
Advokat Cinta Tanah Air (ACTA)	2016
Wakil Ketua Bidang Advokasi & Hukum DPP Partai Gerindra	2021

EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos.

MP ID

: 499

Faction

: National Mandate Party Faction

Constituency

: DKI JAKARTA I

Educational Background

- , SD Negeri 03 Pagi. Tahun: 1977 - 1983
- , SMP 21 Pagi. Tahun: 1983 - 1986
- , SMA 18 Siang. Tahun: 1986 - 1989
- Ilmu Jurnalistik, IISIP. Tahun: 1989 - 1996

Working Experience

- DPR RI, Sebagai: Anggota Fraksi PAN. Tahun: 2009 - 2019
- DPR RI , Sebagai: Anggota Fraksi PAN. Tahun: 2009 - 2014
- PT. Komando Media Televisi, Sebagai: Direktur Utama. Tahun: 2007 - 2009
- PT Komando Sinergi Media, Sebagai: Direktur Utama. Tahun: 2006 - 2007
- PT. Komando Maestro Kreasindo, Sebagai: Direktur Utama. Tahun: 2005 - 2006
- PT. Komando Langgeng Sejati, Sebagai: CEO. Tahun: 2005 -
- PT. E. Titik Tiga Komando, Sebagai: CEO. Tahun: 2001 -
- PT. Catus Mitra Promosindo, Sebagai: CEO. Tahun: 2000 -

Organizational

- Fraksi PAN DPR RI, Sebagai: Sekretaris. Tahun: 2020 - 2024
- Fraksi PAN DPR RI, Sebagai: Wakil Bendahara. Tahun: 2014 - 2019
- Humas dan Pengaduan Partai, Sebagai: . Tahun: 2010 - 2014
- DPP PAN, Sebagai: Wakil Sekretaris . Tahun: 2010 - 2014
- Fraksi PAN DPR RI, Sebagai: Wakil Ketua. Tahun: 2009 - 2014

HASBIALLAH ILYAS

JABATAN

Ketua DPW PKS
DKI Jakarta

ANGGOTA DPR RI

Periode 2024-2029

KARIR JABATAN

Anggota DPRD DKI
Jakarta 2009-2024

DKI JAKARTA I

JAKARTA
TIMUR

H. Hasbiallah Ilyas, yang akrab disapa Bang Haji, adalah politisi asal Betawi yang terpilih sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029 dari dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur), bertugas sebagai anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS. Karier politiknya dimulai pada 2009 sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS untuk Dapil Jakarta Timur, dan ia kembali terpilih pada periode 2019-2024 untuk Dapil IV DKI Jakarta. Selain aktif di dunia politik, Hasbiallah juga mengajar di Pesantren Al-Kenanniyah, menjadi khatib Jumat di berbagai masjid di Jakarta, serta menjalankan HASBIALLAH ILYAS CENTER (HIC) sebagai wadah kegiatan sosial dan politiknya.

PUTRA NABABAN

MP ID

: 174

Faction

: Indonesian Democratic Party of Struggle Faction

Constituency

: DKI JAKARTA I

Educational Background

- , SD PSKD. Tahun: 1980 - 1986
- , SMP Tarakanita I. Tahun: 1986 - 1989
- , West High School IOWA AS. Tahun: 1989 - 1990
- Bachelor Of Arts, Midland Lutheran College, Nebraska, AS. Tahun: 1990 - 1994

Working Experience

- ID Talent, Sebagai: Founder & COO. Tahun: 2016 - Skrg
- Badan Narkotika Nasional (BNN), Sebagai: Anggota Kelompok Ahli. Tahun: 2014 - 2016
- Metro TV & Metro TV News.Com, Sebagai: Pimpinan Redaksi. Tahun: 2012 - 2017
- RCTI TV, Sebagai: Wakil Pimpinan Redaksi. Tahun: 2008 - 2012
- Trijaya Radio, Sebagai: Host Program Talkshow. Tahun: 2005 - 2008
- Rakyat Merdeka, Sebagai: Managing Editor. Tahun: 1995 - 2001

Organizational

- Wakil Direktur Kompol, Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf, Sebagai: . Tahun: 2018 - 2019
- Emerging Leaders Program, Harvard Kennedy School, Sebagai: . Tahun: 2016 - 2016
- Forum Pimpinan Redaksi Indonesia, Sebagai: . Tahun: 2012 - 2019
- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Sebagai: . Tahun: 2009 - Skrg
- Ideas Fellow, Unity in Diversity, Massachusetts Institute of Techology, Sebagai: . Tahun: 2008 - 2008

Movement

- Gerakan Nasional Literasi Digital - . Tahun: 2017 -
- Gerakan Nasional 1000 Starup - . Tahun: 2017 -
- Ideas Fellow - . Tahun: 2008 -

PERSIAPAN

Proses Rekapitulasi tingkat Kota Jakarta Timur dilaksanakan dengan terlebih dahulu dilakukan rapat pleno perencanaan kegiatan serta rapat persiapan sebelum pelaksanaan

PELAKSANAAN

B.1. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemungutan suara dilakukan pada tanggal 27 November 2024 dan penghitungan Suara dilakukan pada tanggal 27 November s.d 2 Desember 2024 dari tingkat TPS sampai dengan tingkat Kota berikut sertifikat berdasarkan jumlah dari kelurahan dengan sertifikat penghitungan suara terlampir

B.1.1. Kecamatan Matraman

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

A. Data Pemilih

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap

Laki-laki 68222

Perempuan 71.445

Jumlah 139.667

B. Pengguna Hak Pilih

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya

Laki-laki 37.633

Perempuan 44.721

Jumlah 82.354

2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya

Laki-laki 28

Perempuan 35

Jumlah 63

3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya

Laki-laki 67

Perempuan 68

Jumlah 135

4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)

Laki-laki 37.728

Perempuan 44.824

Jumlah 82.552

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan

2.5% dari DPT **143.505**

2. Jumlah surat suara yang digunakan **82.552**

3. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos **113**

4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan **60.840**

III. DATA PEMILIH DISABILITAS

1. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih

Laki-laki 123

Perempuan 131

Jumlah 254

IV. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

A. Data Perolehan Suara Pasangan Calon

1. H.M. Ridwan Kamil – H. Suswono **28.146**

2. Komjen Pol (Purn). Dharma Pongrekun, S.I.K., M.M., M.Kum –
Dr. Ir. R. Kun Wardana Abyoto, M.T. **7.752**

3. Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M. – H. Rano Karno, S.IP.
(Si Doel) **38.846**

B. Jumlah Suara Sah **74.744**

C. Jumlah Suara Tidak Sah **7.808**

D. Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah (IV.B+IV.C) **82.552**

B.1.2. Kecamatan Pulogadung

V. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

A. Data Pemilih

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap

Laki-laki 110.578

Perempuan 115.963

Jumlah 226.541

B. Pengguna Hak Pilih

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya

Laki-laki 61.490

Perempuan 73.090

Jumlah 134.580

2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya

Laki-laki 24

Perempuan 41

Jumlah 65

3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya

Laki-laki 128

Perempuan 130

Jumlah 258

4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)

Laki-laki 61.642

Perempuan 73.261

Jumlah 134.903

VI. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2.5% dari DPT **232.664**
2. Jumlah surat suara yang digunakan **134.903**
3. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos **353**
4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan **97.408**

VII. DATA PEMILIH DISABILITAS

1. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih
Laki-laki 179
Perempuan 193
Jumlah 372

VIII. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

A. Data Perolehan Suara Pasangan Calon

1. H.M. Ridwan Kamil – H. Suswono **44.615**
2. Komjen Pol (Purn). Dharma Pongrekun, S.I.K., M.M., M.Kum – Dr. Ir. R. Kun Wardana Abyoto, M.T. **13.791**
3. Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M. – H. Rano Karno, S.IP. (Si Doel) **65.205**

- B. Jumlah Suara Sah **123.611**
- C. Jumlah Suara Tidak Sah **11.292**
- D. Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah (IV.B+IV.C) **134.903**

B.1.3. Kecamatan Jatinegara

IX. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

A. Data Pemilih

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap

Laki-laki 124.882

Perempuan 120.528

Jumlah 245.410

B. Pengguna Hak Pilih

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya

Laki-laki 69.529

Perempuan 74.940

Jumlah 144.469

2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya

Laki-laki 583

Perempuan 69

Jumlah 652

3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya

Laki-laki 111

Perempuan 111

Jumlah 222

4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)

Laki-laki 70.223

Perempuan 75.120

Jumlah 145.343

X. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan

2.5% dari DPT **252.111**

2. Jumlah surat suara yang digunakan **145.343**

3. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos **94**

4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan **106.674**

XI. DATA PEMILIH DISABILITAS

1. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih

Laki-laki 208

Perempuan 213

Jumlah 421

XII. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

A. Data Perolehan Suara Pasangan Calon

1. H.M. Ridwan Kamil – H. Suswono **43.001**
2. Komjen Pol (Purn). Dharma Pongrekun, S.I.K., M.M., M.Kum –
Dr. Ir. R. Kun Wardana Abyoto, M.T. **13.073**
3. Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M. – H. Rano Karno, S.IP.
(Si Doel) **67.646**

B. Jumlah Suara Sah 129.720

C. Jumlah Suara Tidak Sah 15.623

D. Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah (IV.B+IV.C) 145.343

B.1.4. Kecamatan Kramatjati

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

A. Data Pemilih

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap

Laki-laki 113.810

Perempuan 117.853

Jumlah 231.663

B. Pengguna Hak Pilih

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya

Laki-laki 61.114

Perempuan 72.731

Jumlah 133.845

2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya

Laki-laki 53

Perempuan 60

Jumlah 113

3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya

Laki-laki 125

Perempuan 139

Jumlah 264

4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)

Laki-laki 61.292

Perempuan 72.930

Jumlah 134.222

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan

2.5% dari DPT **237.799**

2. Jumlah surat suara yang digunakan **134.222**

3. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos **103**

4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan **103.474**

III. DATA PEMILIH DISABILITAS

1. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih

Laki-laki 186

Perempuan 147

Jumlah 333

IV. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

A. Data Perolehan Suara Pasangan Calon

1. H.M. Ridwan Kamil – H. Suswono **51.084**

2. Komjen Pol (Purn). Dharma Pongrekun, S.I.K., M.M., M.Kum –
Dr. Ir. R. Kun Wardana Abyoto, M.T. **12.638**

3. Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M. – H. Rano Karno, S.IP.
(Si Doel) **57.334**

B. Jumlah Suara Sah **121.056**

C. Jumlah Suara Tidak Sah **13.166**

D. Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah (IV.B+IV.C) **134.222**

B.1.5. Kecamatan Pasar Rebo

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

A. Data Pemilih

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap

Laki-laki 79.451

Perempuan 87.334

Jumlah 166.785

B. Pengguna Hak Pilih

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya

Laki-laki 45.759

Perempuan 57.142

Jumlah 102.901

1. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya

Laki-laki 54

Perempuan 47

Jumlah 101

2. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya

Laki-laki 136

Perempuan 102

Jumlah 238

3. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)

Laki-laki 45.949

Perempuan 57.291

Jumlah 103.240

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2.5% dari DPT **171.799**
2. Jumlah surat suara yang digunakan **103.240**
3. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos **15**
4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan **68.544**

III. DATA PEMILIH DISABILITAS

1. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih
Laki-laki 170
Perempuan 183
Jumlah 353

IV. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

A. Data Perolehan Suara Pasangan Calon

1. H.M. Ridwan Kamil – H. Suswono **45.601**
2. Komjen Pol (Purn). Dharma Pongrekun, S.I.K., M.M., M.Kum – Dr. Ir. R. Kun Wardana Abyoto, M.T. **10.168**
3. Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M. – H. Rano Karno, S.IP. (Si Doel) **40.046**

- B. Jumlah Suara Sah **95.815**
- C. Jumlah Suara Tidak Sah **7.425**
- D. Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah (IV.B+IV.C) **103.240**

B.1.6. Kecamatan Cakung

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

A. Data Pemilih

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap

Laki-laki 210.791

Perempuan 211.087

Jumlah 421.878

B. Pengguna Hak Pilih

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya

Laki-laki 114.297

Perempuan 131.844

Jumlah 246.141

2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya

Laki-laki 126

Perempuan 119

Jumlah 245

3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya

Laki-laki 184

Perempuan 209

Jumlah 393

4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)

Laki-laki 114.607

Perempuan 132.779

Jumlah 246.779

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan

2.5% dari DPT **432.920**

2. Jumlah surat suara yang digunakan **246.779**

3. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos **27**

4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan **186.114**

III. DATA PEMILIH DISABILITAS

1. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih

Laki-laki 257

Perempuan 288

Jumlah 545

IV. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

A. Data Perolehan Suara Pasangan Calon

1. H.M. Ridwan Kamil – H. Suswono **96.282**
2. Komjen Pol (Purn). Dharma Pongrekun, S.I.K., M.M., M.Kum – Dr. Ir. R. Kun Wardana Abyoto, M.T. **22.039**
3. Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M. – H. Rano Karno, S.IP. (Si Doel) **111.213**

B. Jumlah Suara Sah 229.534

C. Jumlah Suara Tidak Sah 17.245

D. Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah (IV.B+IV.C) 246.779

B.1.7. Kecamatan Duren Sawit

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

A. Data Pemilih

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap

Laki-laki 161.672

Perempuan 170.435

Jumlah 332.107

B. Pengguna Hak Pilih

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya

Laki-laki 93.210

Perempuan 110.176

Jumlah 203.386

2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya

Laki-laki 81

Perempuan 244

Jumlah 325

3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya

Laki-laki 187

Perempuan 180

Jumlah 367

4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)

Laki-laki 93.478

Perempuan 110.600

Jumlah 204.078

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan

2.5% dari DPT **341.536**

2. Jumlah surat suara yang digunakan **204.078**

3. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos **193**

4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan **137.265**

III. DATA PEMILIH DISABILITAS

1. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih
Laki-laki 239
Perempuan 274
Jumlah 513

IV. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

A. Data Perolehan Suara Pasangan Calon

1. H.M. Ridwan Kamil – H. Suswono **70.721**
2. Komjen Pol (Purn). Dharma Pongrekun, S.I.K., M.M., M.Kum – Dr. Ir. R. Kun Wardana Abyoto, M.T. **19.142**
3. Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M. – H. Rano Karno, S.IP. (Si Doel) **97.218**

B. Jumlah Suara Sah **187.081**

C. Jumlah Suara Tidak Sah **16.997**

D. Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah (IV.B+IV.C) **204.078**

B.1.8. Kecamatan Makasar

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

A. Data Pemilih

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap

Laki-laki 75.553

Perempuan 82.448

Jumlah 158.001

B. Pengguna Hak Pilih

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya

Laki-laki 42.629

Perempuan 53.261

Jumlah 95.890

2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya

Laki-laki 15

Perempuan 27

Jumlah 43

3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya

Laki-laki 135

Perempuan 89

Jumlah 224

4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)

Laki-laki 42.780

Perempuan 53.377

Jumlah 96.157

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2.5% dari DPT **162.325**
2. Jumlah surat suara yang digunakan **96.157**
3. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos **25**
4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan **66.143**

III. DATA PEMILIH DISABILITAS

1. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih
Laki-laki 123
Perempuan 130
Jumlah 253

IV. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

- A. Data Perolehan Suara Pasangan Calon
1. H.M. Ridwan Kamil – H. Suswono **36.517**
 2. Komjen Pol (Purn). Dharma Pongrekun, S.I.K., M.M., M.Kum –
Dr. Ir. R. Kun Wardana Abyoto, M.T. **9.672**

3. Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M. – H. Rano Karno, S.IP.
(Si Doel) **41.850**
- B. Jumlah Suara Sah **88.039**
- C. Jumlah Suara Tidak Sah **8.118**
- D. Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah (IV.B+IV.C) **96.157**

B.1.9. Kecamatan Ciracas

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

A. Data Pemilih

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap

Laki-laki 113.467

Perempuan 119.223

Jumlah 232.690

B. Pengguna Hak Pilih

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya

Laki-laki 64263

Perempuan 77.832

Jumlah 142.095

2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya

Laki-laki 9

Perempuan 6

Jumlah 15

3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya

Laki-laki 161

Perempuan 119

Jumlah 280

4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)

Laki-laki 64.433

Perempuan 77.957

Jumlah 142.390

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2.5% dari DPT **238.918**

2. Jumlah surat suara yang digunakan **142.390**

3. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos **63**

4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan **96.465**

III. DATA PEMILIH DISABILITAS

1. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih

Laki-laki 143

Perempuan 156

Jumlah 299

IV. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

A. Data Perolehan Suara Pasangan Calon

1. H.M. Ridwan Kamil – H. Suswono **58.458**

2. Komjen Pol (Purn). Dharma Pongrekun, S.I.K., M.M., M.Kum –
Dr. Ir. R. Kun Wardana Abyoto, M.T. **14.656**

3. Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M. – H. Rano Karno, S.IP.
(Si Doel) **59.296**

B. Jumlah Suara Sah **132.410**

C. Jumlah Suara Tidak Sah **9.980**

D. Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah (IV.B+IV.C) **142.390**

B.1.10. Kecamatan Cipayung

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

A. Data Pemilih

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap

Laki-laki 107.840

Perempuan 12.246

Jumlah 220.086

B. Pengguna Hak Pilih

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya

Laki-laki 61.704

Perempuan 74.047

Jumlah 135.751

2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya

Laki-laki 58

Perempuan 65

Jumlah 123

3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya

Laki-laki 167

Perempuan 129

Jumlah 296

4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)

Laki-laki 61.929

Perempuan 74.241

Jumlah 136.170

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2.5% dari DPT **226.051**

2. Jumlah surat suara yang digunakan **136.170**

3. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos **145**
4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan **89.736**

III. DATA PEMILIH DISABILITAS

1. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih
Laki-laki 510
Perempuan 395
Jumlah 905

IV. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

- A. Data Perolehan Suara Pasangan Calon
 1. H.M. Ridwan Kamil – H. Suswono **55.188**
 2. Komjen Pol (Purn). Dharma Pongrekun, S.I.K., M.M., M.Kum – Dr. Ir. R. Kun Wardana Abyoto, M.T. **14.004**
 3. Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M. – H. Rano Karno, S.I.P. (Si Doel) **56.516**
- B. Jumlah Suara Sah **125.708**
- C. Jumlah Suara Tidak Sah **10.462**
- D. Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah (IV.B+IV.C) **136.170**

B.2. Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota

Rapat Pleno rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota menurut tahapan dapat dilaksanakan mulai dari tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024. KPU Kota Jakarta Timur melaksanakan tahap rekapitulasi tingkat kota mulai tanggal 2 Desember s/d 4 Desember 2024. Kegiatan tersebut terbuka untuk umum dilaksanakan di Hotel Best Western Cawang. Stakeholder yang Hadir dalam pembukaan acara rapat pleno tamu undangan dari Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) antara lain Kapolres Kota Jakarta Timur beserta jajarannya, Walikota Jakarta Timur diwakili oleh Asisten Pemerintahan, Bapak Eka Darmawan serta Dandin 0505/ Jakarta Timur juga tidak dapat hadir dan diwakili oleh staf.

Di awal rapat pleno rekapitulasi, diberikan kesempatan untuk para undangan pimpinan kota memberikan sambutannya dan dilanjutkan oleh Ketua KPU Kota Jakarta Timur melakukan sambutan sekaligus pembukaan Rapat Pleno pada jam 20.36 WIB. Rapat Pleno tersebut membahas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara se – Kecamatan Jakarta Timur. Hari pertama pada tanggal 2 Desember 2024, dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Dibuka pukul 20:36 WIB oleh Tedi Kurnia selaku Ketua KPU Kota Jakarta Timur Ketua KPU Kota Jakarta Timur meminta saran dari para

saksi baik dari paslon no. 1, 2 maupun 3, apabila ada Kejadian Khusus maka dibacakan diawal atau diakhir. Jawaban dari ketiga paslon mereka meminta dibacakan di awal.

Pukul 21.00 WIB Perolehan suara di Kecamatan Matraman:

Pukul 21.00 WIB dimulai pembukaan kotak Kecamatan Matraman yang didampingi oleh Bapak Carlos selaku Komisioner KPU Kota Jakarta Timur Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu, PPK Matraman dihadiri oleh 4 orang. 1 orang berhalangan hadir dikarenakan sakit yaitu Muchrajullan. Ada kejadian khusus di Kecamatan Matraman, sudah disaksikan oleh Panwas dan sudah clear/selesai.

28146 untuk Paslon 1

7752 untuk Paslon 2

38846 untuk Paslon 3

74744 Jumlah Suara sah

7808 Jumlah Suara tidak sah

Ketiga wakil paslon menyatakan sah untuk hasil perolehan suara tersebut pada pukul 21.07 WIB. Proses pembacaan suara Kecamatan Matraman berjalan dengan lancar dan selesai pada pukul 21.08 WIB.

Pukul 21.08 WIB Perolehan Suara di Kecamatan Pulogadung:

Dihadiri oleh 5 anggota PPK. Pembukaan kotak dilaksanakan pada pukul 21.13 WIB dengan didampingi oleh Pak Rio Verieza selaku

Anggota KPU Kota Jakarta Timur dan disaksikan oleh Anggota dari Bawaslu Jakarta Timur yaitu ibu Amel.

Terdapat 4 kejadian khusus di Kecamatan Pulogadung dan sudah diselesaikan di Kecamatan Pulogadung. Disaksikan oleh Panwas dari Pulogadung.

Perolehan suara di Kecamatan Pulogadung :

Paslon 1 44615

Paslon 2 13791

Paslon 3 65205

Jumlah suara sah 123611

Jumlah suara tidak sah 11292

Jumlah suara 134903

Pukul 21.19 WIB jumlah perolehan suara di Kecamatan Pulogadung disahkan. Proses pembacaan suara Kecamatan Pulogadung berjalan dengan lancar dan selesai pada pukul 21.21 WIB.

Pukul 21.22 WIB Perolehan Suara di Kecamatan Cakung.

Dihadiri lengkap oleh 5 anggota PPK Kecamatan Cakung. Pembukaan kotak dilakukan jam 21.25 WIB didampingi oleh Pak Marhadi Anggota KPU Kota Jakarta Timur selaku Korwil Kecamatan Cakung. Didampingi oleh Bawaslu Kota Jakarta Timur Ibu Amel dan Panwas dari Cakung.

Di Kecamatan Cakung terdapat Kejadian Khusus dan sudah diselesaikan di Tingkat Kecamatan dengan Panwasdam dan saksi baik dari Paslon No. 1, Paslon No. 2 dan Paslon No. 3.

Paslon No. 1 meminta review mengenai Kejadian Khusus di Kecamatan Cakung. Dari paslon No. 1 tidak bersedia menandatangani BA atas arahan dari Pimpinannya, tetapi paslon No. 1 mengapresiasi Kecamatan Cakung. Paslon no 1 menanyakan jumlah DPT Kecamatan Cakung. DPT Cakung 421878. 246779 surat suara yang digunakan. Hampir 50% tidak menggunakan hak pilih di kecamatan Cakung. Yang menggunakan hak pilih hampir 59%, berarti melebihi dari 50%. Ketua KPU Kota Jakarta Timur akan melakukan evaluasi terkait sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Di C6 terdapat kolom saran agar tidak terlalu panjang untuk antriannya.

Perolehan suara di Kecamatan Cakung :

Paslon No. 1 96282

Paslon No. 2 22039

Paslon No. 3 111213

Jumlah suara sah 229534

Jumlah suara tidak sah 246779

Total suara 246779

Pukul 21.37 perolehan suara Kecamatan Cakung di tingkat Kota Jakarta Timur disahkan. Saksi dari Paslon 1 menyampaikan apresiasi setinggi – tingginya untuk kinerja dari Kecamatan Cakung.

Rapat Pleno Hari Selasa, 3 Desember 2024

Pukul 11.00 WIB dibuka dengan Kec. Jatinegara yang dihadiri lengkap oleh 5 anggota PPK Kecamatan Jatinegara. Pembukaan kotak dilakukan pada pukul 11.09 WIB

Kejadian khusus yang terjadi di kelurahan dan kesalahan penginputan pada C Hasil Plano yang sudah diselesaikan di tingkat Kecamatan Jatinegara

Pukul 11.15 WIB hasil perolehan suara di sahkan di tingkat Kota Jakarta Timur.

Pukul 11.17 WIB Perolehan Suara di Kecamatan Duren Sawit.

Dihadiri lengkap oleh 5 anggota PPK Kecamatan Duren Sawit. Pembukaan kotak dilakukan pada pukul 11.25 WIB didampingi oleh Pak Carlos Anggota KPU Kota Jakarta Timur selaku Korwil Kecamatan Duren Sawit dan BAWASLU kota Jakarta Timur Pak Taufik.

Di Kecamatan Duren Sawit terdapat kejadian khusus, yang pertama perihal perbaikan atau revisi jumlah pemilihan tetap di 4 Kelurahan karena salah input SIREKAP (TPS 090, TPS 021, TPS 026, TPS 033,

TPS 040) dan kejadian khusus kedua saksi paslon no.1 tidak mau memberi tanda tangan pada berita acara alasannya karena rendahnya partisipasi pemilih.

Paslon 01 untuk mengenai keberatan memberi ttd dikarenakan terjadinya penurunan DPT. Paslon 03 memberi tanggapan tentang TPS 1 sampai TPS 26 tertulis Nihil, TPS 111 Klender terjadi kesalahan penulisan tidak sah sebanyak 10 surat suara dimasukan ke keliru coblos. TPS 046 Kelurahan Pondok Bambu kurang menulis kelurahan pada C Hasil Plano . Dan sudah diselesaikan di tingkat Kecamatan

Hasil Rekapitulasi

Paslon 01 70721

Paslon 02 19142

Paslon 03 97218

Suara sah 187081

Suara tidak sah 16997

Total suara 204078

Pukul 11.44 WIB Peroleh suara Kecamatan Duren Sawit di tingkat Kota Jakarta Timur disahkan.

Pukul 11.49 WIB Perolehan Suara di Kecamatan Kramat Jati

Di hadiri oleh 5 anggota PKK Kecamatan Kramat Jati. Pembukaan kotak dilakukan pada pukul 11.51 didampingi oleh Pak Marhadi

Anggota KPU Kota Jakarta Timur selaku Korwil Kecamatan Kramat Jati dan BAWASLU

Kejadian Khusus :

- 28 November – 1 Des melaksanakan pleno rekap tingkat kecamatan dihadiri paslon 1,2,3 serta PAWASCAM kec Kramat Jati. Saksi 01 tidak bersedia memberikan tanda tangan alasan intruksi pimpinan.

- TPS 35 terdapat keliruan c hasil dan plano tps 13 keliru c hasil dan plano tps 21 perbedaan penlisian c hasil dan plano tps 31 c plano dan sirekap tidak tertulis disabilitisas, tps 36 revisi absensi harusnya ditulis dpk, salah penulisan surat suara dan surat suara rusak c plano, tps 50 salah penulisan nomor tps, 6 tps salah pengimputan jumlah laki-laki dan perempuan.

- Saksi Paslon 01 : Poin 9 meminta diganti, bukan intruksi pimpinan tapi temuan dari saksi paslon, dengan adanya pemilih yang tidak mendapat undangan dan partisipasi masyarakat yang rendah. (pihak Bawaslu menolak permintaan tim saksi paslon 01)

Kejadian Khusus sudah di selesaikan dan disetujui peserta rapat pleno tingkat Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur

Hasil Rekapitulasi

Paslon 01 51084

Paslon 02 12638

Paslon 03 57334

Suara sah 121056

Suara tidak sah 133166

Total 134222

Pukul 12.13 perolehan suara Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur di sahkan

Rapat Pleno dipending pukul 12.20 WIB dan rapat pleno dibuka kembali pada pukul 14.43 WIB oleh Bapak Tedi Kurnia selaku Ketua KPU Kota Jakarta Timur.

Pukul 14.44 WIB Perolehan di Kecamatan Cipayung

Dihadiri oleh 5 anggota PKK Kecamatan Cipayung. Pembukaan kotak dilakukan pada pukul 14.46 didampingi oleh Pak Rio Verieza Anggota KPU Kota Jakarta Timur dan Ibu Amel dari pihak BAWASLU.

Kecamatan Cipayung terdapat kejadian khusus yaitu saksi paslon 01 tidak mau menanda tangani berita acara dan sudah di selesaikan di tingkat kecamatan

Hasil Perolehan Suara :

Paslon 01 55188

Paslon 02 14004

Paslon 03 56516

Suara sah 125708

Suara tidak sah 10462

Total 136170

Pukul 14.52 WIB perolehan suara Kecamatan Cipayung disahkan.

Pukul 14.58 WIB Perolehan di Kecamatan Makasar

Dihadiri oleh 5 anggota PPK Kecamatan Makasar. Pembukaan kotak dilakukan pada pukul 15.00 didampingi oleh Rio Verieza Anggota KPU Kota Jakarta Timur selaku Korwil Kecamatan Makasar dan Ibu Amel dari pihak BAWASLU Kota Jakarta Timur.

Kejadian Khusus saksi paslon 01 menolak menandatangani

Paslon 01 menjelaskan terjadinya pencoblosan surat suara tidak terpakai di pinang ranti sebanyak 18 yang diadakan langsung oleh panwas (dua orang yang melakukan sudah dilakukan pemecatan karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik yang berlaku)

Kronologis Pinang Ranti : terkait yang terjadi, Ketua PPK baru mengetahui kejadian tsb pada pukul 13.26 WIB dimana kejadian tsb terjadi sekitar pukul 12.00 WIB dan arahan dari panwas bahwa PPK tetap harus melakukan rekapitulasi. Kejadian tsb hanya diketahui oleh KPPS, Pamsung 1, dan 2 anggota panwas

Rio Verieza, terkait dengan TPS 028 Pinang Ranti, Rio Verieza selaku Kadiv hukum KPU Kota Jakarta Timur langsung melakukan pengecekan terhadap 7 KPPS dan 2 anggota panwas dan KPU Kota Jakarta Timur memberhentikan tetap 1 orang ketua KPPS TPS28 dan 1

orang petugas ketertiban TPS28 di Kelurahan Pinang Ranti karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik pun kode perilaku yang berlaku pada saat proses pemungutan suara.

Hasil Perolehan Suara

Paslon 01 36517

Paslon 02 9672

Paslon 03 41850

Suara sah 88039

Suara tidak sah 8118

Total 96157

Pukul 15.27 WIB Perolehan suara Kecamatan Makasar di sah kan.

Pukul 15.31 WIB Perolehan Suara di kecamatan Pasar Rebo

Dihadiri oleh 5 anggota PPK Kecamatan Pasar Rebo. Pembukaan kotak dilakukan pada pukul 15.33 di dampingi oleh Bapak Carlos selaku kecamatan Pasar Rebo dan ibu Amel selaku BAWASLU.

Tidak ada kejadian khusus

Hasil Perolehan Suara

Paslon 01 45601

Paslon 02 10168

Paslon 03 40046

Suara sah 95815

Suara tidak sah 7425

Total 103240

Pukul 15.38 WIB Perolehan suara Kecamatan Pasar Rebo di sah kan dan menjadi tingkat partisipasi tertinggi sebanyak 62%

Pukul 15.42 WIB Perolehan Suara di Kecamatan Ciracas

Dihadiri oleh 5 anggota PPK Kecamatan Ciracas . Pembukaan kotak dilakukan pada pukul 15.43 di dampingi oleh Bapak Fahrur selaku KORWIL kecamatan Ciracas dan Pak Taufik selaku BAWASLU.

Kejadian khusus paslon 01 tidak mau menandatangani berita acara dan sudah diselesaikan di tingkat Kecamatan

Perolehan hasil suara

Paslon 01 58458

Paslon 02 14656

Paslon 03 59296

Suara sah 132410

Suara tidak sah 9980

Total 142390

Pukul 15.48 WIB hasil perolehan suara Kecamatan Ciracas disahkan.

Pukul 15.59 Rapat pleno di pending sampai pukul 09.00 WIB pada hari Rabu, 4 Des 2024

Rapat Pleno Hari Rabu, 4 Desember 2024

Rapat pleno kembali di buka pada pukul 10.20 WIB oleh Bapak Tedi Kurnia selaku Ketua KPU Kota Jakarta Timur

Paslon 01 mengucapkan banyak terimakasih dan apresiasi kepada penyelenggara dan jajaran nya. Catatan :

- Partisipasi masyarakat yang kurang atau tidak mencapai 70%
- Ada kejadian yang melukai demokrasi di TPS pinang ranti dan mendorong BAWASLU untuk lebih cepat menindaklanjuti permasalahan tersebut
- Kurangnya antusiasme masyarakat pada pemilihan gubernur tahun ini
- Saksi paslon 01 tidak akan menandatangani berita acara.

Paslon 02 mengucapkan banyak terimakasih dan apresiasi terhadap KPU dan penyelenggara, Catatan :

- Partisipasi masyarakat yang kurang

Paslon 03 menyampaikan apresiasi terhadap semua penyelenggara dan jajaran.

Catatan :

- Baik untuk KPU dan Bawaslu untuk memperkuat pola rekrutmen
- Willem J. Ketua Bawaslu, ada beberapa catatan yang akan menjadi concern kami dan kami akan menindak lanjuti polemic yang ada.

Tedi Kurnia :

- Berita acara dan sertifikat rekapitulasi, pada hari ini Rabu tanggal 4 Desember 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur telah melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang di saksi oleh tim saksi pasangan calon serta diawasi oleh BAWASLU Kota Jakarta Timur untuk melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diselenggarakan di hotel The Hive Cawang
- Hasil perhitungan perolehan suara KPU kota Jakarta Timur menyusun rekapitulasi hasil perhitungan berdasarkan formulir model D Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur dari seluruh kecamatan, dalam rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara gubernur dan wakil gubernur saksi sesuai yang tercatat dalam formulir model D Kejadian Khusus.

REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN

V. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

C. Data Pemilih

2. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap

Laki-laki 1.166.766

Perempuan 1.208.562

Jumlah 2.374.828

D. Pengguna Hak Pilih

5. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya

Laki-laki 651.628

Perempuan 769.784

Jumlah 1.421.412

6. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya

Laki-laki 1.032

Perempuan 713

Jumlah 1.745

7. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya

Laki-laki 1.401

Perempuan 1.276

Jumlah 2.677

8. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)

Laki-laki 654.061

Perempuan 771.773

Jumlah 1.425.834

VI. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

5. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2.5% dari DPT **2.439.678**
6. Jumlah surat suara yang digunakan **1.425.834**
7. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos **1.131**
8. Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan **1.012.663**

VII. DATA PEMILIH DISABILITAS

2. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih
Laki-laki 2.138
Perempuan 2.110
Jumlah 4.248

VIII. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

- E. Data Perolehan Suara Pasangan Calon
 4. H.M. Ridwan Kamil – H. Suswono **535.613**
 5. Komjen Pol (Purn). Dharma Pongrekun, S.I.K., M.M., M.Kum – Dr. Ir. R. Kun Wardana Abyoto, M.T. **136.935**
 6. Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M. – H. Rano Karno, S.IP. (Si Doel) **635.170**
- F. Jumlah Suara Sah 1.307.718

G. Jumlah Suara Tidak Sah 118.116

H. Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah (IV.B+IV.C) **1.425.834**

Pada pukul 10.41 WIB Perolehan hasil suara tingkat Kota Jakarta Timur di sah kan. Proses Rapat Pleno berjalan dengan lancar dan di tutup pada Hari Rabu Tanggal 4 Desember 2024, pukul 11.31 WIB

TATA KELOLA LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024

Tata Kelola Logistik Pemilu dalam penyelenggaraannya terdiri atas tahapan sebagai berikut:

- a. perencanaan kebutuhan dan anggaran;
- b. pengadaan;
- c. pendistribusian;
- d. pemeliharaan dan inventarisasi; dan
- e. pemusnahan surat suara.

Tahapan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan yang merupakan satu siklus Tata Kelola Logistik Pemilu. Rincian kegiatan pada masing-masing tahapan Tata Kelola Logistik Pemilu adalah sebagai berikut:

A. Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran

Perencanaan kebutuhan dan anggaran Logistik Pemilu pada KPU Kota Jakarta Timur yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 10 Kecamatan, 65 Kelurahan dan memiliki Daftar Pemilih Tetap sebanyak 2.383.972 jiwa dengan jumlah TPS 8.812 merupakan aspek penting yang harus dilakukan secara detail terhadap komponen tersebut untuk langkah tahap pertama yang harus dilakukan dalam Tata Kelola Logistik Pemilu. Dalam rangka

perencanaan kebutuhan Logistik Pemilu perlu terlebih dahulu ditetapkan kebijakan terkait pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan perolehan suara serta kebijakan terkait kebutuhan dan spesifikasi teknis Logistik Pemilu, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemilu, serta pemusnahan surat suara. Ketepatan perencanaan kebutuhan dan anggaran Logistik Pemilu akan berdampak pada efektivitas penyelenggaraan Pemilu.

Perencanaan kebutuhan dan anggaran Logistik Pemilu perlu memperkirakan dan menyusun rencana kebutuhan Logistik Pemilu menurut jenis logistik yang dibutuhkan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Penentuan kebutuhan dan anggaran Logistik Pemilu membutuhkan ketelitian, keterampilan, dan kemampuan untuk mengetahui jumlah kebutuhan dan anggaran setiap jenis logistik dan penyelenggara Pemilu, serta jumlah anggaran untuk pemeliharaan dan inventarisasi, serta pendistribusian Logistik Pemilu sampai ke lokasi TPS.

Berikut adalah Tabel Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024 pada Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kota

Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut :

Tabel 1

No	Jenis Logistik Pemilu	Kebutuhan Logistik Pemilu di TPS		
		(jumlah)	(satuan)	(%)
1	2	3	4	5
1	Kotak Suara	35.268	Lembar	100,00%
2	Bilik Suara	35.248	Lembar	100,00%
3	Segel Plastik	185.052	Buah	100,00%
4	Tinta	17.624	Botol	100,00%
5	Segel Kertas	696.318	Keping	100,00%
6	Surat Suara Pemilu Anggota DPR Dapil DKI Jakarta I	2.439.059	Lembar	100,00%
7	Alat Coblos + ATK	8.812	Buah	100,00%
8	Daftar Pasangan Calon (DPC)	8.812	Lembar	100,00%
9	Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Dapil IV	809.338	Lembar	100,00%
10	Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Dapil V	833.184	Lembar	100,00%
11	Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Dapil VI	793.537	Lembar	100,00%
12	Stiker Label Kotak Suara	35.248	Lembar	100,00%
13	Surat Suara PPWP	2.436.059	Lembar	100,00%
14	DCT Anggota DPD	8.812	Lembar	100,00%
15	DCT Anggota DPR RI	8.812	Lembar	100,00%
16	DCT Anggota DPRD	8.812	Lembar	100,00%
17	ABCTN PPWP	8.812	Lembar	100,00%

No	Jenis Logistik Pemilu	Kebutuhan Logistik Pemilu di TPS		
		(jumlah)	(satuan)	(%)
1	2	3	4	5
20	19 Formulir Surat Suara Anggota DPD Model C. Hasil Salinan-PPWP	2.436.059 17.624	Lembar Lembar	100,00% 100,00%
21	Formulir Model C. Hasil Salinan- DPD	35.248	Lembar	100,00%
22	Formulir Model C. Hasil Salinan- DPR Dapil DKI Jakarta 1	61.684	Lembar	100,00%
23	Formulir Model C. Hasil Salinan- DPRD Dapil DKI Jakarta 4	20.566	Lembar	100,00%

Kegiatan Perencanaan kebutuhan Logistik Pemilu

dilakukan pada tingkat KPU Kota Jakarta Timur sebagai berikut:

1. Pengadaan Kebutuhan Logistik;
2. identifikasi data;
3. pengumpulan data;
4. analisis data; dan
5. penetapan daftar kebutuhan Logistik Pemilu dan penganggarnya.

Hasil dari tahap perencanaan kebutuhan Logistik Pemilu adalah daftar kebutuhan Logistik Pemilu pada satuan kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan, dan Inventarisasi Logistik Pemilu pada satuan kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.

Perencanaan dalam rangka kebutuhan logistik Pemilu Tahun 2024 maka Tata Kelola Logistik Pemilu dihitung berdasarkan jumlah kebutuhan logistik berupa jumlah TPS dan Jumlah DPT. kebutuhan jasa Logistik Pemilu dengan memperhatikan harga satuan barang/jasa setempat yakni di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat yang dapat diperoleh dari satuan kerja KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU. Harga satuan selain diperoleh dari survei harga pasar juga dapat diperoleh dari harga satuan yang

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, seperti Satuan Biaya Masukan (SBM) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan standar biaya yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta.

Perencanaan kebutuhan KPU Kota Jakarta Timur disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Data kebutuhan Logistik Pemilu di tingkat kota yang pengadaannya merupakan kewenangan Sekretariat KPU Kota;
2. Data kebutuhan penunjang Tata Kelola Logistik Pemilu di tingkat Kota seperti belanja sewa gudang, belanja/jasa lainnya, sarana transportasi, dan kelengkapan teknologi informasi .

Salah satunya kewenangan untuk sewa gudang logistik tingkat KPU Kabupaten/Kota, dalam hal ini KPU Kota Jakarta Timur melakukan sewa gudang logistik Pemilu Tahun 2024 selama 2 (dua) tahun yang beralamat di Kawasan Industri Pulogadung (JIEP) Jl. Rawa Gelam II No.7 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung. Jakarta Timur.

RAB kebutuhan anggaran Logistik Pemilu dihitung melalui beberapa tahap kegiatan, yaitu:

1. Pengumpulan harga satuan terkait, sebagai berikut:
 - a. Harga satuan barang dan jasa yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Standar Biaya

Masukan, Standar Biaya Masukan Lainnya dan Harga Pasar.

- b. Harga satuan distribusi Logistik Pemilu pada KPU Kota Jakarta Timur adalah harga satuan distribusi angkutan darat antara lain sewa mobil, upah muat ke mobil, upah bongkar dari mobil, dan upah pikul.
- c. harga satuan jasa lainnya meliputi:
 - 1) biaya bongkar pasang kotak suara dan bilik pemungutan suara;
 - 2) biaya penyortiran, pelipatan, dan pengepakan surat suara;
 - 3) biaya penyortiran, pengesetan, dan pengepakan formulir;
 - 4) biaya pengepakan Logistik Pemilu;
 - 5) biaya pengamanan selama penyimpanan Logistik Pemilu;
 - 6) biaya pengamanan pendistribusian Logistik Pemilu;
 - 7) biaya perlengkapan di TPS meliputi sewa tenda, meja, kursi, *sound system* pengeras suara, sewa genset, sewa alat penerangan;
 - 8) biaya pengawasan Logistik Pemilu dari KPU Kota Jakarta Timur sampai ke TPS dan sebaliknya; dan
 - 9) biaya sewa gudang di KPU Kota Jakarta Timur.

2. Membuat rumus RAB kebutuhan anggaran Logistik Pemilu

dan RAB Tata Kelola Logistik Pemilu;

- a. menghitung RAB kebutuhan anggaran Logistik Pemilu dan RAB Tata Kelola Logistik Pemilu; dan
- b. menghitung jumlah moda angkutan yang diperlukan dalam pendistribusian Logistik Pemilu.

Berikut adalah Tabel Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024 KPU Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta,

Tabel 2

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Anggaran (Rp)
		(Jumlah)	(Satuan)		
1	2	3	4	5	6
1	Segel Plastik/Kabel Ties	185.052	Pcs	5.000	925.260.000
2	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	8.812	Lbr	1.000	8.812.000
3	Daftar Calon Tetap Anggota DPR Provinsi	8.812	Lbr	1.000	8.812.000
4	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	8.812	Lbr	1.000	8.812.000
5	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD	8.812	Lbr	1.000	8.812.000
6	Segel Plastik/Kabel Ties	7.236	Pcs	5.000	36.180.000
7	Pengadaan label nomor kotak suara pemilu tahun 2024	35.248	Pcs	2.000	70.496.000
8	Alat Coblos Pemilu	35.248	Pcs	10.000	352.480.000
9	Tanda Pengenal	378.916	Pcs	5.000	1.894.580.000
10	Karet Pengikat	2.019.344	Pcs	50	100.967.200
11	Lem	17.700	Pcs	8.500	150.450.000
12	Kantong Plastik Uk Besar	70.496	Pcs	8.000	563.968.000
13	Kantong Plastik Uk Sedang	8.812	Pcs	5.000	44.060.000
14	Kantong Plastik Uk Kecil	17.624	Pcs	500	8.812.000
15	Kantong Plastik Selongsong	35.248	Pcs	1.000	35.248.000
16	Kantong Plastik Zyplok	8.812	Pcs	2.500	22.030.000
17	Ballpoint	61.899	Pcs	3.500	216.646.500
18	Spidol Besar	12	Pcs	9.000	108.000
19	Formulir Model C Pemberitahuan-KPU	1.191.986	Lbr	350	417.195.100
	Spidol Kecil	105.871	Pcs	3.500	370.548.500
21	SDPT Daftar Hadir NIK Berbintang	158.616	lbr	350	55.515.600
	Jumlah				4.884.252.400

B. Pengadaan

Pengadaan Logistik Pemilu dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan.

Pengadaan barang/jasa Logistik Pemilu dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau Penyedia, dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

1. Kewenangan Pengadaan KPU

Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN berwenang mengadakan Logistik Pemilu, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Sekretariat Jenderal KPU

Sekretariat Jenderal KPU mengadakan Logistik Pemilu di dalam negeri dan di luar negeri, meliputi:

- 1) Logistik Pemilu Dalam Negeri
 - a) surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- 2) surat suara Pemilu anggota DPR; dan
- 3) alat bantu tuna netra Pemilu Presiden dan Wakil presiden.
- 4) Logistik Pemilu Luar Negeri
 - a) surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - b) surat suara Pemilu anggota DPR Dapil DKI Jakarta II;

- c) tinta;
 - d) segel;
 - e) sampul kertas;
 - f) formulir berita acara dan/atau sertifikat pemungutan dan penghitungan suara;
 - g) Alat bantu Tunanetra Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024;
 - h) daftar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - i) daftar calon tetap anggota DPR Dapil DKI Jakarta II.
- b. Sekretariat KPU Provinsi

Sekretariat KPU Provinsi mengadakan Logistik Pemilu di dalam negeri meliputi:

- 1) kotak suara;
- 2) surat suara Pemilu anggota DPD;
- 3) surat suara Pemilu anggota DPRD Provinsi;
- 4) surat suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- 5) tinta;
- 6) bilik pemungutan suara;
- 7) segel;
- 8) sampul kertas;
- 9) formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

- 10) formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu anggota DPR;
- 11) formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu anggota DPD;
- 12) formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu anggota DPRD Provinsi; dan
- 13) alat bantu tunanetra Pemilu anggota DPD.

c. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengadakan Logistik Pemilu dalam negeri meliputi:

- 1) alat untuk mencoblos pilihan;
- 2) tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS, dan saksi;
- 3) karet pengikat surat suara;
- 4) lem/perekat;
- 5) kantong plastik;
- 6) bolpoin;
- 7) segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok;
- 8) spidol;
- 9) formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- 10) formulir lainnya selain formulir berita acara dan sertifikat;

- 11) stiker nomor kotak suara;
- 12) tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
- 13) salinan DPT;
- 14) salinan daftar Pemilih tambahan;
- 15) daftar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- 16) daftar calon tetap anggota DPR;
- 17) daftar calon tetap anggota DPD;
- 18) daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi;
- 19) daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan
- 20) label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilu.

d. **PPLN**

PPLN mengadakan Logistik Pemilu luar negeri meliputi:

- 1) kotak suara;
- 2) bilik pemungutan suara;
- 3) alat untuk mencoblos pilihan;
- 4) sampul surat suara pemilih pos;
- 5) tanda pengenal KPPSLN, petugas ketertiban TPSLN, dan saksi;
- 6) karet pengikat surat suara;
 - 7) lem/perekat;
 - 8) kantong plastik;
 - 9) bolpoin;
 - 10) segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti

gembok;

- 11) spidol;
- 12) stiker nomor kotak suara;
- 13) tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
- 14) label identitas kotak suara setiap jenis Pemilu;
- 15) salinan DPT;
- 16) salinan daftar Pemilih tambahan; dan
- 17) label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilu.

Dalam hal Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan kewenangannya, maka pengadaan Logistik Pemilu dapat dilaksanakan oleh tingkatan di atasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal KPU dapat mengambil alih kewenangan pengadaan Logistik Pemilu yang menjadi kewenangan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b. Sekretariat KPU Provinsi mengambil alih kewenangan pengadaan Logistik Pemilu yang menjadi kewenangan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota.
2. Proses Pengadaan

Pengadaan Logistik Pemilu berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya. Langkah proses pengadaan Logistik Pemilu yang perlu dilaksanakan meliputi:

- a. mengidentifikasi kebutuhan Logistik Pemilu;
- b. menetapkan jumlah masing-masing jenis logistik;
- c. membuat rancangan kontrak pengadaan;
- d. memilih metode pengadaan;
- e. memilih Penyedia; dan
- f. menandatangani kontrak pengadaan.

Berikut adalah Tabel Metode Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 3

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Metode Pengadaan
		(Jumlah)	(Satuan)			
1	2	3	4	5	6	7
1	Segel Plastik	185.052	Pcs	4.993.189.750	925.260.000	E-Purchasing
2	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	8.812	Lembar	4.993.189.750	8.812.000	E-Purchasing
3	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	8.812	Lembar	4.993.189.750	8.812.000	E-Purchasing
4	Daftar Calon Tetap Anggota DPR Provinsi	8.812	Lembar	4.993.189.750	8.812.000	E-Purchasing
5	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	8.812	Lembar	4.993.189.750	8.812.000	E-Purchasing
6	Segel Plastik/Kabel Ties	7.236	Pcs	4.993.189.750	36.180.000	E-Purchasing
7	Pengadaan label nomor kotak suara pemilu tahun 2024	35.248	Pcs	70.496.000	176.240.000	E-Purchasing
8	Alat Coblos Pemilu	35.248	Pcs	4.993.189.750	10.000	E-Purchasing
9	Tanda Pengenal	378.916	Pcs	4.993.189.750	5.000	E-Purchasing
10	Karet Pengikat	2.019.344	Pcs	4.993.189.750	50	E-Purchasing
11	Lem	17.700	Pcs	4.993.189.750	8.500	E-Purchasing
12	Kantong Plastik Uk. Besar	70.496	Pcs	4.993.189.750	8.000	E-Purchasing
13	Kantong Plastik Uk. Sedang	8.812	Pcs	4.993.189.750	5.000	E-Purchasing

No	Jenis Barang/ Jasa Logistik	Volume		Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Metode Pengadaan
		(Jumlah)	(Satuan)			
1	2	3	4	5	6	7
14	Kantong Plastik Uk Kecil	17.624	Pcs	4.993.189.750	500	E-Purchasing
15	Kantong Plastik Selongsong	35.248	Pcs	4.993.189.750	1.000	E-Purchasing
16	Kantong Plastik Zyplok	8.812	Pcs	4.993.189.750	2.500	E-Purchasing
17	Ballpoint	61.899	Pcs	4.993.189.750	3.500	E-Purchasing
18	Spidol Besar	12	Pcs	4.993.189.750	9.000	E-Purchasing
19	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	1.191.986	Lembar	417.195.100	400	E-Purchasing
20	Spidol Kecil	105.871	pcs	4.993.189.750	3.500	E-Purchasing
21	SDPT Daftar Hadir NIK Berbintang	158.616	Lembar	50.000.000	350	E-Purchasing
	Jumlah			65.449.157.850		

3. Proses Produksi

a. Persiapan Produksi

Dalam rangka produksi Logistik Pemilu, Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dan PPLN melakukan persiapan produksi Logistik pemilu sebagai berikut:

- 1) memastikan jumlah kebutuhan Logistik Pemilu;
- 2) memastikan spesifikasi teknis Logistik Pemilu;
- 3) menyiapkan jadwal produksi dan distribusi Logistik Pemilu;

- 4) koordinasi dengan Penyedia Logistik Pemilu terkait jumlah kebutuhan, spesifikasi pekerjaan, jadwal produksi dan distribusi Logistik Pemilu;
- 5) koordinasi dengan Penyedia Logistik Pemilu terkait kesiapan Penyedia meliputi bahan baku, mesin, sumber daya manusia, sarana dan prasarana produksi dalam pelaksanaan pekerjaan; dan
Khusus produksi surat suara langkah-langkah kegiatan yang dilakukan dalam rangka persiapan produksi pencetakan setiap jenis surat suara sebagai berikut:
 - 1) Penyiapan berupa berkas lunak (*soft file*) dan berkas fisik (*hard file*) hasil *Digital Color Proofing* (DCP);
 - 2) Penyerahan berkas lunak (*soft file*) dan berkas fisik (*hard file*) hasil DCP kepada Penyedia;
 - 3) Pencetakan surat suara dengan menggunakan berkas (*soft file*) hasil DCP;
 - 4) Meneliti contoh hasil cetakan surat suara dengan membandingkan master berkas fisik (*hard file*) hasil DCP; dan
 - 5) Menyetujui pencetakan surat suara secara massal.

b. Pelaksanaan Produksi

Pelaksanaan produksi pengadaan Logistik Pemilu dilakukan kegiatan meliputi pengamanan, pengendalian mutu, penghitungan, pengepakan, penyimpanan, pelaporan berkala

dan kegiatan pendukung lainnya.

Sekretariat KPU Kota Jakarta Timur memantau pelaksanaan produksi Logistik Pemilu pada tahapan sebagai berikut:

1) Produksi

Sekretariat KPU Kota Jakarta Timur perlu melakukan pemantauan selama proses produksi untuk memastikan kuantitas dan kualitas hasil produksi yang dilakukan oleh Penyedia sesuai dengan jumlah dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh KPU, serta menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan logistik.

2) Penyortiran Hasil Produksi

Sekretariat KPU Kota Jakarta Timur sesuai dengan kewenangan pengadaannya wajib memantau Penyedia dalam melakukan penyortiran Logistik Pemilu secara acak/sampling. Khusus untuk kualitas surat suara, maka penyortiran dilakukan dengan memperhatikan kriteria surat suara rusak sebagai berikut:

- a) hasil cetak warna surat suara tidak merata, tidak jelas, tidak terbaca, dan terdapat banyak noda;
- b) surat suara kusut/mengkerut dan sobek;
- c) warna penanda surat suara tidak sesuai dengan jenis Pemilu;
- d) nama dan logo partai politik tidak lengkap dan/atau tidak jelas;
- e) logo KPU tidak jelas;

- f) terdapat lubang pada kolom nomor urut atau kolom foto atau kolom nama pasangan calon sehingga menimbulkan kesan surat suara sudah dicoblos;
- g) foto calon dan/atau pasangan calon buram dan/atau berbayang; dan
- h) warna lambang partai tidak sesuai dengan Keputusan KPU mengenai standar dan spesifikasi teknis nama, nomor urut, dan tanda gambar partai politik peserta Pemilihan Umum.

3) Penghitungan Hasil Produksi

Penghitungan dilakukan oleh Penyedia dengan cara menghitung jumlah masing-masing jenis Logistik Pemilu yang dituangkan dalam:

- a) Laporan harian meliputi jumlah yang dipesan berdasarkan kontrak, jumlah yang diproduksi, jumlah kekurangan yang belum diproduksi, dan jumlah yang sudah dikirim.
- b) Laporan akhir hasil produksi Logistik Pemilu meliputi jumlah yang dipesan berdasarkan kontrak, jumlah yang diproduksi, dan jumlah yang sudah dikirim.

Berikut adalah Tabel Efisiensi Proses Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 4

No	Jenis Barang/ Jasa Logistik	Volume		Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Efisiensi	
		(Jumlah)	(Satuan)				(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Segel Plastik	185.052	Pcs	4,993,189,750	925.260.000	19.411.029	905.848.971	97,90%
2	Pengadaan label nomor kotak suara pemilu tahun 2024 melalui katalog elektronik nasional	35.248	Pcs	70.496.000	70.000.000	59.921.600	10.078.400	14,40%
3	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	8.812	Lembar	4,993,189,750	8.812.000	5.560.372	3.251.628	36,90%
4	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	8.812	Lembar	4,993,189,750	8.812.000	8.089.416	722.584	8,20%
5	Daftar Calon Tetap Anggota DPR Provinsi	8.812	Lembar	4,993,189,750	8.812.000	8.089.416	722.584	8,20%
6	Daftar Calon Tetap Anggota DPD Provinsi	8.812	Lembar	4,993,189,750	8.812.000	8.089.416	722.584	8,20%
7	Segel Plastik/Kabel Ties	7.236	Pcs	4,993,189,750	36.180.000	7.590.202	28.589.798	79,02%
8	Alat Coblos Pemilu	35.248	Pcs	4,993,189,750	352.480.000	264.360.000	88.120.000	25,00%
9	Tanda Pengenal	378.916	Pcs	4,993,189,750	1.894.580.000	1.345.151.800	549.428.200	29,00%
10	Karet Pengikat	2.019.344	Pcs	4,993,189,750	100.967.200	76.735.072	24.232.128	24,00%

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Efisiensi	
		(Jumlah)	(Satuan)				(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Lem	17.700	Pcs	4,993,189,750	3.031.328.000	132.750.000	2.898.578.000	95,62%
12	Kantong Plastik Uk Besar	70.496	Pcs	4,993,189,750	563.968.000	507.571.200	56.396.800	10,00%
13	Kantong Plastik Uk Sedang	8.812	Pcs	4,993,189,750	44.060.000	20.091.360	23.968.640	54,40%
14	Kantong Plastik Uk Kecil	17.624	Pcs	4,993,189,750	8.812.000	3.524.800	5.287.200	60,00%
15	Kantong Plastik Selongsong	35.248	Pcs	4,993,189,750	35.248.000	21.148.800	14.099.200	40,00%
16	Kantong Plastik Zyplok	8.812	Pcs	4,993,189,750	22.030.000	15.421.000	6.609.000	30,00%
17	Ballpoint	61.899	Pcs	4,993,189,750	216.646.500	157.842.450	58.804.050	27,14%
18	Spidol Besar	12	Pcs	4,993,189,750	108.000	90.000	18.000	16,67%
19	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	1.191.986	Lembar	418.000.000	417.195.100	375.475.590	41.719.510	10,00%
20	Spidol Kecil	105.871	pcs	4,993,189,750	370.548.500	232.916.200	137.632.300	37,14%
21	SDPT Daftar Hadir NIK Berbintang	158.616	Lembar	60.000.000	55.515.600	47.584.800	7.930.800	14,29%
Jumlah				548.496.000		3.084.498.323	4.862.760.377	

4) Pengepakan Hasil Produksi

Pengepakan Logistik Pemilu adalah kegiatan menata dan mengemas masing-masing jenis Logistik Pemilu sesuai dengan jumlah alokasi kebutuhan KPU Kota Jakarta Timur. Dalam melaksanakan pengepakan, Penyedia harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a) bahan pengepakan harus berkualitas baik;
- b) pengepakan dilakukan dengan baik, teliti, dan rapi;
- c) setiap kemasan diberi label dan ditulis nama satker KPU Kota Jakarta Timur, isi kemasan, nomor, dan jumlah isi boks; dan
- d) setiap boks (*double wall*) disusun terpisah dalam masing-masing palet berdasarkan alokasi titik pengiriman.

Tata cara lebih lanjut dalam pelaksanaan pengepakan masing-masing Logistik Pemilu oleh Penyedia ditetapkan dalam dokumen kontrak.

5) Penyimpanan Hasil Produksi

Selama proses produksi, Penyedia menyimpan Logistik Pemilu di tempat yang baik, aman, dan mudah diperiksa. Kegiatan penyimpanan dimulai dari datangnya barang yang diproduksi sampai adanya permintaan untuk didistribusikan. Kegiatan penyimpanan diawali dengan penerimaan barang di

gudang, penghitungan dan pengecekan, pencatatan pada kartu stok gudang, serta barang dimasukkan dan ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan di dalam gudang.

Gudang yang dimiliki oleh Penyedia harus menjamin keselamatan dan keamanan Logistik Pemilu dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) area gudang bebas banjir;
- b) instalasi listrik cukup memadai;
- c) memiliki kamera pengawas (CCTV);
- d) pintu gerbang yang aman;
- e) dinding, lantai, dan atap gudang berkualitas baik dan menjamin keamanan barang;
- f) pengaturan udara (ventilasi) gudang cukup baik;
- g) tersedia palet/ganjal barang;
- h) letak gudang mudah dilalui sarana transportasi;
- i) tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap;
- j) terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi gudang; dan
- k) tersedianya alat pemindahan barang.

Salah satu kewenangan perihal sewa gudang logistik tingkat KPU Kabupaten/Kota, dalam hal ini KPU Kota Jakarta Timur melakukan sewa gudang logistik Pemilu Tahun 2024 selama 2 (dua) tahun yang beralamat di Kawasan Industri Pulogadung

(JIEP) Jl. Rawa Gelam II No.7 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung. Jakarta Timur. Selain gudang logistik induk KPU Kota Jakarta Timur, terdapat pula tempat gudang penampungan logistik KPU Kota Jakarta Timur yang tersebar di Sepuluh Kecamatan.

Seperti yang tertera pada gambar sebagai berikut :

Gudang Induk Penyimpanan Logistik Pemilu
Tahun 2024

Berikut adalah tempat dan lokasi gudang penampungan logistik KPU Kota Jakarta Timur yang berada di 10 (sepuluh) kecamatan.

GUDANG INDUK LOGISTIK KPU KOTA JAKARTA TIMUR PEMILU TAHUN 2024			
No	KPU KOTA	Gudang Logistik	Alamat
1	Jakarta Timur	GUDANG INDUK LOGISTIK PEMILU 2024	Kawasan Industri Pulogadung (JIEP) Jl. Rawa Gelam II No.7 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur
ALAMAT GUDANG LOGISTIK KECAMATAN (PPK) SE-KOTA JAKARTA TIMUR PEMILU TAHUN 2024			
No	Nama Kecamatan	Gudang Logistik	Alamat
1	Matraman	Gelanggan Remaja Matraman	Jl. Balai Rakyat, RT.8/RW.10, Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13120
2	Pulogadung	GOR Pulogadung	Jl. Velodrome No.3, RW.6, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220
3	Jatinegara	GOR Youth Center Jakarta Timur	Jalan Onsta Raya No.121, RT.8/RW.9, Kampung Melayu, RT.13/RW.8, Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13330
4	Kramat Jati	Aula Gedung Dinas Lingkungan Hidup Prov. DKI Jakarta	Jl. Mandala V No.871, RT.1/RW.2, Cililitan, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13640
4	Kramat Jati	Aula Bale Gede	Jl. Dato Tonggara III No.6, RT.6/RW.11, Kramat Jati, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13510
5	Pasar Rebo	Gedung Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi dan Kemas dan Balai Diklat Jakarta, Pekayon, Jakarta Timur	Jl. Balai Kimia No.19 Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur
6	Cakung	Rusun PIK 1 & 2 UPRS VIII Tower B2	Jl. Rusunawa Penggilingan No.5, RT.1/RW.019, Penggilingan, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13940
7	Duren Sawit	GOR Pondok Bambu dan, atau Gelanggan Remaja Pondok Bambu	Jl. Balai Rakyat No.6, RT.1/RW.9, Pd. Bambu, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur,
8	Makasar	GOR Makasar	Jl. Gelanggan Remaja No.43, Rt. 1, R.w. 5, Makasar, Jakarta Timur
9	Ciracas	GOR PKP	Jl. Raya Pkp, RT.1/RW.8, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730
10	Cipayung	SMKN 24 Bambu Apus	Jl. Bambu Hitam, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur

6) Pengawasan Proses Produksi

Pengawasan proses produksi Logistik Pemilu dilakukan oleh tim yang terdiri dari pengarah, penanggung jawab, dan pelaksana yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan/atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan pengadaan Logistik Pemilu. Keanggotaan tim dapat berasal dari gabungan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Dalam rangka pengawasan proses produksi, tim bertugas:

- memonitor proses dan progres produksi Logistik Pemilu;
- memverifikasi kesesuaian jumlah dan kualitas produksi Logistik Pemilu;
- memverifikasi jumlah hasil produksi Logistik Pemilu

yang telah dikirim ke KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;

- d) memverifikasi jumlah hasil produksi Logistik Pemilu yang masih tersimpan di Penyedia/Produsen; dan
- e) menandatangani laporan harian dan laporan akhir hasil produksi Logistik Pemilu.

Berikut adalah Tabel Hasil Proses Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 5

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Kebutuhan		Jumlah SPK	Nilai Total SPK (Rp)
		(Jumlah)	(Satuan)		
1	2	3	4	5	6
1	Segel Plastik	185.052	Pcs	19.411.029	19.411.029
2	Pengadaan label nomor kotak suara pemilu tahun 2024 melalui katalog elektronik nasional	8.812	Lembar	59.921.600	59.921.600
3	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	8.812	Lembar	5.560.372	5.560.372
4	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	8.812	Lembar	8.089.416	8.089.416
5	Daftar Calon Tetap Anggota DPR Provinsi	8.812	Lembar	8.089.416	8.089.416
6	Daftar Calon Tetap Anggota DPD Provinsi	7.236	Pcs	8.089.416	8.089.416
7	Segel Plastik/Kabel Ties	35.248	Pcs	7.590.202	7.590.202
8	Alat Coblos Pemilu	35.248	Pcs	264.360.000	264.360.000
9	Tanda Pengenal	378.916	Pcs	1.345.151.800	1.345.151.800
10	Karet Pengikat	2.019.344	Pcs	76.735.072	76.735.072

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Kebutuhan		Jumlah SPK	Nilai Total SPK (Rp)
		(Jumlah)	(Satuan)		
1	2	3	4	5	6
11	Lem	17.700	Pcs	132.750.000	132.750.000
12	Kantong Plastik Uk Besar	70.496	Pcs	507.571.200	507.571.200
13	Kantong Plastik Uk Sedang	8.812	Pcs	20.091.360	20.091.360
14	Kantong Plastik Uk Kecil	17.624	Pcs	3.524.800	3.524.800
15	Kantong Plastik Selongsong	35.248	Pcs	21.148.800	21.148.800
16	Kantong Plastik Zyplok	8.812	Pcs	15.421.000	15.421.000
17	Ballpoint	61.899	Pcs	157.842.450	157.842.450
18	Spidol Besar	12	Pcs	90.000	90.000
19	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	417.195.100	Lembar	375.475.590	375.475.590
20	Spidol Kecil	105.871	Pcs	232.916.200	232.916.200
21	SDPT Daftar Hadir NIK Berbintang	158.616	Lembar	47.584.800	47.584.800
	Jumlah			3.317.414.523	3.317.414.523

Selanjutnya Tabel Beban Kerja Penyedia Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

Tabel 6

No	Jenis Barang/ Jasa Logistik	Kebutuhan		Jumlah Penyedia	Beban Kerja Penyedia (%)
		Jumlah	Satuan		
1	2	3	4	5	6
1	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	1.191.986	Lembar	1	100%
2	Alat Coblos Pemilu	35.248	Pcs	1	100%
3	Tanda Pengenal	378.916	Pcs	1	100%
4	Karet Pengikat	2.019.344	Pcs	1	100%
5	Lem	17.700	Pcs	1	100%
6	Kantong Plastik Uk Besar	70.496	Pcs	1	100%
7	Kantong Plastik Uk Sedang	8.812	Pcs	1	100%
8	Kantong Plastik Uk Kecil	17.624	Pcs	1	100%
9	Kantong Plastik Selongsong	35.248	Pcs	1	100%
10	Kantong Plastik Zyplok	8.812	Pcs	1	100%
11	Ballpoint	61.899	Pcs	1	100%
12	Spidol Besar	12	Pcs	1	100%
13	Spidol Kecil	105.871	Pcs	1	100%
14	Segel Plastik	185.052	pcs	1	100%
15	Pengadaan label nomor kotak suara pemilu tahun 2024 melalui katalog elektronik nasional	8.812	Lembar	1	100%

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Kebutuhan		Jumlah Penyedia	Beban Kerja Penyedia (%)
		Jumlah	Satuan		
1	2	3	4	5	6
16	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	8.812	Lembar	1	100%
17	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	8.812	Lembar	1	100%
18	Daftar Calon Tetap Anggota DPR Provinsi	8.812	Lembar	1	100%
19	Daftar Calon Tetap Anggota DPD Provinsi	7.236	Pcs	1	100%
20	Segel Plastik/Kabel Ties	35.248	Pcs	1	100%
21	SDPT Daftar Hadir NIK Berbintang	158.616	Lembar	1	100%
	Jumlah			21	

Kemudian Tabel Efektivitas Pemenuhan Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

Tabel 7

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Satuan	Jumlah Produksi	Jumlah Pemenuhan Kekurangan	Efektivitas (%)
1	2	3	4	5	6
1	Segel Plastik/Kabel Ties	Pcs	7.236	329	95,45%
	Jumlah		7.236	329	

C. Pendistribusian

Pendistribusian Logistik Pemilu dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Logistik Pemilu pada pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang berlangsung di dalam negeri dan di luar negeri. Pendistribusian Logistik Pemilu oleh KPU Kota Jakarta Timur fokus memperhatikan skala prioritas daerah tujuan, meliputi:

1. jumlah pemilih;
2. jumlah TPS;
3. jarak;
4. waktu tempuh;
5. letak geografis;
6. iklim/cuaca;
7. jadwal operasional sarana moda transportasi;
8. regulasi perizinan setempat; dan
9. tingkat kerawanan tempat tujuan.

Jenis angkutan yang digunakan dapat berupa angkutan darat, angkutan air, dan/atau angkutan udara dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. situasi dan kondisi;
2. kecepatan distribusi;
3. ketersediaan alat angkutan dan infrastruktur yang ada;
4. kondisi wilayah asal dan tujuan;
5. efektifitas dan efisiensi; dan
6. keamanan dan keselamatan.

Berdasarkan lokasi distribusi Logistik Pemilu, pendistribusian Logistik Pemilu di dalam Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pendistribusian Logistik Pemilu

Pendistribusian Logistik Pemilu dalam Provinsi DKI

Jakarta dilaksanakan dengan menggunakan sarana angkutan darat dan air dengan jadwal waktu pendistribusian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten/Kota dengan mengacu pada Jadwal Tahapan Pemilu Tahun 2024. Pendistribusian Logistik Pemilu dalam negeri terdiri dari dua tahap, yaitu:

b. Pendistribusian Logistik Pemilu dari Penyedia ke KPU Kota Jakarta Timur.

Penyedia Logistik Pemilu mendistribusikan Logistik Pemilu dari Penyedia sampai dengan ke KPU Kota Jakarta Timur yang diawali dengan tahap perencanaan pendistribusian, meliputi:

- a. Penyedia berkewajiban menjamin keamanan isi muatan dengan menggunakan moda transportasi yang memenuhi standar layak jalan dan memperhatikan kondisi cuaca dan jalan;
- b. Penyedia menginformasikan jadwal pengiriman dan progress pengiriman per hari kepada KPU Kota Jakarta Timur. Penyampaian informasi menggunakan teknologi Sistem Informasi Logistik (SILOG) dari KPU RI;
- c. Penyedia berkewajiban menginformasikan rencana jadwal kedatangan Logistik Pemilu minimal 1 (satu) hari sebelum kedatangan kepada KPU Kota Jakarta

Timur;

d. Penyedia mengirimkan Logistik Pemilu menggunakan perusahaan ekspedisi terverifikasi dalam Etalase Jasa Pengiriman (ekspedisi) yang telah terdaftar di KPPN Jakarta IV dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) sanggup mendistribusikan Logistik Pemilu ke seluruh Kota Jakarta Timur sesuai dengan waktu distribusi yang ditentukan dalam surat pesanan oleh PPK *e-purchasing*;
- 2) memiliki jaringan distribusi lokal sampai nasional;
- 3) memiliki aplikasi/*website tracking online* dan bersedia diintegrasikan dengan Sistem Aplikasi Logistik KPU.
- 4) memiliki moda transportasi yang layak;
- 5) pendistribusian berlangsung sejak proses muat barang di lokasi produksi hingga pengiriman ke lokasi tujuan (tidak termasuk kegiatan bongkar di lokasi tujuan).

e. Penyedia berkewajiban mengasuransikan seluruh muatan yang dikirim; dan

f. Penyedia bertanggungjawab mengganti Logistik Pemilu yang rusak dalam perjalanan.

Dokumen yang harus dipersiapkan oleh Penyedia dalam

pendistribusian Logistik Pemilu dari Penyedia ke KPU Kota Jakarta Timur adalah sebagai berikut:

- 1) surat jalan yang diterbitkan oleh masing-masing Penyedia distribusi; dan
- 2) dokumen BTTB Logistik Pemilu di KPU Kota Jakarta Timur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KPU Kota Jakarta Timur melakukan pengecekan jadwal pendistribusian dan melakukan koordinasi terkait distribusi Logistik Pemilu dengan segenap pemangku kepentingan. Untuk keselamatan dan keamanan pengiriman Logistik Pemilu ke KPU Kota Jakarta Timur dengan tingkat kerawanan keamanan tinggi, maka pihak Penyedia dapat melibatkan petugas pengawalan dalam pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman yang personilnya berasal dari aparat keamanan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Pelibatan petugas pengawalan dapat dilakukan sejak mulai Logistik Pemilu diangkut dan dikirim dari Penyedia sampai dengan ke Gudang Logistik KPU Kota Jakarta Timur, biaya pelaksanaan pengawalan menjadi tanggungjawab Penyedia.

KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kota Jakarta Timur berkewajiban melakukan pemantauan terhadap kelancaran, keamanan, dan keutuhan Logistik Pemilu sejak dari pengangkutan, pengiriman, dan sampai di alamat Gudang

Penyimpanan Logistik KPU Kota Jakarta Timur. Pemantauan Logistik Pemilu dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan Logistik Pemilu yang akan dikirim ke KPU Kota Jakarta Timur sesuai dengan alokasi kebutuhan;
- 2) memeriksa setiap pelaksanaan pengiriman yang telah mendapat kepastian dari Penyedia dan menyampaikan informasi melalui media komunikasi ke KPU Kota Jakarta Timur;
- 3) memastikan Logistik Pemilu yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan; dan
- 4) membuat laporan perkembangan pelaksanaan pendistribusian Logistik Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut adalah Tabel Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 dari Penyedia ke KPU Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 8

No	Jenis Logistik Pemilu	Jumlah Kemasan	Satuan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan	Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Segel Plastik/Kabel Ties	962	Dus	6 Februari 2024	6 Februari 2024	Darat	Tidak ada
2	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	18	Boks	20 Desember 2023	22 Desember 2023	Darat	Tidak ada
3	Daftar Calon Tetap Anggota DPR Provinsi	18	Boks	2 Januari 2024	3 Januari 2024	Darat	Tidak ada
4	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	18	Boks	2 Januari 2024	3 Januari 2024	Darat	Tidak ada
5	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	18	Boks	2 Januari 2024	3 Januari 2024	Darat	Tidak ada

No	Jenis Logistik Pemilu	Jumlah Kemasan	Satuan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan	Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Pengadaan label nomor kotak suara pemilu tahun 2024	20	Dus	13 Desember 2023	13 Desember 2023	Darat	Tidak ada
7	Alat Coblos, Tanda Pengenal, Karet Pengikat Surat Suara, Lem, Kantong Plastik Besar, Kantong Plastik Sedang, Kantong Plastik Kecil, Kantong Plastik Selongsong, Kantong Plastik Ziplok, Ballpoint, Spidol Besar, Spidol Kecil	8812	Set	4 Desember 2023	4 Desember 2023	Darat	Tidak ada

c. Pendistribusian Logistik Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS

Logistik Pemilu yang dikirim dari Gudang Logistik KPU Kota Jakarta Timur sampai ke TPS harus diterima di TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara. KPU Kota Jakarta Timur melakukan persiapan pendistribusian Logistik Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana pendistribusian;
- b. menetapkan pembagian wilayah pendistribusian;
- c. menyusun rencana moda angkutan darat, angkutan air, dan/atau angkutan udara sesuai dengan kondisi geografis daerah tujuan; dan
- d. mengoordinasikan rencana pendistribusian dengan PPK, PPS, dan KPPS.

Dalam pendistribusian Logistik Pemilu, KPU Kota Jakarta Timur dapat:

- 1) menggunakan Penyedia jasa layanan distribusi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah.

- 2) melakukan pengawalan pendistribusian sejak Logistik Pemilu diangkut dan dikirim dari Gudang Logistik KPU Kota Jakarta Timur ke TPS untuk memastikan keamanan dan kelancaran distribusi Logistik Pemilu.
- 3) melibatkan PPK dan PPS, dengan menyiapkan dan membuat BTTB dari KPU Kota Jakarta Timur ke PPK sebagaimana tercantum pada peraturan yang berlaku.

Tugas PPK dalam pendistribusian Logistik Pemilu adalah sebagai berikut:

- 1) mendistribusikan Logistik Pemilu kepada PPS dan/atau KPPS sesuai jadwal dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a) mendahulukan kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain terjauh dan/atau sulit dijangkau;
 - b) dapat menyertakan petugas pengamanan; dan
 - c) menggunakan alat transportasi yang cepat dan aman.
- 2) menyiapkan BTTB Logistik Pemilu dari PPK ke PPS dan/atau KPPS;
- 3) melakukan koordinasi dengan camat, panitia pengawas pemilu kecamatan, dan aparat keamanan untuk pengamanan Logistik Pemilu selama pendistribusian;

- 4) menjaga dan mengamankan keutuhan Logistik Pemilu pada saat pendistribusian ke PPS;
- 5) dalam hal Logistik Pemilu dikirim langsung ke TPS, PPK melakukan koordinasi dengan kepala desa/lurah, panitia pengawas pemilu kecamatan, kelurahan/desa atau sebutan lain, PPS, dan aparat keamanan; dan
- 6) melaporkan pengiriman Logistik Pemilu kepada KPU Kota Jakarta Timur.

Tugas PPS dalam pendistribusian Logistik Pemilu adalah sebagai berikut:

- 1) mendistribusikan Logistik Pemilu kepada KPPS sesuai jadwal;
- 2) menyiapkan BTTB dari PPS ke KPPS;
- 3) melakukan koordinasi dengan kepala desa/lurah, panitia pengawas pemilu kecamatan, kelurahan/desa atau sebutan lain kelurahan/desa, dan aparat keamanan untuk pengamanan Logistik Pemilu selama pendistribusian;
- 4) menjaga dan mengamankan keutuhan Logistik Pemilu pada saat pendistribusian ke KPPS; dan
- 5) melaporkan pendistribusian Logistik Pemilu kepada PPK. KPU Kabupaten/Kota berkewajiban memantau kelancaran, keamanan, dan keselamatan pendistribusian Logistik

Pemilu sejak dari KPU Kota Jakarta Timur sampai dengan alamat tujuan. Pemantauan dilakukan dengan cara:

- 1) memeriksa dan meneliti setiap jenis Logistik Pemilu yang akan dikirim ke daerah tujuan sesuai dengan alokasi kebutuhan;
- 2) memastikan setiap jenis Logistik Pemilu yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan dalam keadaan baik, utuh, dan selamat; dan
- 3) membuat laporan pendistribusian Logistik Pemilu dari KPU Kota Jakarta Timur sampai ke TPS.

Berikut adalah Tabel Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 dari KPU Kota Jakarta Timur ke TPS

Tabel 9

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih (orang)	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari PPK	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan	Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MATRAMAN	517	141.761	4	517	12-13 Februari 2024	14 February 2024	Darat	Tidak ada
2	PULOGADUNG	830	229.274	4	830	11 February 2025	14 February 2024	Darat	Tidak ada
3	JATINEGARA	906	250.218	4	906	12 February 2026	14 February 2024	Darat	Tidak ada
4	KRAMATJATI	848	232.712	4	848	12-13 Februari 2027	14 February 2024	Darat	Tidak ada
5	PASAR REBO	620	167.331	4	620	13 February 2028	14 February 2024	Darat	Tidak ada
6	CAKUNG	1.591	421.015	4	1.591	11 February 2029	14 February 2024	Darat	Tidak ada
7	DUREN SAWIT	1.246	332.461	4	1.246	12-13 Februari 2030	14 February 2024	Darat	Tidak ada
8	MAKASAR	588	159.845	4	588	13 February 2031	14 February 2024	Darat	Tidak ada
9	CIRACAS	863	232.861	4	863	12-13 Februari 2032	14 February 2024	Darat	Tidak ada
10	CIPAYUNG	803	216.494	4	803	12 February 2033	14 February 2024	Darat	Tidak ada
	Jumlah	8.812	2.383.972	40	10				

Berikut adalah Tabel Moda Transportasi Logistik Pemilu Tahun 2024 sampai ke Tempat Pemungutan Suara di Kota Jakarta Timur

Tabel 10

No	Jenis Transportasi	Jumlah Moda Transportasi Logistik Pemilu ke					
		PPK		PPS		TPS	
		(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pesawat/Helikopter	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2	Mobil Truck	100	100,00%	100	100,00%	-	0,00%
3	Mobil Pick up	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4	Sepeda Motor/ Sepeda Kayuh	-	0,00%	-	0,00%	100	100,00%
5	Speedboard/ Perahu	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6	Kuda/Angkutan Tenaga Hewan	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
7	Dipikul/Jalan Kaki	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

D. Pemeliharaan dan Inventarisasi

Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu dilakukan untuk Logistik Pemilu di dalam negeri. Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu dalam negeri dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam hal ini adalah KPU Kota Jakarta Timur, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu Tahun 2024 meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Penerimaan

Untuk memastikan Logistik Pemilu diterima dengan baik,

Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:

- 1) melakukan pemeriksaan terhadap jenis dan jumlah barang yang diterima tanpa membuka isi kemasan;
 - 2) mencocokkan jenis dan jumlah barang yang diterima dengan surat jalan dan BTTB;
 - 3) menandatangani surat jalan dan BTTB; dan
- b. dalam hal jumlah barang tidak sesuai dengan jumlah barang yang tertera pada BTTB maka dicantumkan jumlah kekurangan barang pada kolom keterangan. Penyortiran dan Penghitungan KPU Kota Jakarta Timur melakukan penyortiran Logistik Pemilu dengan melakukan pemisahan Logistik Pemilu yang baik dan yang rusak, yang dilanjutkan kegiatan penghitungan logistik yang baik dan rusak serta kelebihan/kekurangan logistik yang diterima. Kegiatan penyortiran dan penghitungan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) membuka kemasan Logistik Pemilu;
 - 2) memastikan kesesuaian isi dengan informasi yang tertera pada BTTB dan/atau label kemasan;
 - 3) melakukan pemisahan Logistik Pemilu yang baik dan yang rusak. Khusus untuk surat suara, maka pemisahan

dilakukan dengan memperhatikan kriteria berikut:

- a) surat suara rusak:
 - (1) hasil cetak warna surat suara tidak merata, tidak jelas, tidak terbaca, dan terdapat banyak noda;
 - (2) surat suara kusut/mengkerut dan sobek;
 - (3) warna penanda surat suara tidak sesuai dengan jenis Pemilu;
 - (4) nama dan logo partai politik tidak lengkap dan/atau tidak jelas;
 - (5) logo KPU tidak jelas;
 - (6) terdapat lubang pada kolom nomor urut atau kolom foto atau kolom nama pasangan calon sehingga menimbulkan kesan surat suara sudah dicoblos;
 - (7) foto calon dan/atau pasangan calon buram/berbayang; dan
 - (8) warna lambang partai tidak sesuai dengan Keputusan KPU mengenai standar dan spesifikasi teknis nama, nomor urut, dan tanda gambar partai politik peserta pemilihan umum.
- b) surat suara yang cacat cetak, namun masih layak dan dapat digunakan:
 - (1) terdapat bintik/noda/cipratan tinta di satu atau beberapa bagian di luar area pencoblosan;

- (2) terdapat bintik/noda/cipratan tinta yang kecil di satu atau beberapa bagian di dalam area pencoblosan tapi tidak mengenai nama calon, nomor calon, wajah atau leher calon, lambang partai dan nama partai;
- (3) terdapat garis tepi yang terpotong atau hilang sebagian selama foto, nama calon dan nama partai tetap utuh;
- (4) terdapat perbedaan warna penanda surat suara tetapi masih senada; dan
- (5) terdapat noda yang tidak mencolok di luar bidang pencoblosan dan tidak mengganggu desain secara keseluruhan.
- 4) menghitung masing-masing jenis Logistik Pemilu yang baik dan rusak;
- 5) menghitung kekurangan dan kelebihan jumlah masing- masing jenis Logistik Pemilu;
- 6) mencatat dan menuangkan hasil penyortiran dan penghitungan ke dalam Berita Acara Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu di KPU Kota Jakarta Timur.
- 7) menyimpan kelebihan Logistik Pemilu yang rusak di tempat yang aman.

- 8) dalam hal terjadi kekurangan dan/atau kerusakan Logistik Pemilu, Sekretaris KPU Kota Jakarta Timur menyampaikan surat permintaan pemenuhan kekurangan Logistik Pemilu kepada Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal KPU, Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta, dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat KPU Kota Jakarta Timur.
- 9) Pejabat Pembuat Komitmen berkoordinasi dengan pihak Penyedia untuk memenuhi kekurangan masing-masing jenis Logistik Pemilu sesuai dengan kewenangan pengadaan pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- 10) dalam hal KPU Kota Jakarta Timur telah menerima keseluruhan Logistik Pemilu sesuai surat pesanan atau kontrak, maka:
 - a) Pejabat Pembuat Komitmen sesuai kewenangan pengadaan dapat membentuk Tim Pendukung untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam memeriksa BTTB dan surat jalan, serta menyiapkan Berita Acara

Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; dan

- b) Pejabat Pembuat Komitmen sesuai kewenangan pengadaan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Berikut adalah Tabel Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta

Tabel 11

No	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah yang Dipesan	Jumlah yang Diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Penyortiran		Permintaan Kurang/Rusak	
							Baik	Rusak	(n)	(%)
1	Surat Suara	Lembar	9.744.236	9.743.522	714	-	9.742.743	779	1.493	0,02%
2	Kotak Suara	Lembar	35.268	35.255	13	-	35.215	40	53	0,18%
3	Bilik Suara	Lembar	35.248	35.246	2	-	35.236	10	12	0,03%
4	Segel	Keping	696.318	696.088	230	-	696.088	-	230	0,03%
5	Segel Plastik	Buah	185.052	184.875	177	-	184.723	152	329	0,18%
6	Daftar Pasangan Calon	Lembar	8.812	8.451	361	-	8.451	-	361	4,10%
7	Daftar Calon Tetap	Lembar	26.436	26.174	262	-	26.174	-	262	0,99%
8	DCT DPRD	Lembar	26.436	26.171	265	-	26.171	-	265	1,00%
9	DCT DPR	Lembar	26.436	26.174	262	-	26.174	-	262	0,99%
10	DCT DPD	Lembar	26.436	26.173	263	-	26.173	-	263	0,99%
11	Formulir C Hasil Salinan PPWP	Lembar	17.624	17.263	361	-	17.263	-	361	2,05%
12	Formulir C Hasil Salinan DPD	Lembar	35.248	34.887	361	-	34.887	-	361	1,02%
13	Formulir C Hasil Salinan DPR	Lembar	61.648	61.287	361	-	61.287	-	361	0,59%
14	Formulir C Hasil Salinan DPRD	Lembar	61.648	61.287	361	-	61.323	36	325	0,53%
15	Alat Bantu Tuna Netra PPWP	Lembar	8.812	8.429	383	-	8.429	-	383	4,35%
16	Alat Bantu Tuna Netra DPD	Lembar	8.812	8.426	386	-	8.426	-	386	4,38%
17	Form C Plano DPR	Lembar	176.240	175.918	322	-	175.911	7	329	0,19%
18	Form C Plano DPD	Lembar	44.060	43.783	277	-	43.770	13	290	0,66%
19	Form C Plano DPRD	Lembar	176.240	175.935	305	-	175.925	10	315	0,18%
20	Form C Plano PPWP	Lembar	26.436	26.083	353	-	26.070	13	364	1,38%
21	Formulir Plano Model C Hasil DPR	Lembar	176.240	175.918	322	-	175.911	7	329	0,19%
	Jumlah		202.676	202.001	675	-	201.981	20	695	

c. Pengepakan

Pengepakan Logistik Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) menyiapkan daftar alokasi kebutuhan masing-masing jenis Logistik Pemilu per TPS;
- 2) menyusun masing-masing jenis Logistik Pemilu sesuai dengan daftar alokasi kebutuhan per TPS;
- 3) melakukan pengecekan masing-masing jenis Logistik Pemilu yang akan dimasukkan ke dalam sampul atau kantong plastik dengan mengacu pada daftar alokasi kebutuhan per TPS;
- 4) mengikat masing-masing jenis surat suara menggunakan karet gelang;
- 5) memasukkan setiap ikat surat suara ke dalam sampul surat suara, kemudian tepi sampul diberi lem dan disegel pada bagian tengah tutup lipatan;
- 6) memasukkan sampul berisi surat suara dan jenis logistik lainnya ke dalam kantong plastik besar;
- 7) menggulung formulir plano yang selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik model selongsong;
- 8) memasukkan Logistik Pemilu yang ditempatkan di dalam kantong plastik besar ke dalam kotak suara, sebagai berikut:

- a) kotak suara Pemilu presiden dan wakil presiden, berisi:
- (1) surat suara Pemilu Presiden dan wakil presiden yang disimpan dalam sampul kertas dan disegel;
 - (2) tinta yang dibungkus dalam plastik kecil;
 - (3) segel;
 - (4) alat untuk memberi tanda pilihan;
 - (5) sampul kertas;
 - (6) karet pengikat surat suara;
 - (7) kantong plastik ziplok;
 - (8) formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPS berbentuk plano, yang dibungkus dalam kantong plastik selongsong;
 - (9) formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPS berbentuk A4;
 - (10) formulir lainnya yang digunakan di TPS;
 - (11) tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - (12) alat bantu tunanetra Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - (13) segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok.

- b) kotak suara Pemilu anggota DPR RI Dapil 1 berisi:
- (1) surat suara Pemilu anggota DPR RI Dapil 1 yang disimpan dalam sampul kertas dan disegel;
 - (2) formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilu anggota DPR RI Dapil 1 di TPS yang dibungkus dalam kantong plastik selongsong; dan
 - (3) formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilu anggota DPR RI Dapil 1 di TPS berbentuk A4.
- c) kotak suara Pemilu anggota DPD berisi:
- (1) surat suara Pemilu anggota DPD yang disimpan dalam sampul kertas dan disegel;
 - (2) formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilu anggota DPD di TPS berbentuk plano yang dibungkus dalam kantong plastik selongsong;
 - (3) formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilu anggota DPD di TPS berbentuk A4; dan
 - (4) alat bantu tunanetra Pemilu anggota DPD.

- d) kotak suara Pemilu anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 4,5 dan 6 berisi:
- (1) surat suara anggota DPRD Provinsi yang disimpan dalam sampul kertas dan disegel;
 - (2) formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berbentuk plano di TPS yang dibungkus dalam kantong plastik selongsong; dan
 - (3) formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 4,5 dan 6 di TPS berbentuk A4.
- 9) Logistik Pemilu yang di luar kotak suara sebagai berikut:
- a) bilik pemungutan suara;
 - b) tanda pengenal KPPS, petugas keamanan, dan saksi;
 - c) lem/perekat;
 - d) bolpoin;
 - e) spidol;
 - f) stiker nomor kotak suara;
 - g) label kotak suara;
 - h) daftar pasangan calon;
 - i) daftar calon tetap anggota DPR RI Dapil 1, daftar calon tetap anggota DPD Provinsi DKI Jakarta,

daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 4,5 dan 6;

- j) salinan DPT; dan
- k) salinan DPTb.

- 10) memastikan kembali kelengkapan Logistik Pemilu yang ada di dalam kotak suara dan di luar kotak suara;
- 11) memasang segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok pada kotak suara dan disegel;
- 12) menulis informasi dengan jelas dan lengkap Nomor TPS, lokasi PPS, lokasi PPK, Kabupaten/Kota, dan Provinsi pada stiker kotak suara;
- 13) menempelkan label identitas kotak suara pada sisi atas kotak suara dan di atas dinding transparan; dan
- 14) Logistik Pemilu yang disimpan di dalam kantong plastik di luar kotak suara, selanjutnya diikat dan diberi tanda/tulisan sesuai dengan TPS nya.

d. Penyimpanan

Penyimpanan Logistik Pemilu di tempat penyimpanan yang tepat dimaksudkan untuk:

- 1) melindungi Logistik Pemilu dari kerusakan dan kehilangan atau berkurangnya standar mutu;
- 2) memudahkan proses penyaluran Logistik Pemilu ke

TPS; dan

3) mudah diawasi dan dapat dihitung secara periodik.

Logistik Pemilu disimpan di tempat penyimpanan yang menjamin keselamatan dan keamanannya, ditempat yang mudah diawasi dan dapat dihitung secara periodik serta dikelompokkan per kecamatan dan diberi nama kecamatan. Tempat penyimpanan Logistik Pemilu harus memenuhi syarat:

- 1) tempat penyimpanan dapat berupa:
 - a) gudang;
 - b) gedung;
 - c) rumah toko (ruko);
 - d) lapangan olahraga (*indoor*); atau
 - e) bangunan gedung lainnya selain rumah pribadi, yang dimiliki oleh pemerintah atau swasta.
- 2) bebas banjir;
- 3) instalasi listrik cukup memadai;
- 4) pintu gerbang yang aman;
- 5) dinding, lantai, dan atap tempat penyimpanan berkualitas baik dan menjamin keamanan barang;
- 6) pengaturan udara atau ventilasi gudang cukup baik;
- 7) letak gudang mudah dilalui sarana transportasi;
- 8) tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap; dan

9) terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi tempat penyimpanan dengan ketersediaan:

- a) pagar keliling pada area tempat penyimpanan;
- b) alat pemantau keamanan seperti alarm atau kamera pemantau (CCTV);
- c) penugasan petugas keamanan paling kurang sejumlah 2 (dua) orang setiap 12 (dua belas) jam per *shift*; dan
- d) penerangan yang cukup.

Logistik Pemilu yang sudah disimpan di tempat penyimpanan, selanjutnya dilakukan pendistribusian dari Gudang KPU Kota Jakarta Timur sampai ke TPS.

Berikut adalah gambar gudang penyimpanan logistik dan Kondisi Gudang Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Jakarta Timur.

Gudang Induk Penyimpanan Logistik Pemilu Tahun 2024 KPU Kota Jakarta Timur

Tabel 12

No	Kondisi Gudang	Luas (m2)	Status Kepemilikan						Jangka Waktu (bulan)	
			Milik KPU		Pinjam		Sewa		Pinjam	Sewa
			(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Memadai	1.524	0	0,00%	0	0%	100	100%	0	24
2	Kurang Memadai	0	0	0,00%	0	0%	0	0%	0	0
	Jumlah		0		0		100			

E. Pemusnahan Kelebihan Surat Suara

KPU Kota Jakarta Timur melakukan pemusnahan surat suara Pemilu dalam hal pencetakan surat suara melebihi yang dibutuhkan dan surat suara rusak, dengan Pemusnahan Kelebihan Surat Suara di KPU Kota Jakarta Timur

KPU Kota Jakarta Timur melakukan pemusnahan kelebihan surat suara baik surat suara yang rusak maupun surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) pemusnahan kelebihan surat suara dilakukan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara;
- b) pemusnahan kelebihan surat suara disaksikan oleh Kepolisian Polres Metro Jakarta Timur dan Bawaslu Kota Jakarta Timur; dan
- c) pemusnahan kelebihan surat suara dituangkan ke dalam berita acara.

Berikut adalah Tabel Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 13

No	Jenis Surat Suara	Jumlah yang Dipesan (lembar)	Jumlah Surat Suara yang Diterima (lembar)		Jumlah Surat Suara yang Dimusnahkan	
			Baik	Rusak	(lembar)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Presiden dan Wakil Presiden	2.436.059	2.436.062	101	104	4,26919E-05
2	DPR RI	2.436.059	2.436.061	261	263	0,000107961
3	DPRD Prov. DKI Jakarta	2.436.059	2.436.065	412	418	0,000171589
4	DPD Prov. DKI Jakarta	2.436.059	2.436.060	92	93	3,81764E-05
	Jumlah				878	

Dokumentasi Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Jakarta Timur sebagaimana terlampir dalam Laporan Tata Kelola Logistik

**PENANGANAN DAN TINDAK
LANJUT PENGAWASAN INTERNAL
BADAN ADHOC PADA PEMILU 2024**

Pengawasan Internal terhadap dugaan pelanggaran dan kode perilaku yang dilakukan oleh Anggota PPS Cakung Barat ditemukan bukti berupa absensi reguler dan absensi pleno dimana hal tersebut menunjukkan yang bersangkutan jarang mengikuti tahapan Pemilu 2024, sehingga pada tanggal 16 Januari 2024 yang bersangkutan diberikan **Peringatan Tertulis**.

Ketua PPS Jatinegara dan Anggota PPS Jatinegara ditemukan petunjuk dan juga keterangan yang menyimpulkan bahwa diantara ketiganya terdapat komunikasi dan hubungan yang kurang harmonis yang kemudian berimbas pada

terhambatnya beberapa tahapan Pemilu 2024 khususnya di Kelurahan Jatinegara, sehingga pada tanggal 16 Januari 2024 ketiganya diberikan **Peringatan Tertulis**

Terhadap para Ketua dan Anggota PPK Makasar ditemukan petunjuk dan juga keterangan yang menyimpulkan bahwa diantara kelimanya terdapat komunikasi dan hubungan yang kurang harmonis yang kemudian berimbas pada terhambatnya beberapa tahapan Pemilu 2024 khususnya di Kecamatan Makasar, sehingga pada tanggal 24 Januari 2024 ketiganya diberikan **Peringatan Tertulis**.

Terhadap Anggota PPK

Pulogadung, ditemukan bukti berupa absensi reguler dan absensi pleno dimana hal tersebut menunjukkan yang bersangkutan jarang mengikuti tahapan Pemilu 2024, sehingga pada tanggal 24 Januari 2024 yang bersangkutan diberikan **Peringatan Tertulis**.

Terhadap Ketua dan Anggota PPS Pulogadung ditemukan petunjuk dan juga keterangan yang menyimpulkan bahwa diantara ketiganya terdapat komunikasi dan hubungan yang kurang harmonis yang kemudian berimbas pada terhambatnya beberapa tahapan Pemilu 2024 khususnya di Kelurahan Pulogadung, sehingga pada tanggal 24 Januari 2024 ketiganya diberikan **Peringatan Tertulis**.

Terhadap Anggota PPK Duren Sawit, ditemukan bukti berupa

absensi reguler dan absensi pleno dimana hal tersebut menunjukkan yang bersangkutan jarang mengikuti tahapan Pemilu 2024, sehingga pada tanggal 24 Januari 2024 yang bersangkutan diberikan **Peringatan Tertulis**.

- 1) Pengawasan Internal terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh Anggota PPK Ciracas ditemukan bukti berupa absensi reguler dan absensi pleno dimana hal tersebut menunjukkan yang bersangkutan jarang mengikuti tahapan Pemilu 2024, sehingga pada tanggal 3 Februari 2024 yang bersangkutan diberikan **Peringatan Tertulis**.

Terhadap para Ketua dan Anggota PPK Matraman ditemukan bukti, petunjuk dan

juga keterangan yang menyimpulkan bahwa kelimanya terdapat komunikasi yang kurang aktif sehingga terbukti lalai dengan tidak membuat dokumen administrasi berupa Form D Kejadian Khusus atas Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) yang terjadi pada TPS 78 dan TPS 99 Kelurahan Utan Kayu Selatan sehingga mengakibatkan terhambatnya administrasi tahapan rekapitulasi pada Pemilu 2024 khususnya di Kota Jakarta Timur, sehingga pada tanggal 15 Maret 2024 kelimanya diberikan **Peringatan Tertulis**.

Ada 15 kasus diduga melakukan pelanggaran berupa tindakan menerima sejumlah uang tunai dari Calon Legislatif DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo.

Bahwa dalam agenda klarifikasi pada tanggal 9 Maret 2024, ditemukan petunjuk dan pengakuan dari 15 (lima belas) orang Badan Adhoc, dimana petunjuk tersebut berasal dari histori komunikasi dan dokumentasi pertemuan antara 15 (lima belas) orang Badan Adhoc dengan Calon Legislatif DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo. Namun terhadap Ketua PPS Pisangan Baru tidak ditemukan petunjuk dan bukti keterlibatan langsung.

Berdasarkan pengakuan 14 (empat belas) orang lainnya, mereka menyebutkan bahwa semuanya telah diberikan uang sebesar kurang lebih total 1,3 Milyar Rupiah untuk disebarakan kepada Pemilih pada wilayah Kecamatan Cakung dan

Kecamatan Pulogadung yang merupakan Daerah pemilihan Caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo tersebut (sesuai wilayah PPS yang terlibat). Kemudian dilakukan penelusuran terhadap kebenaran pengakuan mereka dan ditemukan beberapa keterangan serta bukti bahwa uang tersebut telah diserahkan dan diterima kepada 14 (empat belas) orang Badan Adhoc.

Sehingga terhadap 14 (empat belas) orang Badan Adhoc tersebut diterbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara, dan dibentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari Rio Verieza, Marhadi dan Carlos Kartika Yudha Paath untuk dilakukan Sidang Pemeriksaan.

Bahwa dalam Sidang

Pemeriksaan, ke-14 (empat belas) orang tersebut tidak melakukan bantahan sama sekali terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi, sehingga pada tanggal 18 Maret 2024 dijatuhkan sanksi berupa Peringatan Tertulis dan Pemberhentian Tetap kepada :

PEMBERHENTIAN TETAP :

1. Anggota PPK Cakung
2. Anggota PPK Cakung
3. Ketua PPS Rawaterate

PERINGATAN TERTULIS :

1. Ketua PPS Penggilingan
2. Ketua PPS Jatinegara
3. Ketua PPS Cakung Timur
4. Ketua PPS Cakung Barat
5. Ketua PPS Ujung Menteng
6. Ketua PPS Pulogebang
7. Ketua PPS Jatinegara Kaum
8. Ketua PPS Kayu Putih
9. Anggota PPS Pisangan Timur
10. Anggota PPS Rawamangung
11. Anggota PPS Cipinang

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 176/PP.04-SD/04/2024 tanggal 22 Januari 2024 Perihal Pelaksanaan Pelantikandan Bimbingan Teknis bagi KPPS.